

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam, dinamis, dan sarat makna. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis agar mahasiswa tidak hanya mengenal, tetapi juga mampu mengkritisi dan merefleksikan dinamika sosial budaya yang ada di sekelilingnya. Melalui buku ini, penulis berusaha menyajikan analisis ilmiah yang disertai konteks kekinian tanpa melepaskan akar-akar budaya lokal bangsa.

Buku ini terdiri atas sembilan bab yang secara bertahap mengupas elemen-elemen penting dalam sistem sosial budaya Indonesia. Bab I membuka dengan pengantar konseptual tentang pengertian sistem sosial budaya. Bab II membahas keberagaman dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bab III menyoroti aspek keluarga dan kekerabatan sebagai pilar dasar kehidupan sosial. Bab IV menguraikan nilai, norma, dan pranata sosial yang menopang keteraturan dalam masyarakat.

Selanjutnya, Bab V menyajikan pembahasan tentang sistem religi yang mencerminkan dimensi spiritualitas dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Bab VI menelaah seni dan budaya dalam kerangka ekspresi sosial. Bab VII membahas bahasa dan komunikasi sebagai alat interaksi dan pewarisan budaya. Bab VIII menyuguhkan dinamika pendidikan dan ekonomi sebagai penopang perubahan sosial, dengan penekanan pada persoalan ketimpangan sosial. Terakhir, Bab IX mengangkat tema politik, hukum, dan globalisasi, termasuk tantangan kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia dalam percaturan dunia modern.

Penerbit Mitra Ilmu  
Makassar Sul-Sel  
Email : [ikapimitrailmu@gmail.com](mailto:ikapimitrailmu@gmail.com)  
Website : [www.mitrailmumakassar.com](http://www.mitrailmumakassar.com)



PENERBIT  
CV. MITRA ILMU

**SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA**

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd & Jumaisa, S.Pd., M.Pd

PENERBIT  
CV. MITRA ILMU



Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd  
Jumaisa, S.Pd., M.Pd

# SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA



# **SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA**

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd  
Jumaisa, S.Pd., M.Pd

**Mitra Ilmu  
2025**

# **SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA**

**Penulis :**

Dr. Irwan, S.Pd., M.Pd

Jumaisa, S.Pd., M.Pd

Editor : Dr. Djohar, M.Si

ISBN: 978-623-145-773-8

Desain Sampul dan Tata Letak: **Abu Syahla Khairun**

**Penerbit :** Mitra Ilmu

**Ukuran :**

23 x 15 cm (Standar UNESCO)

**Kantor:**

Jl. Talak Salapang (Dekat Kampus UNISMUH Makassar)

Hp. 081340021801/ 0852-9947-3675/ 0821-9649-6667

Email : mitrailmua@gmail.com

Website : [www.mitrailmumakassar.com](http://www.mitrailmumakassar.com)

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022

Cetakan pertama: Mei 2025

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

## DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	iii
Kata Pengantar .....	iv
<b>BAB I KERAGAMAN SISTEM SOSIAL BUDAYA.....</b>	<b>1</b>
A. Pengantar Umum.....	1
B. Pengertian Sistem Sosial Budaya.....	6
C. Faktor Penyebab Keragaman Sosial Budaya.....	12
D. Keragaman dan Identitas Nasional .....	17
E. Daftar Pustaka.....	20
<b>BAB II NILAI-NILAI BUDAYA .....</b>	<b>22</b>
A. Pengantar Umum.....	22
B. Pengertian Nilai Budaya.....	25
C. Fungsi Nilai Budaya dalam Masyarakat.....	28
D. Nilai-Nilai Budaya Luhur Bangsa Indonesia .....	31
E. Daftar Pustaka .....	36
<b>BAB III LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL .....</b>	<b>37</b>
A. Pengantar Umum .....	37
B. Pengertian Lembaga Sosial .....	40
C. Ciri-Ciri Lembaga Sosial.....	44
D. Peran Lembaga Sosial dalam Masyarakat Multikultural .....	48
E. Daftar Pustaka .....	52

BAB IV SISTEM KEKERABATAN DAN KEMASYARAKATAN .....	54
A. Pengantar Umum .....	54
B. Pengertian Sistem Keakerabatan .....	58
C. Bentuk Sistem Keakerabatan di Indonesia .....	63
D. Transformasi Sistem Keakerabatan dan Kemasyarakatan .....	68
E. Daftar Pustaka .....	73
BAB V SISTEM RELIGI .....	74
A. Pengantar Umum .....	74
B. Pengertian Sistem Religi .....	78
C. Ragam Sistem Religi di Indonesia .....	83
D. Lembaga Keagamaan dan Perannya .....	87
E. Daftar Pustaka .....	92
BAB VI KESENIAN DAN TRADISI .....	93
A. Pengantar Umum .....	93
B. Pengertian Kesenian dan Tradisi .....	97
C. Ragam Bentuk Kesenian Tradisional di Indonesia .....	102
D. Peran Kesenian dan Tradisi dalam Sistem Sosial .....	107
E. Daftar Pustaka .....	113
BAB VII BAHASA DAN KOMUNIKASI .....	114
A. Pengantar Umum .....	114
B. Pengertian Bahasa dan Komunikasi .....	117
C. Bahasa dan Identitas Budaya .....	121

D.	Bahasa dalam Proses Sosialisasi dan Pendidikan .....	125
E.	Daftar Pustaka .....	130
BAB VIII PENDIDIKAN DAN EKONOMI .....		131
A.	Pengantar Umum .....	131
B.	Pendidikan sebagai Sistem Sosial Budaya .....	136
C.	Ekonomi sebagai Sistem Sosial Budaya .....	140
D.	Ketimpangan Sosial dalam Pendidikan dan Ekonomi .....	144
E.	Daftar Pustaka .....	149
BAB IX POLITIK, HUKUM, DAN GLOBALISASI .....		151
A.	Pengantar Umum .....	151
B.	Sistem Politik sebagai Cermin Budaya .....	155
C.	Sistem Hukum dalam Perspektif Sosial Budaya .....	160
D.	Hukum dan Tantangan Globalisasi .....	164
E.	Daftar Pustaka .....	169

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga buku monograf ini yang berjudul *SISTEM SOSIAL BUDAYA INDONESIA* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya memperkaya khasanah literatur dalam bidang ilmu sosial, khususnya mata kuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia yang diajarkan di perguruan tinggi.

Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia sangatlah beragam, dinamis, dan sarat makna. Kompleksitas ini menuntut pemahaman yang lebih mendalam dan sistematis agar mahasiswa tidak hanya mengenal, tetapi juga mampu mengkritisi dan merefleksikan dinamika sosial budaya yang ada di sekelilingnya. Melalui buku ini, penulis berusaha menyajikan analisis ilmiah yang disertai konteks kekinian tanpa melepaskan akar-akar budaya lokal bangsa.

Buku ini terdiri atas sembilan bab yang secara bertahap mengupas elemen-elemen penting dalam sistem sosial budaya Indonesia. Bab I membuka dengan pengantar konseptual tentang pengertian sistem sosial budaya. Bab II membahas keberagaman dan struktur sosial masyarakat Indonesia. Bab III menyoroti aspek keluarga dan kekerabatan sebagai pilar dasar kehidupan sosial. Bab IV menguraikan nilai, norma, dan pranata sosial yang menopang keteraturan dalam masyarakat.

Selanjutnya, Bab V menyajikan pembahasan tentang sistem religi yang mencerminkan dimensi spiritualitas dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Bab VI menelaah seni dan

budaya dalam kerangka ekspresi sosial. Bab VII membahas bahasa dan komunikasi sebagai alat interaksi dan pewarisan budaya. Bab VIII menyuguhkan dinamika pendidikan dan ekonomi sebagai penopang perubahan sosial, dengan penekanan pada persoalan ketimpangan sosial. Terakhir, Bab IX mengangkat tema politik, hukum, dan globalisasi, termasuk tantangan kontemporer yang dihadapi bangsa Indonesia dalam percaturan dunia modern.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan edisi selanjutnya. Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik moril maupun akademik, dalam proses penyusunan buku ini. Khususnya kepada rekan sejawat, mahasiswa, dan institusi tempat kami mengabdikan yang telah menjadi sumber inspirasi dan semangat dalam menulis.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, dan pembaca umum yang ingin memahami dan mendalami sistem sosial budaya Indonesia secara komprehensif dan kritis. Semoga pula buku ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam merawat keberagaman, memperkuat identitas nasional, serta membangun masyarakat Indonesia yang inklusif dan berkeadaban.

Makassar, Mei 2025

**Penulis**

*Irwan & Jumaisa*



# **BAB I**

## **KERAGAMAN SISTEM SOSIAL BUDAYA**

### **A. Pengantar Umum**

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki tingkat keragaman sosial budaya yang sangat tinggi. Keragaman ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bahasa, adat istiadat, agama, nilai, norma, sistem kekerabatan, hingga kesenian dan teknologi lokal. Keragaman tersebut tidak hanya menjadi ciri khas bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan kekayaan sosial budaya yang menjadi fondasi dalam pembentukan identitas nasional.

Secara konseptual, sistem sosial budaya adalah keseluruhan tata kehidupan masyarakat yang terdiri dari nilai-nilai, norma, institusi, serta pola perilaku yang berkembang dan diwariskan secara turun temurun. Sistem ini mencerminkan bagaimana masyarakat mengorganisasi kehidupannya, menyelesaikan masalah, serta berinteraksi dalam konteks sosial yang lebih luas (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, keragaman sistem sosial budaya bukan hanya suatu kondisi nyata, tetapi juga suatu tantangan. Keragaman ini menciptakan dinamika dalam hubungan antarkelompok, baik dalam bentuk integrasi maupun potensi konflik sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami keragaman ini secara mendalam agar dapat dikembangkan menjadi modal sosial untuk

membangun kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Keragaman tersebut tumbuh dari berbagai faktor, antara lain:

- Faktor geografis yang menyebabkan perbedaan pola hidup antar daerah.
- Faktor historis seperti pengaruh kerajaan, kolonialisme, dan migrasi.
- Faktor ekologis yang mempengaruhi mata pencaharian dan organisasi sosial.
- Faktor religius dan kepercayaan lokal yang membentuk sistem nilai dan norma sosial.

Menurut Geertz (1973), budaya merupakan sistem simbolik yang mengandung makna yang dipahami dan dianut bersama oleh sekelompok masyarakat. Oleh sebab itu, keragaman budaya mencerminkan perbedaan sistem simbolik dalam melihat dan memaknai kehidupan.

Penting untuk dicatat bahwa sistem sosial budaya bersifat dinamis. Ia berkembang seiring dengan perubahan zaman, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi. Di satu sisi, globalisasi mempermudah interaksi antarkelompok budaya, namun di sisi lain juga dapat menggerus nilai-nilai lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, pemahaman terhadap keragaman sistem sosial budaya harus disertai dengan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya dan penguatan identitas nasional.

Dalam konteks pembangunan nasional, keragaman budaya Indonesia justru menjadi potensi besar. Apabila dikelola dengan baik, keragaman ini

akan menjadi kekuatan yang dapat mendorong integrasi nasional, kreativitas sosial, serta pengembangan masyarakat yang inklusif dan toleran. Keragaman sistem sosial budaya Indonesia merupakan produk dari sejarah panjang interaksi antaretnis, pengaruh geografis yang luas, serta dinamika internal masyarakat lokal. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis, dengan beragam bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat heterogenitas budaya tertinggi di dunia. Keberagaman tersebut merupakan hasil dari proses adaptasi masyarakat terhadap lingkungan alam dan sosial yang berbeda-beda di tiap daerah. Sistem sosial budaya pada dasarnya terdiri atas elemen-elemen penting seperti nilai (values), norma, pranata sosial (lembaga sosial), status dan peran sosial, serta pola interaksi yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Indonesia, nilai gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan merupakan contoh nilai yang berkembang luas dan membentuk karakter kolektif masyarakat. Namun, bentuk dan ekspresi dari nilai-nilai ini bisa sangat berbeda antara masyarakat Jawa, Bugis, Minangkabau, Dayak, atau Papua.

Selain nilai dan norma, pranata sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi juga mengalami variasi dalam pelaksanaannya. Sistem kekerabatan, misalnya, bisa bersifat patrilineal seperti di masyarakat Batak, matrilineal seperti di Minangkabau, atau bilateral seperti di sebagian besar

masyarakat Jawa. Pranata agama juga menunjukkan keunikan tersendiri, seperti tradisi Islam Nusantara, Kristen adat di Papua, atau sinkretisme antara agama Hindu dan kepercayaan lokal di Bali dan Nusa Tenggara.

Keragaman sistem sosial budaya juga tampak dalam praktik ekonomi tradisional. Di beberapa daerah, sistem barter masih dipraktikkan, sementara di daerah lain masyarakat telah mengenal sistem pertanian berbasis teknologi. Selain itu, struktur sosial ekonomi pun berbeda, mulai dari masyarakat subsisten hingga masyarakat urban modern. Semua bentuk ini menjadi bagian dari sistem sosial budaya yang membentuk tatanan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Keragaman ini tidak lepas dari pengaruh geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Faktor geografis menyebabkan terjadinya isolasi kultural di berbagai wilayah, yang membuat tiap kelompok masyarakat mengembangkan sistem sosial budayanya sendiri. Sementara itu, daerah-daerah pesisir dan pelabuhan menjadi titik masuk pengaruh luar yang menciptakan akulturasi budaya, seperti pengaruh India, Cina, Arab, Eropa, dan lain sebagainya.

Proses akulturasi dan asimilasi tersebut telah memperkaya sistem sosial budaya bangsa Indonesia. Misalnya, dalam bidang kesenian, seni musik tradisional gamelan memiliki variasi yang dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Islam. Dalam sistem kepercayaan, muncul tradisi seperti slametan,

selamatan, atau ritual adat yang merupakan perpaduan antara ajaran agama dan praktik animisme-dinamisme. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya Indonesia tidak statis, melainkan sangat adaptif dan dinamis.

Namun, keragaman sistem sosial budaya juga membawa tantangan, terutama dalam konteks integrasi nasional dan pembangunan. Ketimpangan ekonomi, konflik identitas, dan diskriminasi kultural sering muncul akibat kurangnya pemahaman antarbudaya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan semangat multikulturalisme, yakni pengakuan dan penghargaan terhadap perbedaan budaya tanpa mengesampingkan kesatuan nasional.

Globalisasi juga menjadi faktor penting yang memengaruhi sistem sosial budaya Indonesia saat ini. Masuknya budaya global melalui media massa, teknologi informasi, dan industri hiburan telah menciptakan transformasi nilai dan gaya hidup, khususnya di kalangan generasi muda. Meski demikian, globalisasi tidak selalu berarti homogenisasi. Di banyak daerah, terjadi hibridisasi budaya—yakni pencampuran unsur lokal dan global—yang melahirkan identitas budaya baru.

Dalam kerangka pembangunan nasional, pengakuan terhadap keragaman sosial budaya merupakan hal yang fundamental. Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai dasar ideologis untuk menjaga persatuan dalam keberagaman. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai kebijakan otonomi daerah menjadi

landasan untuk memberdayakan budaya lokal sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis masyarakat.

Sebagai penutup dari pengantar umum ini, dapat ditegaskan bahwa keragaman sistem sosial budaya bukan sekadar kekayaan simbolik, melainkan modal sosial yang konkret dalam membangun masyarakat Indonesia yang inklusif, berkeadaban, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pemahaman, pelestarian, dan pengembangan sistem sosial budaya yang beragam menjadi tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan dunia pendidikan.

## **B. Pengertian Sistem Sosial Budaya**

Sistem sosial budaya merupakan konsep fundamental dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang mengacu pada tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat yang terbentuk dari interaksi antara aspek sosial dan budaya. Secara umum, sistem sosial mencakup hubungan antarindividu dan kelompok dalam masyarakat, yang diatur oleh norma, nilai, dan pranata sosial. Sedangkan sistem budaya mengacu pada keseluruhan pola pikir, keyakinan, bahasa, adat istiadat, simbol, serta ekspresi kreatif masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun (Koentjaraningrat, 2009). Kombinasi keduanya menghasilkan struktur yang kompleks yang menjadi dasar dalam memahami dinamika kehidupan masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (2009), sistem sosial budaya terdiri dari tujuh unsur universal kebudayaan yang mencakup: (1) sistem religi dan kepercayaan, (2) sistem organisasi sosial, (3) sistem pengetahuan, (4)

bahasa, (5) kesenian, (6) sistem mata pencaharian, dan (7) sistem teknologi dan peralatan hidup. Unsur-unsur ini saling berkaitan dan membentuk suatu kesatuan fungsional dalam kehidupan masyarakat. Di dalamnya terdapat norma dan nilai sosial yang berperan mengatur perilaku anggota masyarakat agar terjadi keteraturan sosial.

Dalam perspektif sosiologi, sistem sosial budaya juga mencerminkan mekanisme sosial yang memungkinkan masyarakat hidup bersama secara tertib. Talcott Parsons (1951) menyebut sistem sosial sebagai kumpulan dari tindakan sosial yang saling berinteraksi dalam struktur tertentu, sedangkan sistem budaya memberikan makna pada tindakan tersebut melalui nilai dan simbol yang dianut bersama. Dengan kata lain, budaya memberikan “isi” bagi struktur sosial, dan keduanya berjalan bersamaan dalam membentuk kehidupan sosial yang utuh.

Keragaman sistem sosial budaya yang ada di Indonesia, misalnya, menunjukkan bagaimana perbedaan nilai, norma, dan pola hubungan sosial dalam setiap komunitas atau etnis menciptakan sistem tersendiri yang khas. Masyarakat adat di Papua, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, atau masyarakat Bali di Indonesia tengah, memiliki cara hidup yang berbeda namun tetap dapat dipahami dalam kerangka sistem sosial budaya. Oleh karena itu, memahami sistem ini penting untuk membaca dinamika sosial, menjaga kohesi sosial, serta merumuskan kebijakan sosial yang sensitif terhadap budaya lokal.

Sistem sosial budaya tidak bersifat statis, tetapi dinamis dan terus mengalami perubahan. Faktor internal seperti inovasi sosial dan perubahan nilai generasi muda, serta faktor eksternal seperti globalisasi, teknologi, dan migrasi, menjadi pemicu terjadinya transformasi sistem sosial budaya. Pemahaman terhadap konsep ini menjadi krusial dalam konteks pembangunan sosial, pendidikan, dan penguatan identitas nasional yang berbasis pada keberagaman dan inklusivitas budaya.

Sistem sosial budaya merupakan suatu konstruksi yang tidak hanya memengaruhi interaksi antarindividu dalam masyarakat, tetapi juga memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas kelompok sosial. Sebagai bagian dari sistem sosial, budaya tidak hanya menjadi cara masyarakat berkomunikasi atau mengekspresikan diri, tetapi juga memberikan pedoman dalam cara mereka menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sistem sosial budaya mencakup pola-pola perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat, serta nilai-nilai yang mendasari perilaku tersebut, yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan sosial.

Dalam konteks sistem sosial, masyarakat dibangun oleh hubungan antarindividu dan kelompok yang memiliki pola-pola interaksi tertentu, yang diatur oleh berbagai pranata sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama. Setiap pranata ini memainkan peran untuk memastikan stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat. Sistem sosial ini dapat berubah seiring dengan dinamika kehidupan

sosial, baik karena faktor internal, seperti perubahan norma sosial, atau karena faktor eksternal, seperti pengaruh teknologi dan globalisasi yang memperkenalkan cara hidup baru.

Di sisi lain, sistem budaya lebih mengacu pada pengetahuan bersama yang mencakup bahasa, agama, kesenian, dan adat istiadat yang mendasari kehidupan sosial. Seiring dengan perjalanan waktu, budaya juga dapat berkembang dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sebagai contoh, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, meskipun beragam, tetap saling terkait melalui bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Di banyak daerah, bahasa daerah menjadi simbol identitas yang kuat, namun pada saat yang sama, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menghubungkan berbagai kelompok etnis di seluruh Indonesia.

Keberagaman sistem sosial budaya di Indonesia mencerminkan kompleksitas hubungan antar kelompok masyarakat yang berbeda. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang masih sangat kuat mempertahankan tradisi dan adat istiadat lokal, seperti di wilayah pedesaan atau daerah terpencil. Di sisi lain, kelompok masyarakat urban lebih terbuka terhadap modernisasi dan globalisasi, yang mempengaruhi pola pikir, gaya hidup, serta cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Hal ini menciptakan kontradiksi yang menarik antara pelestarian tradisi dan penerimaan terhadap perubahan sosial yang terus berlangsung.

Sistem sosial budaya juga memiliki dimensi yang bersifat multidimensional. Artinya, ia tidak hanya

berbicara tentang struktur sosial dan kebudayaan saja, tetapi juga menyangkut ekonomi, politik, dan institusi-institusi sosial lainnya yang saling berhubungan. Sebagai contoh, nilai-nilai budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi pola distribusi kekayaan, kesempatan pendidikan, serta akses terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, memahami sistem sosial budaya juga melibatkan analisis terhadap ketidaksetaraan sosial, eksklusivitas budaya, serta dinamika kekuasaan yang ada dalam masyarakat.

Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk, pengelolaan keberagaman sosial budaya sangat penting untuk menjaga keharmonisan antar kelompok. Budaya menjadi alat untuk membangun rasa saling pengertian dan toleransi antara kelompok yang berbeda. Dalam praktiknya, sistem sosial budaya sering kali dilihat sebagai sesuatu yang melampaui sekadar perbedaan fisik, seperti bahasa atau pakaian, namun mencakup cara-cara orang berinteraksi, berkomunikasi, serta memaknai realitas sosial mereka. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang di mana keragaman ini dihargai dan diterima dengan baik.

Selain itu, sistem sosial budaya juga mencakup faktor-faktor penghubung yang menyatukan masyarakat, seperti nilai-nilai dasar yang berlaku secara universal, seperti keadilan, kebebasan, dan persaudaraan. Walaupun budaya dapat bervariasi di setiap daerah, prinsip-prinsip dasar ini dapat menjadi titik temu bagi masyarakat yang berbeda latar belakang budaya. Hal ini sangat penting untuk membangun

semangat kebersamaan dan gotong royong dalam rangka mewujudkan kehidupan sosial yang harmonis.

Sistem sosial budaya berfungsi sebagai pemandu bagi anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai gotong royong yang menjadi bagian dari budaya Indonesia mengajarkan pentingnya kerja sama dan saling membantu antar individu. Begitu pula dalam hal agama, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan mereka, baik itu dalam urusan sosial, ekonomi, pendidikan, maupun politik. Oleh karena itu, sistem sosial budaya tidak hanya menciptakan kedamaian dan keharmonisan, tetapi juga menjadi kekuatan yang mendorong proses perubahan sosial.

Keragaman sosial budaya di Indonesia dapat menimbulkan tantangan bagi pembuat kebijakan, terutama dalam hal merumuskan kebijakan sosial yang inklusif. Dalam beberapa kasus, keberagaman ini dapat menimbulkan ketegangan dan perbedaan pandangan mengenai hak-hak kelompok tertentu. Misalnya, ketika kelompok masyarakat tertentu merasa bahwa hak-hak budaya mereka terancam oleh dominasi budaya luar atau oleh kebijakan pembangunan yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang sensitif terhadap perbedaan dan mendorong dialog antarbudaya agar tercipta rasa saling menghargai.

Selain itu, dalam menghadapi globalisasi, sistem sosial budaya di Indonesia harus mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitas kultural yang

sudah berkembang selama berabad-abad. Globalisasi sering kali membawa budaya luar yang mengubah cara hidup masyarakat, tetapi di sisi lain juga membuka peluang untuk pertukaran budaya yang lebih kaya. Dengan memanfaatkan peluang ini, Indonesia bisa memperkaya sistem sosial budaya lokalnya, sambil tetap mempertahankan akar budaya yang sudah ada.

Dalam kesimpulannya, pengertian sistem sosial budaya bukanlah konsep yang sederhana, melainkan suatu sistem yang melibatkan berbagai elemen sosial dan budaya yang berinteraksi secara kompleks. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang sistem sosial budaya sangat penting untuk menganalisis perubahan sosial, hubungan antarbudaya, serta perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Sistem ini terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, dan oleh karena itu, perlu ada usaha untuk menjaga keberagaman budaya serta merespons tantangan-tantangan sosial yang muncul.

### **C. Faktor Penyebab Keragaman Sosial Budaya**

Keragaman sosial budaya merupakan ciri khas masyarakat Indonesia yang terbentuk dari interaksi antara berbagai faktor, baik faktor historis, geografis, maupun sosial ekonomi. Masyarakat Indonesia yang terdiri dari lebih dari 300 suku bangsa, dengan beragam bahasa, adat istiadat, agama, dan pola kehidupan, menunjukkan betapa kompleksnya faktor penyebab keragaman sosial budaya. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan

hasil dari kombinasi berbagai elemen yang saling berinteraksi sepanjang waktu.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan keragaman sosial budaya adalah sejarah migrasi dan kolonisasi. Sejak zaman prasejarah hingga masa kolonialisme, kelompok-kelompok manusia telah berpindah tempat atau bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain, membawa budaya dan tradisi mereka. Misalnya, migrasi bangsa Austronesia ke Indonesia ribuan tahun yang lalu membawa bahasa dan pola hidup yang berbeda-beda. Begitu pula dengan kedatangan bangsa Eropa, seperti Portugis dan Belanda, yang mengubah banyak aspek kehidupan sosial budaya Indonesia, baik dalam bentuk bahasa, agama, maupun sistem pemerintahan.

Selain faktor migrasi, letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau juga menjadi penyebab utama keragaman sosial budaya. Keberagaman ini dapat dilihat dari perbedaan pola hidup yang berkembang di setiap daerah, yang sangat dipengaruhi oleh kondisi alam setempat. Daerah pesisir, misalnya, cenderung mengembangkan budaya yang berhubungan dengan perikanan dan perdagangan, sementara masyarakat yang tinggal di pegunungan lebih mengandalkan pertanian dan kehutanan. Keanekaragaman hasil alam ini turut membentuk cara hidup dan pola pikir masyarakat di berbagai daerah. Sistem sosial dan struktur masyarakat juga turut memengaruhi keragaman sosial budaya. Dalam banyak masyarakat tradisional di Indonesia, setiap kelompok atau suku memiliki sistem sosial yang unik, yang

diatur oleh adat istiadat dan hukum yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Misalnya, masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui pihak ibu, sementara masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, di mana keturunan mengikuti garis ayah. Perbedaan sistem ini menghasilkan pola hubungan sosial yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari.

Agama juga berperan besar dalam menciptakan keragaman sosial budaya. Indonesia dikenal dengan keragaman agama yang dianut oleh warganya, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga kepercayaan tradisional. Agama memberikan panduan moral, etika, dan aturan hidup yang sangat memengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial antarindividu. Perbedaan agama ini dapat membentuk keragaman dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perayaan keagamaan, upacara adat, serta praktik ibadah dan doa.

Pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keragaman sosial budaya. Sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang telah terpengaruh oleh berbagai kebijakan pemerintah serta nilai-nilai budaya lokal, membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia. Pendidikan memberikan akses bagi individu untuk memperoleh pengetahuan, serta mengembangkan keterampilan dan sikap yang berbeda-beda tergantung pada latar belakang budaya dan sosial mereka. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan yang berbeda cenderung memiliki

perspektif yang berbeda pula terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Perubahan sosial akibat perkembangan zaman, terutama dengan adanya teknologi dan globalisasi, turut mempercepat proses pertemuan budaya yang berbeda. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi pola pikir masyarakat, tetapi juga cara mereka berinteraksi dengan dunia luar. Kemajuan teknologi, seperti internet dan media sosial, memungkinkan pertukaran budaya yang lebih cepat dan luas, yang pada gilirannya dapat memperkenalkan budaya baru ke masyarakat Indonesia. Di satu sisi, ini meningkatkan keragaman budaya, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan terhadap pelestarian budaya lokal.

Ekonomi adalah faktor lainnya yang memengaruhi keragaman sosial budaya. Perbedaan dalam tingkat kemakmuran dan akses terhadap sumber daya ekonomi menciptakan variasi dalam pola hidup masyarakat. Masyarakat perkotaan yang memiliki akses lebih besar terhadap pekerjaan modern dan teknologi cenderung memiliki cara hidup yang lebih seragam, sementara masyarakat pedesaan atau yang tinggal di daerah terpencil cenderung mempertahankan tradisi mereka yang lebih lokal dan terikat pada sistem ekonomi tradisional, seperti pertanian dan kerajinan tangan.

Perbedaan dalam status sosial dan kelas ekonomi juga memperkaya keragaman sosial budaya. Masyarakat Indonesia memiliki struktur sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan budaya.

Perbedaan kelas ini menghasilkan stratifikasi sosial yang memengaruhi hubungan antarindividu dalam masyarakat. Misalnya, kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kekayaan lebih banyak cenderung memiliki akses yang lebih besar terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan hidup yang lebih baik, sementara kelompok masyarakat yang miskin atau terpinggirkan mengalami kesulitan dalam memperoleh akses tersebut.

Akhirnya, pengaruh globalisasi menjadi faktor penyebab penting dalam terciptanya keragaman sosial budaya yang terus berkembang. Globalisasi tidak hanya membawa budaya luar ke Indonesia, tetapi juga mengubah cara hidup masyarakat Indonesia dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Sementara budaya global, seperti musik pop, film Hollywood, dan teknologi digital, menjadi sangat populer, budaya lokal juga mendapat tantangan untuk bertahan dan beradaptasi. Meskipun demikian, globalisasi juga memberikan kesempatan bagi budaya lokal untuk dikenal di dunia internasional, sehingga menciptakan dialog antarbudaya yang memperkaya pengalaman budaya masyarakat Indonesia.

Secara keseluruhan, keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi satu sama lain. Masing-masing faktor ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakteristik budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dengan memahami faktor-faktor penyebab keragaman sosial budaya ini, kita dapat lebih

menghargai keberagaman yang ada dan memahami pentingnya menjaga keharmonisan antar kelompok sosial budaya dalam masyarakat Indonesia.

#### **D. Keragaman dan Identitas Nasional**

Keragaman sosial budaya merupakan realitas yang melekat pada bangsa Indonesia sejak awal pembentukannya. Dengan lebih dari 17.000 pulau, 1.340 suku bangsa, dan ratusan bahasa daerah, Indonesia menjelma menjadi salah satu negara dengan tingkat pluralitas budaya tertinggi di dunia (Koentjaraningrat, 2009). Keberagaman ini menjadi sumber kekayaan bangsa sekaligus tantangan dalam membentuk dan mempertahankan identitas nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Identitas nasional adalah konsep yang mengacu pada rasa kebersamaan dan kesatuan yang dimiliki oleh warga suatu bangsa, terlepas dari latar belakang etnis, budaya, agama, atau bahasa mereka. Identitas nasional Indonesia terbentuk melalui proses sejarah panjang, mulai dari masa kerajaan-kerajaan Nusantara, kolonialisme, pergerakan kemerdekaan, hingga masa reformasi. Dalam proses ini, nilai-nilai seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945 menjadi pilar yang menyatukan keragaman (Soedjati Djiwandono, 1994).

Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam menyatukan identitas nasional di tengah keragaman. Lima sila dalam Pancasila mengakomodasi nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat Indonesia.

Sila pertama, misalnya, mencerminkan pengakuan atas keberadaan berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia. Sila ketiga, "Persatuan Indonesia", menekankan pentingnya membangun rasa kebangsaan di atas kepentingan kelompok atau etnis tertentu (Kaelan, 2000).

Konsep *Bhinneka Tunggal Ika*, yang berarti "Berbeda-beda tetapi tetap satu", merupakan cerminan nyata dari semangat menyatukan keberagaman ke dalam satu identitas nasional. Semboyan ini diambil dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular pada abad ke-14 dan menjadi prinsip penting dalam menjawab tantangan keberagaman. Menurut Geertz (1973), identitas nasional tidak dapat dibangun dengan meniadakan perbedaan, melainkan melalui pengakuan dan pengelolaan perbedaan secara inklusif.

Dalam praktiknya, keragaman dapat menjadi sumber konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Konflik horizontal yang pernah terjadi di Indonesia, seperti di Ambon dan Poso, menjadi bukti bahwa ketidaktahanan dalam manajemen keberagaman dapat mengancam identitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan identitas nasional harus melibatkan upaya pendidikan multikultural dan penguatan nilai-nilai toleransi antarbudaya (Suryadinata, 2002).

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional di tengah keragaman budaya. Melalui kurikulum yang mengedepankan wawasan kebangsaan, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural mendorong generasi muda untuk melihat

keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman. Banks (2004) menyatakan bahwa pendidikan multikultural yang efektif harus mengintegrasikan pengalaman budaya semua kelompok etnis ke dalam materi pembelajaran.

Media massa dan teknologi komunikasi juga menjadi sarana strategis dalam memperkuat identitas nasional. Di era digital saat ini, informasi dan budaya asing dapat dengan mudah masuk dan memengaruhi generasi muda. Di sisi lain, media juga dapat digunakan untuk memperkuat kesadaran nasional melalui narasi kebangsaan dan penggambaran positif tentang keragaman. Jenkins (2008) menekankan pentingnya narasi kolektif dalam memperkuat identitas sosial dalam komunitas modern.

Peran negara sangat penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung integrasi nasional. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kelompok etnis dan budaya memiliki ruang untuk mengekspresikan identitas mereka tanpa merasa terpinggirkan. Desentralisasi dan otonomi daerah, yang diterapkan sejak era reformasi, menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap keragaman lokal yang tetap berada dalam kerangka negara kesatuan (Smith, 2001).

Namun, membangun identitas nasional tidak cukup hanya dengan simbol dan kebijakan. Diperlukan komitmen kolektif dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kesatuan dan menghormati perbedaan. Sikap saling menghargai, empati antarbudaya, serta kesadaran akan sejarah dan perjuangan bangsa menjadi

fondasi penting dalam memperkuat identitas nasional Indonesia.

Kesimpulannya, keragaman bukanlah penghalang, melainkan fondasi dalam membangun identitas nasional. Identitas nasional Indonesia adalah hasil dari rekonsiliasi dan sinergi berbagai unsur budaya lokal yang diikat oleh nilai-nilai bersama. Dalam konteks ini, menjaga dan merawat keragaman sama pentingnya dengan memperkuat semangat kebangsaan, karena keduanya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keessing, R.M. (1981). *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Haviland, W.A. (2005). *Antropologi Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Parsudi Suparlan. (2002). *Menuju Masyarakat Madani: Masyarakat Multikultural Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sibarani, R. (2015). *Kearifan Lokal: Hakikat, Peran, dan Metode Tradisional*. Yogyakarta: Ombak.
- Liliweri, A. (2007). *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. New York: Free Press.
- Haviland, W. A. (2005). *Antropologi Budaya*. Jakarta: Erlangga.
- Sztompka, P. (2007). *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media.
- Keesing, R. M. (1981). *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Soedjati Djiwandono. (1994). *Indonesia's Foreign Policy: A Political Perspective*. Jakarta: CSIS.
- Suryadinata, L. (2002). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Singapore: ISEAS.

## **BAB II**

### **NILAI-NILAI BUDAYA**

#### **A. Pengantar Umum**

Nilai-nilai budaya merupakan elemen penting dalam sistem sosial budaya yang membentuk cara berpikir, merasa, dan bertindak suatu masyarakat. Nilai budaya mencerminkan prinsip-prinsip ideal yang dijunjung tinggi oleh sekelompok orang dan menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Koentjaraningrat (2009) menyebut nilai budaya sebagai konsep-konsep abstrak dalam pikiran manusia mengenai hal-hal yang dianggap baik dan penting dalam kehidupan.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, nilai-nilai budaya bersumber dari beragam tradisi lokal, agama, adat istiadat, serta interaksi sejarah yang kompleks. Oleh karena itu, nilai-nilai budaya Indonesia sangat beragam dan mencerminkan pluralitas masyarakat Nusantara. Geertz (1973) menegaskan bahwa nilai-nilai budaya terbentuk dari pengalaman kolektif suatu masyarakat dalam merespon lingkungan sosial, ekonomi, dan politiknya.

Nilai-nilai budaya tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan berkembang seiring waktu. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, kekeluargaan, dan saling menghormati telah lama menjadi landasan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Namun, dalam era globalisasi, nilai-nilai ini mengalami tantangan karena munculnya nilai-nilai

baru dari luar yang belum tentu sejalan dengan kearifan lokal (Sutrisno & Putranto, 2005).

Salah satu ciri khas nilai budaya Indonesia adalah kolektivisme, yaitu orientasi terhadap kelompok dibandingkan individu. Dalam budaya kolektif, keharmonisan kelompok lebih diutamakan dibandingkan pencapaian pribadi. Hofstede (2001) menggolongkan Indonesia sebagai negara dengan indeks kolektivisme yang tinggi, yang tercermin dalam budaya gotong royong, kekeluargaan, dan semangat kebersamaan.

Nilai religius juga menjadi aspek penting dalam nilai-nilai budaya Indonesia. Sebagai negara dengan masyarakat yang religius, hampir semua tindakan sosial masyarakat dipengaruhi oleh ajaran agama. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati tidak hanya bersumber dari norma sosial tetapi juga dari keyakinan spiritual. Menurut Rahardjo (1999), nilai-nilai keagamaan telah menjadi fondasi utama dalam membentuk etika sosial di Indonesia.

Nilai-nilai budaya juga terlihat dalam relasi sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Misalnya, penghormatan terhadap orang tua, pemimpin adat, dan tokoh masyarakat adalah bentuk nilai hierarki yang masih dijaga dalam banyak komunitas lokal. Hierarki ini bukan dalam bentuk otoriter, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap pengalaman dan kebijaksanaan orang yang lebih tua (Koentjaraningrat, 2002).

Selain itu, nilai-nilai budaya juga tampak dalam ekspresi seni, bahasa, dan simbol-simbol lokal

yang kaya makna. Misalnya, motif batik, lagu daerah, atau arsitektur rumah adat tidak hanya menampilkan keindahan estetika tetapi juga mencerminkan nilai filosofis seperti keselarasan dengan alam, spiritualitas, dan keseimbangan hidup (Nas, 2009).

Dalam sistem pendidikan formal dan nonformal, nilai-nilai budaya seharusnya diintegrasikan untuk memperkuat identitas nasional. Pendidikan yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya akan menghasilkan generasi yang tercerabut dari akar budayanya. Sebagaimana dijelaskan oleh Tilaar (2004), pendidikan yang berorientasi budaya akan membentuk karakter bangsa yang kuat dan berintegritas.

Perubahan sosial yang cepat akibat modernisasi dan globalisasi seringkali menimbulkan benturan nilai antara tradisional dan modern. Konflik nilai ini bisa memunculkan kebingungan identitas, terutama di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat nilai-nilai budaya lokal sebagai filter terhadap nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa (Haryatmoko, 2007).

Kesimpulannya, nilai-nilai budaya adalah landasan moral dan etis yang mengarahkan perilaku sosial masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, nilai-nilai ini harus dijaga, diwariskan, dan dikembangkan agar tetap relevan dengan dinamika zaman. Melalui pendidikan, media, dan kebijakan budaya yang berpihak pada kearifan lokal, nilai-nilai

budaya dapat menjadi kekuatan integratif yang memperkuat sistem sosial budaya Indonesia.

## **B. Pengertian Nilai Budaya**

Nilai-nilai budaya merupakan unsur penting dalam kehidupan sosial yang berfungsi sebagai pedoman bagi anggota masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi. Nilai budaya dapat didefinisikan sebagai konsep-konsep abstrak yang hidup dalam benak sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang dianggap baik, benar, penting, dan diidamkan (Koentjaraningrat, 2002). Nilai-nilai ini menjadi acuan dalam menjalani kehidupan bersama dan membentuk pola pikir kolektif suatu masyarakat.

Nilai-nilai budaya tidak bersifat individual, melainkan bersifat kolektif dan diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Dalam hal ini, nilai-nilai budaya menjadi sistem yang mengatur cara individu berperilaku sesuai dengan norma dan harapan sosial yang berlaku. Menurut Parsons dan Shils (1951), nilai merupakan standar atau kriteria umum yang dipakai untuk menilai tindakan sebagai baik atau buruk, benar atau salah dalam suatu sistem sosial.

Lebih lanjut, nilai budaya memiliki kekuatan untuk menginternalisasi perilaku sehingga seseorang merasa terikat secara moral untuk mematuhi. Nilai budaya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memuat makna simbolik dan emosional yang kuat. Hal ini diperkuat oleh Kluckhohn (1951) yang menjelaskan bahwa nilai adalah konsepsi umum yang bersifat

eksplisit atau implisit, yang khas bagi individu atau kelompok, mengenai hal-hal yang diinginkan dan memengaruhi pilihan di antara berbagai modus tindakan.

Dalam masyarakat Indonesia, nilai-nilai budaya memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial. Nilai seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kekeluargaan merupakan contoh nyata nilai budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mencerminkan cara hidup, tetapi juga memperkuat identitas sosial masyarakat Indonesia (Koentjaraningrat, 2009).

Nilai budaya juga berfungsi sebagai alat pengendalian sosial. Ia memberikan batas-batas yang tidak tertulis terhadap perilaku manusia agar tetap sesuai dengan tatanan sosial yang diinginkan. Durkheim (1982) menyebutkan bahwa nilai-nilai dalam masyarakat berperan sebagai kesadaran kolektif yang menjaga keteraturan sosial. Dalam konteks ini, nilai-nilai budaya bukan hanya pedoman etis, tetapi juga fondasi struktur sosial.

Nilai-nilai budaya dapat bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Hal ini dipengaruhi oleh faktor sejarah, lingkungan, sistem kepercayaan, serta interaksi sosial yang berkembang di masyarakat tersebut. Menurut Spradley dan McCurdy (1975), nilai budaya adalah bagian dari sistem budaya yang bersifat universal, namun manifestasinya sangat kontekstual dan khas dalam tiap komunitas.

Selain menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, nilai budaya juga berfungsi sebagai perekat dalam menjaga integrasi sosial. Ketika nilai-nilai budaya yang sama dihayati oleh mayoritas anggota masyarakat, maka akan tercipta rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Ini penting dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, di mana nilai-nilai budaya dapat berperan sebagai alat pemersatu di tengah keragaman (Tilaar, 2004).

Namun demikian, nilai-nilai budaya juga mengalami perubahan seiring waktu. Proses globalisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah mendorong munculnya nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan nilai tradisional. Menurut Haryatmoko (2007), perubahan nilai budaya tidak dapat dihindari, namun penting untuk dilakukan dengan selektif agar tidak menghilangkan akar budaya lokal.

Pengertian nilai-nilai budaya juga mencakup dimensi ideologis yang membentuk pandangan hidup masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, nilai-nilai ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga normatif dan preskriptif. Mereka mengandung tuntunan moral yang mengarahkan masyarakat menuju cita-cita bersama. Oleh karena itu, studi mengenai nilai-nilai budaya sangat penting dalam memahami dinamika sosial budaya suatu bangsa.

Sebagai kesimpulan, nilai-nilai budaya adalah fondasi utama dari sistem sosial budaya. Ia membentuk kesadaran kolektif, mengatur perilaku, memperkuat identitas sosial, dan menjadi alat integrasi

sosial. Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai budaya Indonesia harus dijaga, dikembangkan, dan ditransmisikan melalui pendidikan, keluarga, serta media agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

### **C. Fungsi Nilai Budaya dalam Masyarakat**

Nilai budaya memiliki fungsi sentral dalam masyarakat karena berperan sebagai pedoman hidup yang mengatur sikap dan tindakan individu dalam kehidupan sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009), nilai-nilai budaya mencerminkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap ideal oleh masyarakat dan menjadi dasar bagi norma sosial. Dengan demikian, nilai budaya mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan harapan sosial.

Fungsi pertama dari nilai budaya adalah sebagai alat kontrol sosial. Nilai-nilai budaya menentukan batas-batas perilaku yang dianggap dapat diterima atau tidak oleh masyarakat. Bila seseorang menyimpang dari nilai-nilai tersebut, maka ia berisiko mendapatkan sanksi sosial, baik berupa celaan, pengucilan, atau hukuman lainnya (Durkheim, 1982). Fungsi ini penting untuk menjaga keteraturan sosial dan mencegah terjadinya kekacauan.

Kedua, nilai budaya berfungsi sebagai pengikat solidaritas sosial. Ketika anggota masyarakat memiliki nilai-nilai yang sama, maka akan tumbuh rasa kebersamaan dan identitas kolektif. Ini sesuai dengan pandangan Parsons (1951), yang menyatakan bahwa

nilai merupakan unsur utama dalam pembentukan integrasi sosial. Nilai seperti gotong royong dan kekeluargaan di Indonesia merupakan contoh konkret bagaimana nilai budaya memperkuat solidaritas sosial.

Fungsi ketiga adalah sebagai pendorong motivasi dalam kehidupan individu. Nilai-nilai budaya memberikan arah dan makna dalam hidup. Misalnya, nilai kerja keras, kejujuran, dan ketekunan sering kali dijadikan motivasi individu untuk meraih keberhasilan. Menurut Kluckhohn (1951), nilai budaya membentuk preferensi dalam tindakan manusia dan memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam hidup mereka.

Keempat, nilai budaya juga berfungsi sebagai warisan budaya. Nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi menjadi bagian dari identitas budaya suatu bangsa. Proses transmisi ini berlangsung melalui pendidikan, keluarga, tradisi lisan, dan simbol budaya (Spradley & McCurdy, 1975). Melalui proses ini, nilai budaya berfungsi sebagai sarana pelestarian dan kesinambungan budaya.

Fungsi kelima adalah sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan sosial. Banyak sistem hukum formal yang berakar pada nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Misalnya, dalam masyarakat Indonesia, prinsip keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai nilai dasar negara (Tilaar, 2004). Dengan demikian, nilai budaya memberi legitimasi terhadap struktur hukum dan norma resmi.

Nilai budaya juga memainkan fungsi dalam pembentukan karakter individu. Pendidikan karakter yang banyak ditekankan dalam sistem pendidikan Indonesia berbasis pada nilai-nilai budaya seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang tua. Haryatmoko (2007) menyebutkan bahwa nilai budaya memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian etis individu sejak dini.

Selain itu, nilai budaya mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap dunia. Nilai ini menjadi landasan dalam menyikapi perubahan sosial, modernisasi, dan tantangan globalisasi. Ketika nilai budaya kuat, masyarakat lebih mampu menyaring pengaruh luar dan menyesuaikannya dengan jati diri lokal (Koentjaraningrat, 2002).

Fungsi nilai budaya lainnya adalah sebagai alat pemersatu dalam masyarakat multikultural. Di Indonesia, nilai-nilai budaya seperti toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sangat penting untuk merawat keharmonisan sosial di tengah keragaman suku, agama, dan bahasa (Nasikun, 2001). Nilai ini menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang damai dan inklusif.

Terakhir, nilai budaya menjadi cermin dari perkembangan peradaban masyarakat. Ketika suatu masyarakat memiliki nilai-nilai yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan, inovasi, dan keadilan, maka kemungkinan besar masyarakat tersebut akan berkembang lebih maju. Oleh karena itu, fungsi nilai budaya tidak hanya bersifat statis, melainkan dinamis

dan ikut menentukan arah perubahan sosial (Berger & Luckmann, 1966).

#### **D. Nilai-Nilai Budaya Luhur Bangsa Indonesia**

Nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia merupakan hasil dari sejarah panjang interaksi sosial, agama, adat istiadat, serta proses akulturasi berbagai budaya yang hidup di Nusantara. Nilai-nilai ini mencerminkan pandangan hidup, jati diri, serta etos sosial masyarakat Indonesia. Menurut Koentjaraningrat (2002), nilai budaya adalah konsep-konsep ideal yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga masyarakat dan menjadi pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu nilai luhur yang sangat menonjol adalah gotong royong. Nilai ini menggambarkan semangat kebersamaan, kerja sama, dan kepedulian terhadap sesama tanpa mengharapkan imbalan. Dalam berbagai bentuk kegiatan masyarakat seperti panen raya, membangun rumah, dan upacara adat, nilai gotong royong menjadi kekuatan sosial yang mengikat. Menurut Suyanto dan Sutinah (2010), gotong royong merupakan inti dari solidaritas sosial masyarakat Indonesia.

Nilai musyawarah untuk mufakat juga menjadi warisan budaya yang kuat. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan melalui dialog yang melibatkan semua unsur masyarakat untuk mencapai kesepakatan bersama. Nilai ini juga tercermin dalam sila keempat Pancasila dan menjadi bagian dari sistem demokrasi Pancasila

yang khas. Sebagaimana ditegaskan oleh Tilaar (2004), musyawarah bukan hanya cara mengambil keputusan, tetapi juga cara menjaga harmoni sosial.

Nilai toleransi antarumat beragama telah menjadi bagian penting dari kehidupan sosial bangsa Indonesia yang multikultural. Keberagaman agama dan kepercayaan diakomodasi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dalam konteks ini, Koentjaraningrat (2009) menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia mengembangkan sistem sosial yang memungkinkan berbagai kelompok kepercayaan hidup berdampingan secara damai.

Sopan santun dan hormat kepada orang tua juga termasuk nilai luhur yang dijunjung tinggi. Dalam budaya Jawa misalnya, penggunaan bahasa krama menunjukkan penghormatan terhadap orang yang lebih tua. Nilai ini ditanamkan melalui proses sosialisasi sejak dini dalam keluarga. Menurut Haryatmoko (2007), kesopanan dalam masyarakat Indonesia tidak hanya bentuk etika, tetapi juga simbol relasi sosial yang hierarkis dan penuh tata krama.

Keramahtamahan atau hospitality menjadi ciri khas yang sering diasosiasikan dengan bangsa Indonesia. Sikap ramah kepada tamu, ringan tangan membantu orang lain, dan membuka diri terhadap orang asing mencerminkan nilai budaya keterbukaan yang diwariskan turun-temurun. Budaya ini telah menjadi daya tarik tersendiri di mata dunia internasional, terutama dalam konteks pariwisata (Koentjaraningrat, 2002).

Nilai kesederhanaan dan hidup selaras dengan alam juga masih kuat dalam komunitas adat, seperti masyarakat Bali, Baduy, dan Dayak. Hidup dalam kesadaran ekologis dan tidak berlebihan merupakan bagian dari filosofi hidup mereka. Sebagaimana dijelaskan oleh Geertz (1973), dalam kebudayaan Jawa dan Bali terdapat harmoni antara manusia, alam, dan spiritualitas (konsep Tri Hita Karana).

Patriotisme dan semangat kebangsaan juga merupakan nilai budaya yang tertanam kuat sejak era perjuangan kemerdekaan. Nilai ini mencakup rasa cinta tanah air, kesediaan untuk berkorban demi bangsa, serta rasa memiliki terhadap keutuhan wilayah Indonesia. Nilai ini terus dipupuk melalui pendidikan kewarganegaraan dan peringatan hari-hari besar nasional (Nasikun, 2001).

Nilai kekeluargaan adalah fondasi dari struktur sosial masyarakat Indonesia. Konsep keluarga tidak hanya terbatas pada relasi darah, tetapi juga meluas ke hubungan sosial yang bersifat komunitarian. Dalam masyarakat Indonesia, keputusan penting sering kali melibatkan seluruh anggota keluarga besar, menunjukkan kuatnya nilai kolektif (Soelaiman, 2013).

Terakhir, nilai keadilan sosial menjadi semangat utama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Prinsip ini tidak hanya menjadi bagian dari ideologi negara, tetapi juga mewarnai perjuangan sosial dan gerakan rakyat sejak masa kolonial. Nilai ini tercermin dalam cita-cita masyarakat untuk mencapai kesetaraan, distribusi

sumber daya yang adil, dan penghapusan diskriminasi (Tilaar, 2004).

Selain nilai-nilai yang telah disebutkan sebelumnya, nilai persatuan dalam keberagaman juga menjadi pilar utama dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa dengan latar belakang budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, namun tetap memiliki semangat untuk bersatu. Nilai ini tercermin dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang secara harfiah berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu" (Koentjaraningrat, 2009). Nilai ini tidak hanya menjadi slogan nasional, tetapi juga hidup dalam praktik sosial seperti upacara kenegaraan, pendidikan, dan forum musyawarah.

Nilai tanggung jawab sosial juga menjadi salah satu ciri luhur budaya bangsa. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia umumnya merasa terpanggil untuk membantu dan terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti kerja bakti, ronda malam, dan kegiatan keagamaan. Menurut Suyanto dan Sutinah (2010), tanggung jawab sosial ini berakar dari tradisi komunal yang menempatkan individu sebagai bagian tak terpisahkan dari komunitasnya.

Keadaban dan sikap rendah hati adalah nilai lain yang membentuk karakter bangsa. Dalam banyak tradisi lokal, sikap tidak sombong, tidak menonjolkan diri, dan tahu diri menjadi ukuran moral seseorang. Misalnya, dalam budaya Minangkabau dikenal ungkapan "lurah tak condong ke hilir, datar tak bergeser ke tepi", yang menggambarkan pentingnya

keseimbangan dan kebijaksanaan dalam bersikap (Nasikun, 2001). Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalin relasi antarpersonal maupun antar kelompok.

Nilai spiritualitas juga merupakan bagian integral dari budaya Indonesia. Masyarakat Indonesia secara umum memiliki kedekatan dengan hal-hal yang bersifat transendental. Praktik-praktik keagamaan maupun kepercayaan lokal menunjukkan bahwa spiritualitas bukan hanya persoalan ibadah ritual, melainkan menyatu dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam upacara panen, pernikahan, dan kelahiran. Haryatmoko (2007) menyatakan bahwa spiritualitas dalam budaya Indonesia seringkali bersifat inklusif dan merangkul perbedaan.

Akhirnya, nilai cinta lingkungan mulai mendapat perhatian sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Masyarakat adat seperti Baduy dan Dayak memiliki kearifan lokal yang menekankan kelestarian alam sebagai bagian dari kehidupan yang seimbang. Filosofi seperti *Tri Hita Karana* di Bali dan *kearifan lokal Ammatoa* di Kajang memperlihatkan bahwa hubungan antara manusia dan alam dijaga melalui adat dan norma-norma sosial (Geertz, 1973). Nilai ini penting untuk diaktualisasikan kembali dalam menghadapi tantangan ekologi modern.

## E. Daftar Pustaka

- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hofstede, G. (2001). *Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations*. Thousand Oaks: Sage.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koentjaraningrat. (2009). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Nas, P. J. M. (Ed.). (2009). *Masyarakat dan Budaya Indonesia dalam Dinamika Global*. Jakarta: UI Press.
- Rahardjo, D. (1999). *Indonesia Baru: Kebudayaan dan Modernitas*. Jakarta: Kompas.
- Sutrisno, M. & Putranto, B. (2005). *Teori-Teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Durkheim, É. (1982). *The Rules of Sociological Method*. New York: The Free Press.
- Haryatmoko. (2007). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kluckhohn, C. (1951). "Values and Value-Orientations in the Theory of Action", dalam *Toward a General Theory of Action*. Cambridge: Harvard University Press.

## **BAB III**

### **LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL**

#### **A. Pengantar Umum**

Lembaga sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial masyarakat. Lembaga sosial dibentuk oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendasar dan mempertahankan keteraturan sosial. Koentjaraningrat (2009) menyebutkan bahwa lembaga sosial adalah sistem norma dan hubungan yang dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan mengatur kehidupan anggota masyarakat.

Secara sosiologis, lembaga sosial merupakan pola-pola terorganisir yang mengatur perilaku manusia dalam kelompok sosial. Lembaga ini berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan berinteraksi agar tercipta kestabilan sosial (Soekanto, 2012). Lembaga sosial juga disebut sebagai pranata sosial karena berperan dalam proses internalisasi nilai dan norma.

Menurut Gillin dan Gillin (1954), pranata sosial atau lembaga sosial adalah sistem dari kebiasaan dan tata kelakuan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Artinya, lembaga sosial tidak hanya sekadar aturan, melainkan institusi yang hidup dan berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Lembaga sosial terbentuk melalui proses sosialisasi yang berlangsung secara terus-menerus.

Ketika nilai dan norma diinternalisasikan dan disepakati oleh anggota masyarakat, maka lahir lah struktur yang lebih permanen dan terorganisir, yakni lembaga sosial (Berger & Luckmann, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa lembaga sosial bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan sosial.

Dalam masyarakat Indonesia, lembaga sosial berkembang dari tradisi dan nilai-nilai budaya yang khas. Misalnya, lembaga adat berkembang dari struktur masyarakat tradisional dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan komunitas, seperti pembagian tanah, penyelesaian konflik, hingga upacara keagamaan (Koentjaraningrat, 2009).

Beberapa lembaga sosial pokok yang dikenal dalam kajian sosiologi meliputi lembaga keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, politik, dan hukum. Keenam lembaga ini memiliki peran utama dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial budaya masyarakat (Soekanto, 2012). Masing-masing memiliki fungsi dan struktur yang spesifik dalam kehidupan masyarakat.

Lembaga keluarga misalnya, merupakan lembaga sosial primer yang pertama kali dikenali oleh individu. Di dalam keluarga, seseorang pertama kali belajar tentang nilai, norma, dan peran sosial. Menurut Parsons dan Bales (1955), keluarga memiliki dua fungsi utama yaitu sosialisasi anak dan stabilisasi kepribadian orang dewasa.

Lembaga pendidikan berperan dalam pewarisan nilai-nilai budaya dan pengetahuan antar generasi. Pendidikan formal dan informal membantu

individu untuk beradaptasi dalam masyarakat dan meningkatkan mobilitas sosial (Tilaar, 2002). Pendidikan juga menjadi sarana reproduksi budaya dan transformasi sosial.

Lembaga agama memiliki fungsi spiritual dan moral dalam kehidupan masyarakat. Agama memberikan panduan moral dan etika, serta menjembatani hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Emile Durkheim dalam *The Elementary Forms of Religious Life* (1912) menekankan bahwa agama adalah kekuatan kolektif yang menyatukan masyarakat.

Lembaga ekonomi mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologi, lembaga ekonomi tidak hanya dipandang dari aspek material, tetapi juga dari relasi sosial yang terjadi dalam aktivitas ekonomi (Polanyi, 1944). Sistem ekonomi dalam masyarakat tradisional dan modern menunjukkan perbedaan dalam bentuk dan nilai yang mendasarinya.

Lembaga politik bertugas mengatur kekuasaan, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan dalam masyarakat. Lembaga ini memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat melalui peraturan dan kebijakan. Max Weber (1947) menyebutkan bahwa lembaga politik memiliki legitimasi dalam penggunaan kekuasaan secara sah.

Lembaga hukum berfungsi untuk menegakkan keadilan dan mengatur perilaku agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hukum merupakan bagian

dari lembaga sosial yang mengikat dan memiliki sanksi yang jelas jika dilanggar. Talcott Parsons (1961) menekankan bahwa hukum adalah mekanisme penting dalam sistem sosial modern untuk menjaga keteraturan.

Selain lembaga-lembaga formal tersebut, dalam masyarakat juga terdapat lembaga informal yang tetap memiliki pengaruh besar, seperti kelompok kekerabatan, organisasi kemasyarakatan, dan sistem adat. Keberadaan lembaga informal ini memperkaya struktur sosial masyarakat Indonesia yang multikultural (Geertz, 1963).

Transformasi sosial yang cepat akibat globalisasi dan perkembangan teknologi menyebabkan perubahan dalam bentuk dan fungsi lembaga sosial. Misalnya, keluarga tidak lagi berbentuk extended family, melainkan cenderung menjadi nuclear family, serta munculnya pendidikan daring yang mengubah pola interaksi dalam lembaga pendidikan (Castells, 1996).

Oleh karena itu, penting untuk terus mempelajari dan memahami lembaga sosial sebagai bagian integral dari sistem sosial budaya. Analisis terhadap lembaga-lembaga sosial memungkinkan kita untuk memahami dinamika masyarakat serta merancang kebijakan sosial yang kontekstual dan berkeadilan.

## **B. Pengertian Lembaga Sosial**

Lembaga sosial, dalam kajian sosiologi, merupakan sistem norma dan struktur yang dibentuk

oleh masyarakat untuk mengatur kehidupan sosial dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Menurut Soekanto (2012), lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Istilah lembaga sosial sering kali disamakan dengan pranata sosial. Menurut Koentjaraningrat (2009), pranata sosial (*social institution*) adalah sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kompleks dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti lembaga sosial mencakup aturan formal maupun informal.

Lembaga sosial terbentuk sebagai hasil dari proses interaksi sosial yang berlangsung dalam waktu lama dan secara berulang. Ketika pola perilaku tertentu diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat dan dianggap sah, maka pola tersebut menjadi bagian dari lembaga sosial (Berger & Luckmann, 1991).

Lembaga sosial juga dapat dipahami sebagai sistem yang menstrukturkan peran, nilai, dan norma dalam masyarakat. Talcott Parsons (1961) menekankan bahwa lembaga sosial memiliki peran dalam menjaga keteraturan sosial melalui penyediaan pedoman perilaku dan distribusi peran sosial.

Menurut Gillin dan Gillin (1954), lembaga sosial adalah himpunan dari kebiasaan dan tata kelakuan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas penting dalam kehidupan masyarakat. Artinya, lembaga ini muncul dari kebutuhan sosial yang berulang dan diatur dalam pola yang relatif tetap.

Lembaga sosial memiliki dua sisi: sebagai struktur yang memengaruhi perilaku individu dan sebagai hasil dari tindakan kolektif masyarakat. Anthony Giddens (1984) dalam *The Constitution of Society* menyatakan bahwa struktur sosial bersifat dualistis: sekaligus hasil dan alat dari tindakan sosial.

Lembaga sosial juga memiliki legitimasi dalam masyarakat karena ia dibentuk atas dasar nilai dan norma yang diyakini bersama. Ketika norma dan nilai tersebut dilembagakan, maka terciptalah institusi yang dianggap sah dan mengikat perilaku masyarakat (Durkheim, 1912).

Dalam masyarakat, lembaga sosial menjadi wadah bagi individu untuk memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Misalnya, lembaga keluarga mengatur hubungan antara suami, istri, dan anak; lembaga pendidikan mengatur proses transfer pengetahuan; dan lembaga agama memberikan tuntunan nilai kehidupan (Soetomo, 2014).

Lembaga sosial tidak bersifat kaku, melainkan dapat berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Ketika nilai dan norma mengalami perubahan, lembaga sosial pun bisa mengalami penyesuaian agar tetap relevan dengan konteks sosialnya (Tilaar, 2002).

Dalam masyarakat modern, muncul lembaga-lembaga sosial baru yang menjawab kebutuhan zaman, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi non-pemerintah, hingga lembaga digital yang hadir dalam bentuk komunitas daring. Ini

menunjukkan bahwa lembaga sosial bersifat adaptif dan evolutif (Castells, 1996).

Keberadaan lembaga sosial sangat penting karena menciptakan keteraturan dan stabilitas. Tanpa lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan cenderung anarkis dan tidak terarah. Oleh sebab itu, lembaga sosial berfungsi sebagai pilar utama kehidupan bersama (Soekanto, 2012).

Lembaga sosial juga berperan dalam proses sosialisasi dan enkulturasi. Melalui lembaga seperti keluarga dan sekolah, individu mempelajari nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat (Berger & Luckmann, 1991).

Di Indonesia, lembaga sosial sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal. Lembaga adat, misalnya, masih memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di banyak daerah. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara nilai tradisional dan struktur kelembagaan (Koentjaraningrat, 2009).

Lembaga sosial memiliki hierarki dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Ada lembaga yang bersifat primer seperti keluarga, dan ada yang bersifat sekunder seperti lembaga negara. Namun semua lembaga ini saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan sosial (Soetomo, 2014).

Dengan demikian, pemahaman terhadap pengertian lembaga sosial sangat penting dalam kajian sosiologi karena memungkinkan kita memahami bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana nilai dan

norma diinternalisasi, dan bagaimana individu berperan dalam sistem sosial yang lebih luas.

### **C. Ciri-Ciri Lembaga Sosial**

Lembaga sosial merupakan struktur penting dalam kehidupan bermasyarakat yang terbentuk dari pola perilaku sosial yang berulang dan terorganisasi. Kehadirannya bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sistem norma yang terinternalisasi secara kolektif dan dijalankan secara berulang dalam kehidupan sosial. Menurut Soekanto (2012), lembaga sosial adalah himpunan norma yang berpusat pada kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat dan membentuk keteraturan sosial.

Setiap lembaga sosial hadir dengan tujuan sosial tertentu yang berfungsi mengarahkan tindakan masyarakat dalam mencapai keseimbangan sosial. Parsons (1951) menyatakan bahwa lembaga sosial adalah subsistem yang menyusun sistem sosial secara menyeluruh, dengan tujuan mengatur dan mengintegrasikan berbagai tindakan sosial individu ke dalam kerangka nilai dan norma.

Norma atau aturan menjadi ciri fundamental dari lembaga sosial. Tanpa norma yang jelas dan disepakati, sebuah lembaga tidak akan memiliki kekuatan mengatur atau mengarahkan perilaku. Koentjaraningrat (2009) menjelaskan bahwa norma-norma yang dilembagakan merupakan pedoman perilaku yang dijaga oleh masyarakat dan menjadi inti dari sistem sosial yang stabil.

Sebagai sistem pengatur sosial, lembaga juga dilengkapi dengan sanksi, baik yang bersifat formal maupun informal. Gillin dan Gillin (1954) menekankan bahwa sanksi sosial merupakan unsur vital yang memastikan bahwa norma dijalankan dan dihormati oleh seluruh anggota masyarakat. Sanksi ini menciptakan efek disiplin sekaligus memperkuat kohesi sosial.

Struktur organisasi yang melekat pada lembaga menunjukkan bahwa lembaga tidak terbentuk secara sembarangan. Dalam lembaga terdapat posisi dan peran tertentu yang dijalankan oleh individu sesuai fungsinya dalam struktur sosial. Giddens (1984) menyebut struktur ini sebagai rangkaian aturan dan sumber daya yang memfasilitasi terjadinya praktik sosial.

Pewarisan nilai dan norma merupakan fungsi penting lembaga sosial yang menjadikannya bersifat lintas generasi. Melalui proses sosialisasi, nilai-nilai sosial dan budaya diajarkan kepada anggota baru masyarakat, sehingga terjadi kesinambungan budaya. Berger dan Luckmann (1966) menegaskan bahwa institusionalisasi norma merupakan bagian dari proses realitas sosial yang dibangun secara kolektif.

Legitimasi sosial menjadi elemen penting dalam keberlangsungan lembaga. Tanpa pengakuan dan penerimaan dari masyarakat, lembaga tidak memiliki kekuatan simbolik untuk bertindak dan mengatur. Durkheim (1912) menyatakan bahwa legitimasi suatu lembaga muncul dari kesadaran

kolektif yang menganggap lembaga tersebut sakral dan layak ditaati.

Lembaga sosial juga biasanya memiliki simbol atau lambang yang merepresentasikan identitasnya. Lambang seperti bendera, seragam, atau jargon menjadi alat visual yang memperkuat eksistensi dan identitas lembaga dalam kesadaran masyarakat. Simbol tersebut berfungsi sebagai media penguat solidaritas internal dan pengenalan eksternal (Soetomo, 2014).

Dalam jangka panjang, lembaga sosial cenderung menunjukkan sifat yang stabil dan tahan terhadap perubahan mendadak. Meskipun perubahan sosial dapat terjadi, lembaga sosial biasanya beradaptasi secara bertahap, melalui proses yang disebut Koentjaraningrat (2009) sebagai enkulturasi dan difusi nilai secara perlahan dalam struktur sosial.

Setiap lembaga sosial berfungsi mengatur dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik itu dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, agama, hingga politik. Tilaar (2002) menegaskan bahwa lembaga sosial tidak hanya mengatur aspek teknis kehidupan, tetapi juga memelihara nilai dan integrasi sosial dalam masyarakat.

Menariknya, lembaga sosial memiliki dua karakter penting yang saling melengkapi: konservatif dan adaptif. Di satu sisi, ia menjaga nilai-nilai lama yang dianggap fundamental; di sisi lain, ia membuka diri terhadap perubahan untuk tetap relevan dalam menghadapi dinamika masyarakat modern (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam setiap lembaga, peran-peran sosial yang dijalankan oleh individu telah terstruktur dengan baik. Misalnya dalam lembaga keluarga terdapat peran ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pengelola rumah tangga, dan anak sebagai penerus. Struktur peran ini memungkinkan adanya pembagian tugas yang efisien dan harmonis (Parsons, 1961).

Keberadaan lembaga sosial tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan satu sama lain. Ketika lembaga pendidikan mengalami perubahan kurikulum, dampaknya dapat terasa pada lembaga keluarga dan pasar kerja. Hal ini menunjukkan adanya interdependensi antarlembaga dalam sistem sosial (Soetomo, 2014).

Proses sosialisasi menjadi elemen penting dalam keberlangsungan lembaga sosial. Melalui proses ini, nilai dan norma lembaga ditanamkan kepada individu sejak dini, baik melalui pendidikan formal maupun interaksi sehari-hari dalam lingkungan sosial (Berger & Luckmann, 1966).

Lembaga sosial juga memiliki fungsi manifes dan laten. Fungsi manifes adalah tujuan eksplisit dari lembaga, seperti pendidikan dalam lembaga sekolah. Sedangkan fungsi laten bisa berupa pembentukan jaringan sosial atau pelestarian budaya yang tidak selalu disadari masyarakat, sebagaimana diuraikan oleh Merton (1968).

#### **D. Peran Lembaga Sosial dalam Masyarakat Multikultural**

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, lembaga sosial memainkan peran penting sebagai penyangga integrasi sosial dan pemelihara stabilitas antar kelompok. Multikulturalisme yang ditandai oleh keberagaman etnis, agama, bahasa, serta kebudayaan, menuntut adanya lembaga yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa lembaga sosial menjadi wadah di mana nilai dan norma dikembangkan untuk menciptakan kesatuan dalam keragaman.

Salah satu peran utama lembaga sosial adalah mengatur interaksi sosial antara kelompok berbeda agar berlangsung dalam kerangka saling menghargai. Melalui proses sosialisasi yang difasilitasi lembaga seperti keluarga, sekolah, dan media, masyarakat diajarkan untuk mengenal serta memahami budaya lain. Menurut Berger dan Luckmann (1966), proses internalisasi norma ini sangat penting dalam membentuk persepsi kolektif tentang “yang pantas” dan “yang tidak pantas” dalam interaksi sosial lintas budaya.

Lembaga pendidikan menjadi agen utama dalam mentransmisikan nilai-nilai multikultural kepada generasi muda. Pendidikan multikultural yang mengajarkan toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan, merupakan bentuk nyata kontribusi lembaga pendidikan dalam menjaga harmoni sosial (Banks, 2006). Melalui kurikulum dan

interaksi antar siswa dari latar belakang berbeda, lembaga ini menjadi arena belajar keberagaman secara langsung.

Lembaga agama pun berperan strategis dalam mengajarkan nilai-nilai universal seperti kasih sayang, perdamaian, dan keadilan yang melampaui batas-batas identitas primordial. Durkheim (1912) berpendapat bahwa agama merupakan bentuk solidaritas sosial yang mengikat individu dalam kerangka nilai yang lebih tinggi. Dalam konteks multikulturalisme, agama menjadi kekuatan yang mendorong kohesi sosial bila dikelola dengan semangat inklusivitas.

Lembaga hukum turut memberikan jaminan bagi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat multikultural. Melalui perangkat hukum yang nondiskriminatif, negara menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak dan perlindungan yang sama di hadapan hukum. Giddens (2006) menekankan pentingnya rule of law dalam sistem sosial modern sebagai pengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat yang kompleks.

Di ranah ekonomi, lembaga pasar menjadi ruang interaksi multikultural yang sarat akan keragaman. Aktivitas jual beli yang mempertemukan pelaku ekonomi dari berbagai latar belakang budaya menciptakan saling ketergantungan yang memperkuat solidaritas antar kelompok. Kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan nilai tukar, tetapi juga nilai sosial berupa toleransi dan kerjasama (Friedman, 2002).

Lembaga politik, sebagai pengatur kekuasaan dan representasi kepentingan publik, memiliki

tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap kelompok budaya memiliki ruang untuk berpartisipasi. Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik multikultural dan kebijakan afirmatif menjadi mekanisme yang menjaga inklusivitas dalam proses pengambilan keputusan (Kymlicka, 1995).

Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga keluarga berperan sebagai fondasi awal pembentukan sikap multikultural. Keluarga menjadi tempat pertama di mana anak-anak belajar menerima perbedaan melalui cerita, kebiasaan, dan nilai yang diajarkan. Peran ini semakin penting dalam masyarakat urban yang heterogen, di mana interaksi dengan kelompok lain menjadi tak terhindarkan (Soekanto, 2012).

Media massa dan media sosial kini juga menjadi lembaga baru yang membentuk persepsi publik tentang identitas dan perbedaan. Media yang bertanggung jawab dapat memperkuat nilai toleransi dan keberagaman, namun sebaliknya media juga dapat memperkuat stereotip dan memicu konflik bila tidak dikontrol (McQuail, 2010). Oleh karena itu, penguatan literasi media dalam masyarakat multikultural sangatlah penting.

Lembaga adat atau lokal juga memiliki peran besar dalam mengelola harmoni antar kelompok dalam masyarakat tradisional. Nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan sistem kekerabatan sering kali menjadi mekanisme informal dalam menyelesaikan konflik antar kelompok. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa lembaga

adat adalah pelindung nilai-nilai lokal yang menjamin keberlangsungan struktur sosial yang beragam.

Peran lembaga sosial dalam masyarakat multikultural tidak hanya bersifat preventif terhadap konflik, tetapi juga bersifat proaktif dalam membangun identitas nasional. Identitas kebangsaan yang inklusif hanya dapat dibangun ketika semua kelompok merasa diakui, dihargai, dan memiliki kesempatan yang sama. Lembaga sosial menjadi instrumen penguat nasionalisme yang sehat (Tilaar, 2002).

Krisis sosial yang terjadi akibat diskriminasi atau ketidaksetaraan menunjukkan pentingnya revitalisasi peran lembaga sosial. Dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi sosial, lembaga perlu mereposisi dirinya agar tetap relevan dalam menjawab tantangan kebhinekaan. Kelembagaan yang tidak adaptif hanya akan memperlebar jurang perbedaan sosial (Giddens, 2006).

Lembaga sosial juga berperan sebagai penjaga memori kolektif budaya. Museum, arsip budaya, dan institusi kebudayaan lainnya bertugas merekam, menyimpan, dan memamerkan kekayaan budaya bangsa sebagai identitas bersama. Keberadaan lembaga semacam ini menumbuhkan kebanggaan kolektif terhadap pluralitas budaya (Hobsbawm & Ranger, 1983).

Dalam situasi darurat seperti bencana alam atau pandemi, lembaga sosial menunjukkan daya adaptifnya dalam merespons kebutuhan masyarakat multikultural. Dalam penanganan COVID-19 misalnya, lembaga keagamaan dan komunitas lokal

banyak berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang tepat dengan pendekatan budaya yang relevan.

Secara keseluruhan, peran lembaga sosial dalam masyarakat multikultural adalah menjaga keseimbangan antara keberagaman dan kesatuan. Lembaga yang kuat, adaptif, dan inklusif akan mampu meredam potensi konflik sekaligus mendorong pembangunan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan. Seperti ditegaskan oleh Kymlicka (1995), multikulturalisme yang sehat membutuhkan kelembagaan yang adil dan akomodatif terhadap semua identitas budaya.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1991). *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Penguin Books.
- Castells, M. (1996). *The Rise of the Network Society*. Blackwell.
- Durkheim, E. (1912). *The Elementary Forms of Religious Life*. Free Press.
- Geertz, C. (1963). *Peddler and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns*. University of Chicago Press.
- Gillin, J. L., & Gillin, J. P. (1954). *Cultural Sociology*. The Macmillan Company.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.

- Parsons, T., & Bales, R. F. (1955). *Family, Socialization and Interaction Process*. Free Press.
- Parsons, T. (1961). *Theories of Society*. Free Press.
- Polanyi, K. (1944). *The Great Transformation*. Beacon Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. RajaGrafindo Persada.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2010). *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Kencana.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Remaja Rosdakarya.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.

## **BAB IV**

### **SISTEM KEKERABATAN DAN KEMASYARAKATAN**

#### **A. Pengantar Umum**

Sistem kekerabatan dan kemasyarakatan merupakan fondasi penting dalam struktur sosial budaya masyarakat Indonesia. Keduanya menjadi instrumen utama dalam membentuk pola interaksi sosial, pembagian peran, dan pengorganisasian kehidupan bersama. Menurut Koentjaraningrat (2009), sistem kekerabatan mencakup seperangkat norma, nilai, serta aturan yang mengatur hubungan antara individu berdasarkan garis keturunan, pernikahan, dan afiliasi sosial lainnya.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terdiri atas ribuan suku bangsa, memiliki ragam sistem kekerabatan yang mencerminkan kompleksitas budaya lokalnya. Ada sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal seperti pada masyarakat Batak, sistem matrilineal seperti di Minangkabau, dan sistem bilateral seperti yang umum ditemukan di Jawa. Perbedaan ini menunjukkan betapa struktur sosial masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang telah tertanam sejak lama (Fox, 1993).

Sistem kekerabatan tidak hanya mengatur hubungan darah atau keturunan, tetapi juga berperan dalam menentukan status sosial, hak waris, pola tinggal, serta kewajiban antar anggota keluarga. Dalam masyarakat tradisional, sistem kekerabatan menjadi dasar dalam pembentukan kelompok sosial,

pengambilan keputusan adat, serta pembagian sumber daya ekonomi dan sosial (Geertz, 1961). Oleh karena itu, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari dinamika kemasyarakatan secara luas.

Dalam masyarakat agraris yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional, sistem kekerabatan sering kali juga menjadi dasar dalam organisasi produksi dan distribusi hasil pertanian. Ikatan kekeluargaan yang kuat memungkinkan adanya kerja sama kolektif dalam bentuk gotong royong. Pola ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan bukan hanya berfungsi dalam ranah privat, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi dan politik di tingkat komunitas (Ember & Ember, 1988).

Kekerabatan juga menjadi sumber identitas sosial. Di banyak daerah, nama marga, klan, atau suku menjadi penanda identitas kultural seseorang. Hal ini dapat memperkuat rasa solidaritas di antara sesama anggota kekerabatan. Namun, dalam konteks masyarakat modern, sistem ini juga bisa menjadi tantangan ketika digunakan secara eksklusif dan menutup ruang integrasi lintas kelompok (Soekanto, 2012).

Sistem kemasyarakatan merujuk pada cara masyarakat mengorganisasikan kehidupan sosialnya dalam berbagai institusi seperti keluarga, kelompok kerja, organisasi adat, hingga sistem pemerintahan lokal. Kemasyarakatan mencerminkan mekanisme sosial yang di dalamnya individu dan kelompok menjalankan perannya sesuai nilai dan norma yang berlaku. Dalam hal ini, sistem kekerabatan menjadi

bagian penting dari struktur kemasyarakatan (Durkheim, 1893).

Pada masyarakat tradisional, sistem kemasyarakatan sering kali bersifat komunal, di mana keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan dipandu oleh nilai kebersamaan. Dalam komunitas semacam ini, kekerabatan dan kemasyarakatan berjalan beriringan sebagai satu kesatuan sistem nilai. Hal ini berbeda dengan masyarakat modern yang lebih rasional dan individualistis, di mana hubungan sosial cenderung berdasarkan kontrak sosial, bukan hubungan darah (Parsons, 1951).

Kemasyarakatan dalam konteks Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh sistem adat yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah. Lembaga adat seperti *nagari*, *dusun*, *kampung*, dan *banjar* menjadi contoh konkret bagaimana sistem kemasyarakatan dijalankan dengan nilai lokal. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menjaga keteraturan sosial, tetapi juga menjadi tempat berlangsungnya proses sosialisasi dan enkulturasi budaya (Haviland, 1991).

Sistem kekerabatan juga berperan penting dalam membentuk jaringan sosial yang memperkuat mekanisme bantuan sosial informal. Dalam masyarakat Indonesia, bantuan dalam bentuk uang, tenaga, atau barang sering kali diberikan antar kerabat tanpa perjanjian tertulis, tetapi berdasarkan kewajiban moral. Hal ini disebut sebagai bentuk *moral economy*, yaitu sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan nilai sosial (Scott, 1976).

Di tengah perubahan sosial yang cepat akibat urbanisasi dan globalisasi, sistem kekerabatan mengalami transformasi. Hubungan kekeluargaan tidak lagi terikat secara fisik, tetapi cenderung bersifat simbolik dan emosional. Keluarga inti menggantikan keluarga besar, dan komunikasi antar anggota keluarga banyak dilakukan secara digital. Namun demikian, nilai solidaritas tetap dipertahankan, meskipun dalam bentuk yang lebih fleksibel (Castells, 2000).

Masyarakat multikultural seperti Indonesia menuntut adanya adaptasi sistem kemasyarakatan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sistem kekerabatan dan kemasyarakatan tidak hanya berfungsi untuk menjaga nilai tradisional, tetapi juga sebagai landasan bagi pengembangan masyarakat inklusif dan pluralistik. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap sistem tersebut menjadi kunci dalam membangun keharmonisan sosial (Tilaar, 2002).

Pendidikan sosial budaya perlu menanamkan pemahaman tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kekerabatan dan kemasyarakatan di tengah arus individualisme modern. Keluarga sebagai lembaga pertama yang memperkenalkan sistem ini perlu diberdayakan agar mampu menyesuaikan peran tradisionalnya dengan tantangan kontemporer. Pendidikan berbasis keluarga menjadi strategi yang efektif dalam menjaga keberlangsungan nilai kekerabatan (Nugroho, 2005).

Negara juga memiliki peran dalam merekognisi sistem kemasyarakatan yang hidup di masyarakat. Undang-Undang Desa, misalnya, memberi ruang bagi

lembaga adat untuk berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dan kemasyarakatan bukan hanya bagian dari warisan budaya, tetapi juga menjadi kekuatan sosial-politik yang relevan dalam pembangunan (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Keterlibatan generasi muda dalam sistem kekerabatan dan kemasyarakatan menjadi krusial untuk menjamin regenerasi nilai-nilai sosial tersebut. Dalam masyarakat yang cenderung pragmatis, penguatan literasi budaya tentang sistem sosial lokal sangat penting agar nilai-nilai gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab sosial tetap terpelihara (Fajri, 2020).

Memahami sistem kekerabatan dan kemasyarakatan berarti memahami bagaimana masyarakat Indonesia bekerja dan hidup dalam kerangka sosialnya. Sistem ini bukanlah sekadar bentuk tradisi, melainkan fondasi sosial yang terus membentuk identitas, moralitas, dan pola hidup masyarakat. Dengan memahami sistem ini, kita dapat lebih bijak dalam merespons perubahan sosial dan memperkuat keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa.

## **B. Pengertian Sistem Kekerabatan**

Sistem kekerabatan merupakan salah satu aspek fundamental dalam struktur sosial budaya yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat berdasarkan garis keturunan, perkawinan, dan afiliasi sosial lainnya. Sistem ini mencerminkan bagaimana

sebuah kelompok masyarakat memahami dan menstrukturkan ikatan-ikatan sosial melalui hubungan darah (*consanguinity*) dan hubungan perkawinan (*affinity*). Menurut Koentjaraningrat (2009), sistem kekerabatan mencakup aturan-aturan mengenai pengelompokan keluarga, pola tempat tinggal, hak waris, serta kewajiban sosial antar anggota keluarga.

Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, sistem kekerabatan menjadi sangat beragam dan unik di setiap daerah. Keanekaragaman ini tercermin dalam pola kekerabatan patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem patrilineal, misalnya, menekankan garis keturunan dari pihak ayah, seperti yang dijumpai pada masyarakat Batak dan sebagian besar suku di Indonesia Timur. Sebaliknya, sistem matrilineal seperti pada masyarakat Minangkabau mengikuti garis keturunan dari pihak ibu (Sanday, 2002).

Sistem kekerabatan tidak hanya menentukan struktur keluarga, tetapi juga berkaitan dengan identitas sosial dan kultural seseorang. Nama marga atau klan dalam beberapa budaya menjadi penanda afiliasi sosial yang erat kaitannya dengan asal-usul dan peran dalam komunitas. Dalam konteks ini, sistem kekerabatan berfungsi sebagai mekanisme pewarisan budaya dan nilai-nilai kolektif yang menjaga kontinuitas identitas etnis dan budaya (Fox, 1993).

Hubungan kekerabatan juga menciptakan jaringan sosial yang memfasilitasi pertukaran sumber daya, informasi, dan solidaritas sosial. Jaringan ini berfungsi sebagai sistem dukungan sosial informal

yang sangat penting, terutama dalam masyarakat tradisional. Seperti dikemukakan oleh Geertz (1961), dalam komunitas Jawa, kekerabatan membentuk kerangka sosial tempat berlangsungnya relasi sosial yang penuh makna, saling membantu, dan berkelanjutan.

Kekerabatan dalam masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan sistem nilai dan norma sosial yang mengatur interaksi antar individu. Nilai seperti hormat kepada orang tua, tanggung jawab terhadap keluarga, dan kewajiban moral terhadap kerabat merupakan produk dari sistem kekerabatan yang diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini menjadi alat enkulturasi dan sosialisasi yang memperkenalkan nilai-nilai dasar kehidupan sosial kepada generasi muda (Haviland, 1991).

Sistem kekerabatan juga mencerminkan bagaimana sebuah masyarakat memaknai relasi kuasa, gender, dan otoritas dalam rumah tangga. Dalam masyarakat patrilineal, misalnya, kepala keluarga biasanya adalah laki-laki yang juga memiliki otoritas atas keputusan penting dalam keluarga. Sebaliknya, masyarakat matrilineal memberikan tempat yang lebih signifikan bagi perempuan dalam pewarisan harta dan pengambilan keputusan keluarga (Ember & Ember, 1988).

Pentingnya sistem kekerabatan juga terlihat dari peranannya dalam pewarisan dan distribusi harta warisan. Dalam masyarakat Minangkabau, misalnya, harta pusaka diwariskan melalui jalur perempuan, sedangkan dalam masyarakat Batak diwariskan kepada

anak laki-laki. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan tidak hanya mengatur aspek sosial tetapi juga aspek ekonomi dalam masyarakat (Sanday, 2002).

Tidak hanya dalam komunitas adat, sistem kekerabatan juga berperan dalam konteks perkotaan dan modern. Meskipun bentuk keluarga inti semakin dominan, hubungan kekerabatan tetap menjadi bagian penting dari jaringan sosial. Dalam situasi-situasi krisis atau kebutuhan tertentu, ikatan kekeluargaan tetap menjadi sumber dukungan utama. Ini menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masih relevan meskipun mengalami modifikasi (Soekanto, 2012).

Sistem kekerabatan juga berkaitan erat dengan ritus-ritus sosial seperti pernikahan, kelahiran, kematian, dan upacara keagamaan. Dalam masyarakat tradisional, setiap ritus memiliki aturan yang berakar pada sistem kekerabatan tertentu. Misalnya, dalam upacara pernikahan adat Batak, kehadiran dan peran kerabat sangat ditentukan oleh posisi mereka dalam struktur kekerabatan, yang disebut *dalihan na tolu* (Simanjuntak, 1995).

Dalam era modern dan globalisasi, sistem kekerabatan mengalami berbagai transformasi. Urbanisasi dan mobilitas tinggi menyebabkan hubungan kekerabatan menjadi lebih longgar, namun nilai-nilai inti seperti solidaritas, bantuan timbal balik, dan rasa tanggung jawab terhadap keluarga tetap dipertahankan. Hal ini membuktikan bahwa sistem kekerabatan bersifat adaptif terhadap perubahan sosial (Castells, 2000).

Keluarga sebagai institusi utama dalam sistem kekerabatan menjadi arena utama sosialisasi nilai dan identitas. Keluarga tidak hanya mencetak individu secara biologis, tetapi juga secara sosial dan kultural. Pendidikan keluarga dalam hal ini menjadi sangat penting dalam menanamkan pemahaman akan pentingnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia (Tilaar, 2002).

Pengaruh sistem kekerabatan juga terlihat dalam politik lokal, terutama di daerah-daerah yang masih memegang kuat adat istiadat. Banyak tokoh adat yang mendapat legitimasi kepemimpinan karena hubungan kekerabatan tertentu. Dengan kata lain, sistem kekerabatan bisa menjadi modal sosial yang penting dalam membangun kepercayaan dan otoritas dalam masyarakat (Bourdieu, 1986).

Dalam kajian antropologi, sistem kekerabatan dipandang sebagai refleksi dari struktur sosial dan sistem nilai masyarakat. Oleh karena itu, memahami sistem kekerabatan berarti memahami struktur dasar kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Levi-Strauss (1969), kekerabatan adalah struktur simbolik yang mengatur hubungan manusia dalam suatu tatanan budaya.

Sistem kekerabatan juga menjadi pintu masuk penting dalam studi-studi etnografi dan pembangunan berbasis masyarakat. Dalam berbagai program pembangunan desa, pengabaian terhadap sistem kekerabatan lokal sering kali menimbulkan resistensi atau kegagalan. Oleh karena itu, kebijakan yang responsif terhadap struktur kekerabatan dapat

mendorong partisipasi yang lebih besar dari masyarakat (Nugroho, 2005).

Secara keseluruhan, sistem kekerabatan adalah sistem sosial yang bersifat dinamis dan adaptif. Ia berkembang bersama perubahan masyarakat, tetapi tetap menjadi kerangka dasar dalam memahami kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia. Pemahaman terhadap sistem ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang berakar pada nilai-nilai budaya lokal tetapi terbuka terhadap dinamika global.

### **C. Bentuk Sistem Kekerabatan di Indonesia**

Keberagaman budaya di Indonesia tercermin kuat dalam bentuk sistem kekerabatannya. Setiap kelompok etnik memiliki cara tersendiri dalam mengorganisasi hubungan keluarga dan sosial, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat, agama, dan sejarah lokal. Bentuk sistem kekerabatan ini tidak hanya sekadar pola hubungan darah, tetapi juga struktur sosial yang menentukan identitas, kewajiban, hak, dan peran sosial setiap individu dalam komunitasnya. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa sistem kekerabatan di Indonesia terdiri dari tiga bentuk utama, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral.

Sistem kekerabatan patrilineal merupakan bentuk yang paling umum di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sistem ini, garis keturunan dihitung dari pihak ayah, dan hak waris serta nama keluarga biasanya diturunkan kepada anak laki-laki. Masyarakat Batak di Sumatra Utara merupakan contoh yang paling terkenal dari sistem patrilineal. Mereka menganut

prinsip *marga*, yang diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak-anaknya (Simanjuntak, 1995). Sistem ini menempatkan laki-laki sebagai penjaga garis keturunan dan simbol kesinambungan keluarga.

Sebaliknya, masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat menerapkan sistem matrilineal, di mana garis keturunan dihitung dari pihak ibu. Dalam budaya Minangkabau, harta pusaka dan nama keluarga diturunkan kepada anak perempuan, sementara laki-laki tetap memegang peran penting dalam struktur adat sebagai *mamak* atau paman yang bertanggung jawab terhadap anak-anak dari saudara perempuannya (Sanday, 2002). Sistem ini unik karena memadukan prinsip matrilineal dengan struktur patriarki Islam yang kuat, menciptakan harmoni sosial dalam masyarakatnya.

Sistem bilateral adalah bentuk yang paling luas dijumpai dalam masyarakat Indonesia modern, terutama di wilayah Jawa, Bali, dan sebagian besar daerah perkotaan. Dalam sistem ini, garis keturunan diakui dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu. Anak-anak mewarisi hak dan tanggung jawab dari kedua garis keturunan tersebut. Sistem bilateral mencerminkan fleksibilitas dan egalitarianisme dalam relasi sosial, dan dianggap sebagai bentuk yang adaptif terhadap perubahan sosial di era modern (Haviland, 1991).

Di masyarakat Jawa, sistem bilateral berkembang bersamaan dengan nilai-nilai kekerabatan yang menekankan keseimbangan dan harmoni. Hubungan kekerabatan tidak hanya bersifat genealogis, tetapi

juga simbolik, seperti dalam konsep *trah* dan *pamong*. Sistem ini membentuk pola keluarga inti yang kuat, tetapi juga memelihara hubungan kekerabatan luas melalui ritual sosial seperti slametan, arisan keluarga, dan pertemuan rutin keluarga besar (Geertz, 1961).

Sistem kekerabatan di Indonesia juga menunjukkan variasi dalam pola tempat tinggal setelah menikah. Dalam sistem patrilineal, pasangan baru cenderung tinggal di sekitar keluarga pihak laki-laki (virilokal), sementara dalam sistem matrilineal mereka tinggal di rumah pihak perempuan (uxorilokal). Dalam sistem bilateral, pola neolokal—yakni tinggal terpisah dari kedua keluarga besar—lebih umum, terutama dalam masyarakat perkotaan (Ember & Ember, 1988).

Selain tiga bentuk utama tersebut, Indonesia juga mengenal sistem kekerabatan campuran yang dipengaruhi oleh migrasi, perkawinan antar etnis, dan proses modernisasi. Misalnya, dalam masyarakat Bugis dan Makassar, terdapat kecenderungan patrilineal tetapi tetap mengakui peran penting pihak ibu dalam pengasuhan dan pewarisan nilai-nilai budaya (Abdullah, 2006). Campuran ini menunjukkan bagaimana sistem kekerabatan Indonesia terus berkembang secara dinamis.

Unsur agama juga turut mempengaruhi bentuk kekerabatan. Dalam masyarakat muslim di Indonesia, misalnya, terdapat pengaruh hukum Islam dalam pembagian warisan, yang mengatur secara detail hak waris anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bisa menimbulkan pergeseran dari sistem adat murni ke sistem hukum yang berbasis agama. Sementara itu,

dalam masyarakat Bali yang Hindu, sistem *kasta* dan *purusa* menempatkan laki-laki sebagai pewaris utama untuk menjaga kesinambungan nama keluarga dan ritual leluhur (Belo, 1960).

Nilai dan norma yang melekat pada sistem kekerabatan juga menentukan peran sosial individu, termasuk dalam pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, dan struktur otoritas dalam keluarga. Dalam masyarakat patrilineal, keputusan penting sering diambil oleh laki-laki tertua, sementara dalam sistem matrilineal, walaupun garis keturunan ditentukan oleh perempuan, tetap ada mekanisme adat yang melibatkan laki-laki sebagai penjaga tradisi (Sanday, 2002).

Bentuk sistem kekerabatan tidak hanya berdampak pada kehidupan keluarga, tetapi juga pada struktur sosial yang lebih luas, termasuk sistem kepemimpinan tradisional, pola pewarisan tanah, serta organisasi sosial seperti kelompok gotong royong dan arisan. Kekerabatan menjadi pondasi terbentuknya komunitas yang kohesif dan terorganisasi secara informal (Soekanto, 2012).

Transformasi bentuk kekerabatan juga dapat dilihat dalam konteks globalisasi dan urbanisasi. Di kota-kota besar, nilai-nilai individualisme dan mobilitas tinggi menyebabkan keterikatan kekerabatan melemah. Namun, dalam banyak kasus, keluarga besar tetap menjadi sumber dukungan penting dalam kondisi ekonomi sulit atau saat menghadapi persoalan hidup, menunjukkan bahwa nilai-nilai kekerabatan tetap eksis

dalam bentuk baru yang lebih fleksibel (Castells, 2000).

Perubahan bentuk kekerabatan juga berhubungan dengan kesetaraan gender. Sistem bilateral cenderung memberikan ruang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini membuka peluang bagi pembentukan keluarga yang lebih setara, dibandingkan sistem patrilineal yang lebih konservatif dalam membatasi peran perempuan dalam ranah publik (Tilaar, 2002).

Bentuk sistem kekerabatan juga menjadi dasar dalam pendidikan informal. Dalam keluarga besar, anak-anak belajar norma dan nilai melalui interaksi dengan kakek-nenek, paman-bibi, serta sepupu. Proses ini penting dalam pembentukan karakter dan identitas kultural anak. Oleh karena itu, sistem kekerabatan memiliki peran strategis dalam regenerasi budaya bangsa (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam konteks pembangunan sosial, pemahaman terhadap bentuk sistem kekerabatan menjadi kunci dalam merancang kebijakan berbasis komunitas. Program-program pembangunan yang mengabaikan struktur kekerabatan sering mengalami kegagalan karena tidak memahami dinamika sosial setempat. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat dan struktur keluarga luas menjadi sangat penting (Nugroho, 2005).

Secara keseluruhan, bentuk-bentuk sistem kekerabatan di Indonesia mencerminkan keberagaman dan kekayaan budaya bangsa. Setiap sistem memiliki

logika sosial dan budaya yang khas dan harus dipahami dalam konteks lokalnya. Penguatan nilai-nilai kekerabatan yang inklusif dan adaptif menjadi tantangan sekaligus peluang dalam membangun masyarakat Indonesia yang tangguh dan berbudaya.

#### **D. Transformasi Sistem Kekerabatan dan Kemasyarakatan**

Transformasi sistem kekerabatan dan kemasyarakatan di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika perubahan sosial yang terjadi akibat globalisasi, urbanisasi, modernisasi, dan kemajuan teknologi. Kekerabatan yang sebelumnya bersifat tradisional dan komunal kini mulai mengalami pergeseran nilai, struktur, dan fungsi seiring dengan munculnya pola hidup yang lebih individualistik di masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menekankan bahwa sistem budaya, termasuk kekerabatan, senantiasa bersifat adaptif terhadap tekanan perubahan lingkungan.

Pada masa lalu, sistem kekerabatan tradisional sangat berperan dalam menentukan kedudukan sosial, pewarisan harta, tanggung jawab sosial, serta pengambilan keputusan dalam komunitas. Sistem ini dijalankan dalam kerangka adat yang kuat, seperti terlihat dalam masyarakat Minangkabau dengan pola matrilinealnya, Batak dengan patrilinealnya, atau masyarakat Jawa yang menganut sistem bilateral (Sanday, 2002). Namun, saat ini, pola-pola tersebut mulai tergeser oleh sistem kekerabatan yang lebih cair, fleksibel, dan fungsional.

Urbanisasi menjadi salah satu faktor utama yang mendorong transformasi sistem kekerabatan. Ketika individu berpindah ke kota untuk bekerja atau belajar, mereka secara perlahan menjauh dari struktur keluarga besar dan mulai mengadopsi pola keluarga inti. Studi Castells (2000) menunjukkan bahwa migrasi ke kota menyebabkan individu lebih bergantung pada jejaring sosial non-keluarga seperti teman kerja dan komunitas profesi. Hal ini menurunkan intensitas interaksi dalam kekerabatan tradisional.

Modernisasi juga berperan besar dalam mengubah nilai-nilai kekerabatan. Pendidikan formal, sistem ekonomi kapitalistik, dan gaya hidup urban menggeser pandangan masyarakat terhadap pentingnya keluarga besar. Nilai-nilai seperti kebebasan individu, efisiensi, dan mobilitas sosial menjadi dominan dalam pengambilan keputusan keluarga (Soekanto, 2012). Akibatnya, solidaritas kekerabatan yang dahulu sangat kuat perlahan mengalami pelemahan.

Perubahan peran gender dalam masyarakat turut memengaruhi transformasi sistem kekerabatan. Dalam sistem tradisional, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang baku dan tidak fleksibel. Namun, perkembangan pendidikan dan gerakan emansipasi membuat perempuan kini memiliki akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam ranah domestik dan publik. Hal ini menimbulkan konfigurasi baru dalam struktur keluarga dan tanggung jawab sosialnya (Tilaar, 2002).

Teknologi komunikasi dan media sosial menjadi agen transformasi baru dalam sistem

kemasyarakatan. Jejaring digital memungkinkan interaksi lintas ruang dan waktu, yang secara tidak langsung membentuk jaringan sosial virtual yang berbeda dari kekerabatan konvensional. McLuhan (1994) menyebutnya sebagai “global village,” di mana batas-batas ruang sosial menjadi kabur. Generasi muda kini lebih terhubung secara emosional dan sosial dengan komunitas daring daripada dengan keluarga besarnya.

Pergeseran ini juga tampak dalam praktik adat yang dahulu menjadi simbol kuat relasi kekerabatan. Upacara-upacara adat seperti pernikahan, kematian, dan kelahiran yang sebelumnya melibatkan keluarga besar kini dilakukan dengan skala lebih kecil dan sederhana. Hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh pergeseran nilai ke arah kepraktisan dan efisiensi (Geertz, 1961). Keputusan dalam keluarga tidak lagi harus menunggu restu para tetua atau keluarga besar.

Di sisi lain, transformasi sistem kemasyarakatan di Indonesia turut dipengaruhi oleh perkembangan politik dan kebijakan negara. Program-program pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi telah menggantikan sebagian fungsi tradisional dari lembaga kemasyarakatan seperti gotong royong, posyandu adat, atau kelompok tani. Negara hadir sebagai agen modernisasi, tetapi juga kerap meminggirkan peran struktur sosial tradisional (Nugroho, 2005).

Keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat juga mengalami redefinisi. Fungsi keluarga dalam

sosialisasi nilai dan budaya semakin digantikan oleh lembaga pendidikan formal dan media massa. Peran orang tua dalam mendidik anak semakin terbatas karena waktu yang tersisa untuk pekerjaan. Ini mengakibatkan nilai-nilai kekerabatan mengalami dekonstruksi, terutama dalam lingkungan keluarga urban (Ember & Ember, 1988).

Meskipun demikian, tidak semua nilai kekerabatan dan kemasyarakatan hilang dalam pusaran transformasi. Dalam banyak masyarakat pedesaan dan komunitas adat, sistem kekerabatan tetap dijaga dan dimodifikasi agar relevan dengan konteks kontemporer. Nilai-nilai seperti gotong royong, saling membantu, dan rasa hormat terhadap orang tua tetap menjadi identitas kultural yang dipertahankan (Koentjaraningrat, 2009).

Transformasi juga membuka peluang terjadinya hibridisasi nilai-nilai antara sistem tradisional dan modern. Misalnya, dalam pernikahan modern, meskipun berlangsung di gedung dengan tata cara kontemporer, unsur adat seperti pemakaian pakaian tradisional dan prosesi simbolik tetap dipertahankan. Ini menunjukkan adanya upaya untuk mempertahankan jati diri budaya dalam bingkai modernitas (Abdullah, 2006).

Konsep komunitas pun mengalami perubahan. Dulu, komunitas dibangun atas dasar ikatan genealogis dan geografis, sekarang banyak komunitas dibentuk berdasarkan hobi, minat, atau profesi. Komunitas virtual seperti komunitas motor, penggemar buku, atau komunitas relawan menjadi bentuk baru dari struktur

kemasyarakatan yang menggantikan peran keluarga atau tetangga dalam interaksi sosial (Castells, 2000).

Perubahan sistem kemasyarakatan juga dapat dilihat dalam pola kepemimpinan. Kepemimpinan yang dahulu bersifat karismatik dan berdasarkan usia kini mulai bergeser ke arah meritokrasi, di mana kepemimpinan diperoleh karena kompetensi dan prestasi. Ini terlihat dalam organisasi masyarakat dan lembaga adat yang mulai diisi oleh generasi muda dengan pola pikir rasional dan adaptif (Haviland, 1991).

Ketidakstabilan sosial dan krisis ekonomi turut mempercepat proses transformasi sistem kekerabatan dan kemasyarakatan. Ketika masyarakat menghadapi tekanan seperti pandemi, bencana alam, atau konflik, pola solidaritas sosial berubah. Banyak keluarga besar kembali menjadi sandaran ekonomi dan sosial, menunjukkan bahwa sistem kekerabatan masih memiliki daya tahan dan fleksibilitas dalam situasi krisis (Tilaar, 2002).

Dalam perspektif sosiologis, transformasi ini merupakan proses yang wajar dan tidak bisa dihindari. Masyarakat yang dinamis akan selalu menemukan cara untuk menyesuaikan struktur sosialnya dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi para akademisi, pengambil kebijakan, dan pelaku budaya untuk memahami perubahan ini sebagai peluang untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan resilien.

## E. Daftar Pustaka

- Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society*. Blackwell.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labor in Society*. New York: The Free Press.
- Ember, C. R., & Ember, M. (1988). *Cultural Anthropology*. Prentice Hall.
- Fajri, M. (2020). *Literasi Budaya dalam Pendidikan Karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fox, J. J. (1993). *Inside Austronesian Houses: Perspectives on Domestic Designs for Living*. ANU Press.
- Geertz, C. (1961). *The Religion of Java*. University of Chicago Press.
- Haviland, W. A. (1991). *Cultural Anthropology*. Harcourt Brace College Publishers.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. (2005). *Reformasi Sosial: Menuju Indonesia Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Parsons, T. (1951). *The Social System*. Free Press.
- Scott, J. C. (1976). *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. Yale University Press.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

## **BAB V**

### **SISTEM RELIGI**

#### **A. Pengantar Umum**

Religi atau agama merupakan salah satu unsur paling universal dalam kebudayaan manusia. Hampir semua kelompok masyarakat, baik yang sederhana maupun kompleks, memiliki bentuk keyakinan terhadap kekuatan gaib atau transenden yang diyakini mengatur tatanan hidup mereka. Dalam pandangan antropologi budaya, sistem religi bukan hanya tentang ritual dan kepercayaan, tetapi juga mencerminkan sistem nilai, norma, serta struktur sosial masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Sistem religi dapat dipahami sebagai keseluruhan kepercayaan, praktik, simbol, dan lembaga yang berkaitan dengan keyakinan akan hal-hal adikodrati. Clifford Geertz (1973) menyatakan bahwa agama adalah sistem simbol yang bertujuan untuk membentuk suasana hati dan motivasi yang kuat, permanen, dan mendalam pada manusia dengan menciptakan konsep tentang tatanan umum eksistensi. Oleh karena itu, religi bukan hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menjadi landasan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan multireligius, sistem religi berfungsi sebagai pengikat sosial dan sarana legitimasi budaya. Masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki tradisi keagamaan yang unik, baik yang berakar pada

agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maupun sistem kepercayaan lokal seperti kejawen, aluk to dolo, marapu, dan lainnya. Keberagaman ini memperkaya khasanah kultural bangsa, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan toleransi yang tinggi antar kelompok (Abdullah, 2006).

Sistem religi berkembang dalam konteks sejarah, lingkungan, dan struktur sosial masyarakat. Dalam masyarakat tradisional, religi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi, politik, dan hukum. Misalnya, pada masyarakat Bali, sistem keagamaan Hindu menyatu erat dengan sistem kasta, ritual pertanian, dan relasi sosial dalam banjar (Geertz, 1960). Hal ini menunjukkan bahwa religi merupakan institusi sosial yang mendalam dan melekat dalam sistem sosial budaya.

Fungsi sistem religi dalam masyarakat sangat kompleks. Ia memberikan penjelasan tentang asal-usul manusia dan alam semesta, menetapkan tatanan moral, memberikan harapan dalam menghadapi penderitaan, serta menyediakan struktur simbolik untuk merayakan siklus hidup manusia, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian (Durkheim, 1912/2001). Religi juga menjadi kekuatan yang menyatukan kelompok dan menumbuhkan solidaritas sosial, sebagaimana ditunjukkan dalam teori fungsionalisme Durkheim.

Namun demikian, sistem religi tidak statis. Ia mengalami transformasi seiring perubahan sosial dan perkembangan zaman. Proses modernisasi dan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi

eksistensi religiositas tradisional. Di satu sisi, terjadi revitalisasi keagamaan yang menguat, tetapi di sisi lain muncul pula fenomena sekularisasi, terutama di kalangan masyarakat urban dan terdidik (Berger, 1990). Perubahan ini mendorong terjadinya redefinisi peran agama dalam ruang publik.

Di Indonesia, sistem religi memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional dan kebijakan negara. Pengakuan terhadap enam agama resmi oleh negara menjadi cerminan dari upaya kompromi antara pluralisme dan pengaturan keagamaan. Sementara itu, kepercayaan lokal masih menghadapi tantangan dalam hal pengakuan dan perlindungan hukum. Ini menunjukkan adanya dinamika relasi antara sistem religi masyarakat dan struktur negara modern (Lindsey & Pausacker, 2016). Sistem religi juga membentuk nilai-nilai budaya lokal. Dalam masyarakat Bugis misalnya, ajaran agama Islam berinteraksi dengan nilai siri' na pacce yang menjadi identitas etis dan moral. Begitu pula di Tana Toraja, ajaran Kristen bersinergi dengan nilai-nilai adat dalam praktik ritual kematian. Interaksi antara agama dan budaya lokal ini menciptakan bentuk religiositas yang khas dan kontekstual (Mahmud, 2013).

Selain itu, religi berperan dalam reproduksi simbolik melalui seni, bahasa, arsitektur, dan kesusastraan. Masjid, pura, gereja, dan rumah adat bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga artefak budaya yang menyimpan makna simbolik mendalam. Ritual-ritual keagamaan seperti upacara Ngaben di Bali, Idul

Fitri di kalangan Muslim, atau Natal di komunitas Kristen menjadi sarana ekspresi budaya sekaligus memperkuat solidaritas sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Dalam masyarakat kontemporer, teknologi dan media sosial menjadi ruang baru bagi ekspresi religius. Fenomena dakwah digital, komunitas keagamaan daring, serta tren spiritualitas pribadi menunjukkan bahwa sistem religi telah merambah ke ruang virtual. Namun demikian, muncul pula tantangan seperti penyebaran paham ekstremisme, hoaks keagamaan, dan polarisasi sosial berbasis keyakinan (Campbell, 2010). Ini menegaskan pentingnya literasi keagamaan di era digital.

Religi juga menjadi sumber inspirasi gerakan sosial dan politik. Dalam sejarah Indonesia, tokoh-tokoh religius memainkan peran penting dalam pergerakan kemerdekaan dan reformasi sosial. Peran pesantren, gereja, dan lembaga keagamaan lainnya dalam pemberdayaan masyarakat menunjukkan bahwa agama dapat menjadi kekuatan progresif dalam pembangunan sosial (Hefner, 2000).

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sistem religi juga bisa menjadi sumber konflik jika tidak dikelola secara bijak. Perbedaan tafsir, eksklusivisme doktrinal, dan politisasi agama berpotensi memecah belah masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interreligius dan dialog antarumat beragama menjadi sangat penting untuk membangun kohesi sosial di tengah keberagaman (Abdillah, 2001).

Di ranah akademik, studi tentang religi terus berkembang dengan pendekatan lintas disiplin. Antropologi, sosiologi, sejarah, bahkan ilmu komunikasi dan psikologi turut mengkaji aspek-aspek religi. Pendekatan ini memperkaya pemahaman kita bahwa agama bukan entitas tunggal, melainkan sistem yang kompleks dan terhubung dengan aspek kehidupan lainnya (Pals, 2015).

Pendidikan sistem religi dalam konteks Indonesia perlu diarahkan tidak hanya untuk penguatan iman, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, toleransi, dan kepekaan sosial. Kurikulum pendidikan agama perlu dikembangkan agar inklusif dan reflektif terhadap realitas pluralisme bangsa, sehingga mampu menjawab tantangan kehidupan beragama di era global (Azra, 2002).

Akhirnya, sistem religi dalam masyarakat Indonesia adalah wajah dari keragaman dan keberlanjutan budaya. Ia tidak hanya mencerminkan relasi manusia dengan yang Ilahi, tetapi juga menjadi cermin dari bagaimana manusia membangun peradaban yang bermartabat. Memahami sistem religi berarti membuka jendela untuk melihat dinamika kebudayaan dalam wujud yang paling mendalam.

## **B. Pengertian Sistem Religi**

Sistem religi merupakan salah satu unsur pokok dalam struktur sosial budaya manusia yang mencerminkan hubungan antara manusia dan kekuatan adikodrati. Dalam konteks antropologi, sistem religi dipahami sebagai keseluruhan sistem keyakinan dan

praktik keagamaan yang berkembang dalam suatu kebudayaan. Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa religi adalah sistem yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan religius, upacara keagamaan, dan pranata-pranata sosial yang mendukungnya, serta para tokoh spiritual yang menjadi penghubung antara masyarakat dan dunia gaib.

Religi berakar dari kebutuhan manusia untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat diterangkan oleh logika semata. Dalam hal ini, sistem religi bukan hanya sekadar kepercayaan terhadap Tuhan atau roh, tetapi juga mencakup simbol, ritus, mitos, dan nilai-nilai moral yang mengatur kehidupan sosial. Clifford Geertz (1973) mendefinisikan agama sebagai sistem simbol yang membentuk suasana hati dan motivasi dengan menetapkan pandangan hidup yang menyeluruh. Simbol-simbol tersebut berfungsi untuk memberikan makna atas pengalaman manusia yang seringkali tidak dapat dijelaskan oleh sains.

Dalam sistem religi, terdapat struktur yang meliputi kepercayaan terhadap sesuatu yang sakral, pelaku atau tokoh keagamaan, serta ritual atau praktik keagamaan yang dilakukan secara kolektif. Durkheim (1912/2001) menyatakan bahwa sistem religi adalah suatu sistem solidaritas sosial yang menciptakan kohesi masyarakat melalui praktik kolektif terhadap sesuatu yang dianggap suci. Religi dalam hal ini memainkan peran sebagai penopang struktur sosial, bahkan menjadi dasar pembentukan norma dan nilai dalam masyarakat.

Selain itu, sistem religi juga mencerminkan struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam beberapa kebudayaan, otoritas religius sering kali bersifat sakral dan menjadi sumber legitimasi bagi kepemimpinan politik. Contoh klasik dapat ditemukan dalam sistem kerajaan tradisional di Nusantara, seperti Kerajaan Mataram Islam, di mana raja dipandang sebagai wakil Tuhan di bumi (Ricklefs, 2007). Hal ini menunjukkan bahwa sistem religi tidak berdiri sendiri, melainkan terjalin erat dengan institusi sosial lainnya.

Pengertian sistem religi harus dipahami secara holistik karena menyangkut relasi antara manusia dengan realitas transenden serta dampaknya terhadap tatanan sosial. Sistem ini mencakup aspek kepercayaan (belief), praktik (ritual), pengalaman spiritual, dan institusi keagamaan yang menopangnya. Menurut Pals (2015), studi sistem religi modern menggabungkan pendekatan teologis, antropologis, dan sosiologis untuk menjelaskan peran agama dalam kehidupan manusia secara menyeluruh.

Setiap kebudayaan memiliki bentuk sistem religi yang khas. Di Indonesia, sistem religi berkembang dalam bentuk yang sangat beragam, dari agama-agama dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, hingga sistem kepercayaan lokal seperti Parmalim, Kaharingan, Aluk Todolo, dan kejawen. Keberagaman ini mencerminkan pluralisme budaya Indonesia dan sekaligus menjadi tantangan dalam menjaga toleransi dan harmoni sosial (Azra, 2002).

Sistem religi juga dapat dilihat sebagai sistem nilai yang memandu tindakan manusia. Ia memberikan

pedoman moral dan etika dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari relasi keluarga, ekonomi, hingga politik. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai kontrol sosial yang efektif. Fungsi ini sejalan dengan pandangan Weber (1930), yang melihat agama sebagai kekuatan yang mampu membentuk etos kerja dan struktur ekonomi masyarakat.

Tidak hanya berhenti pada aspek normatif, sistem religi juga menjadi wadah ekspresi estetis dan kultural. Seni, arsitektur, musik, dan sastra sering kali memiliki akar religius. Candi, masjid, gereja, pura, dan rumah adat sering dibangun dengan simbolisme religius yang dalam, mencerminkan sistem kepercayaan masyarakat yang bersangkutan (Koentjaraningrat, 2009). Dalam hal ini, religi tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memperkaya dimensi kultural suatu masyarakat.

Religi juga mengandung aspek spiritualitas personal, yang mencerminkan hubungan batiniah manusia dengan Tuhannya. Dalam banyak tradisi, praktik meditasi, doa, atau zikir menjadi sarana pembentukan karakter dan kedamaian batin. Geertz (1960) dalam studi tentang agama di Jawa menyebutkan bahwa ekspresi religius sering kali mengambil bentuk sinkretik, menggabungkan unsur-unsur Islam, Hindu-Buddha, dan animisme dalam praktik spiritual yang sangat lokal.

Dalam masyarakat modern, sistem religi mengalami tantangan besar akibat proses sekularisasi dan globalisasi. Banyak individu mengalami pergeseran dalam pola keagamaan, dari religiusitas

kolektif menuju spiritualitas yang lebih individualistik. Berger (1990) menyatakan bahwa dalam masyarakat modern, agama tidak lagi menjadi satu-satunya sumber makna, tetapi bersaing dengan sains, ideologi, dan budaya populer. Ini menunjukkan perlunya pembaruan cara pandang terhadap agama agar tetap relevan.

Transformasi sistem religi juga terlihat dari bagaimana agama diinstitusikan. Saat ini, banyak lembaga keagamaan mengembangkan peran sosial yang lebih luas, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan advokasi sosial. Lembaga keagamaan menjadi aktor pembangunan, tidak hanya dalam bidang spiritual tetapi juga sosial-politik. Hal ini menunjukkan fleksibilitas sistem religi dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Hefner, 2000).

Sistem religi juga berperan dalam merespon bencana, krisis, dan perubahan besar dalam masyarakat. Dalam konteks pandemi atau bencana alam, kehadiran tokoh agama dan komunitas keagamaan menjadi penting dalam memberikan ketenangan, solidaritas, dan harapan. Peran ini membuktikan bahwa religi bukan sekadar kepercayaan metafisis, tetapi juga mekanisme sosial untuk membangun daya tahan kolektif (Abdullah, 2006).

Penting untuk dicatat bahwa sistem religi bukan entitas yang statis, melainkan dinamis dan kontekstual. Setiap era melahirkan bentuk dan ekspresi religiusitas yang baru. Maka dari itu, studi tentang sistem religi harus terus dikembangkan dengan pendekatan kritis dan multidisipliner agar mampu

menjelaskan kompleksitas kehidupan beragama dalam masyarakat (Pals, 2015).

Dengan memahami pengertian sistem religi secara mendalam, kita dapat melihat bagaimana agama memainkan peran strategis dalam membentuk struktur sosial, nilai budaya, dan identitas kolektif. Dalam konteks Indonesia yang plural, pemahaman ini sangat penting untuk membangun harmoni antar umat dan memperkuat fondasi kehidupan berbangsa yang berkeadaban.

### **C. Ragam Sistem Religi di Indonesia**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama dan kepercayaan yang menjadi bagian penting dari sistem sosial budayanya. Keberagaman ini terbentuk melalui proses sejarah panjang, interaksi lintas budaya, serta adaptasi terhadap nilai-nilai lokal yang terus berkembang. Sistem religi di Indonesia tidak hanya mencakup agama-agama besar dunia seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, tetapi juga meliputi kepercayaan-kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan, Kaharingan, dan Marapu yang hingga kini masih dianut oleh sebagian masyarakat (Koentjaraningrat, 2009).

Agama-agama besar yang masuk ke Indonesia membawa doktrin, praktik ibadah, dan struktur kelembagaan yang berinteraksi dengan budaya lokal. Misalnya, Islam yang masuk melalui jalur perdagangan di abad ke-13 mengalami proses akulturasi dengan budaya Hindu-Buddha dan animisme sebelumnya, menghasilkan bentuk Islam

Nusantara yang lebih toleran dan kontekstual (Azra, 2004). Demikian pula dengan Kristen yang berkembang pesat di Indonesia bagian timur, menyatu dengan struktur adat setempat.

Hindu dan Buddha, sebagai agama yang lebih dahulu masuk, telah membentuk fondasi spiritual masyarakat Indonesia kuno. Peninggalan-peninggalan seperti Candi Borobudur dan Prambanan adalah bukti konkret dari kekuatan sistem religi ini pada masa lalu. Meskipun secara populasi pemeluknya tidak sebanyak Islam dan Kristen, Hindu tetap berkembang terutama di Bali dengan sistem kasta dan ritual yang kental serta menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat setempat (Geertz, 1973).

Kepercayaan lokal atau religi suku menjadi komponen penting dalam memahami keragaman sistem religi di Indonesia. Kepercayaan ini berakar pada mitologi, penghormatan terhadap leluhur, serta praktik magis-religius yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sistem religi lokal ini menunjukkan bahwa spiritualitas tidak selalu berada dalam kerangka agama formal, melainkan bisa berbentuk sistem kepercayaan yang hidup dalam struktur sosial tradisional (Endraswara, 2006).

Dalam konteks masyarakat adat, sistem religi tidak terpisah dari struktur sosial dan lingkungan alam. Masyarakat Dayak misalnya, memiliki konsep kosmologi yang mengatur hubungan manusia dengan roh leluhur dan alam semesta, yang diekspresikan dalam ritual panen, pernikahan, dan kematian (Tsing,

2005). Religi menjadi pedoman moral sekaligus mekanisme sosial untuk menjaga keseimbangan hidup.

Di beberapa daerah, praktik sinkretisme terlihat jelas dalam ritual keagamaan. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, upacara slametan merupakan bentuk perpaduan antara nilai Islam, Hindu-Buddha, dan kepercayaan lokal yang mencerminkan kelenturan masyarakat dalam mengelola perbedaan religius (Geertz, 1960). Praktik ini memperlihatkan bahwa sistem religi tidak statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Sistem religi di Indonesia juga mengalami transformasi akibat modernisasi dan globalisasi. Perubahan gaya hidup, pendidikan, serta perkembangan media sosial turut memengaruhi cara masyarakat memaknai dan menjalankan kepercayaan mereka. Dalam beberapa kasus, munculnya fundamentalisme atau eksklusivisme keagamaan menjadi tantangan tersendiri dalam masyarakat multikultural (Barker, 2008).

Namun demikian, negara melalui Pancasila berperan sebagai kerangka normatif yang mengakui keberagaman agama. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini memperkuat eksistensi berbagai sistem religi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan agama yang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi sarana penting dalam membentuk

pemahaman lintas iman. Kurikulum yang mengajarkan toleransi dan kerukunan beragama menjadi salah satu strategi sosial untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman sistem religi yang ada.

Peran tokoh agama dan pemuka adat juga sangat penting dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama. Mereka menjadi jembatan komunikasi antara nilai-nilai keagamaan dengan norma sosial masyarakat. Dalam beberapa kasus, seperti konflik horizontal yang berakar dari isu agama, keberadaan tokoh-tokoh ini sangat menentukan dalam proses mediasi dan resolusi konflik.

Ragam sistem religi di Indonesia tidak hanya menjadi simbol pluralitas, tetapi juga menunjukkan kekayaan intelektual dan spiritual bangsa. Pengakuan terhadap berbagai bentuk kepercayaan, baik agama resmi maupun lokal, merupakan bagian dari upaya menjaga identitas dan keberlanjutan budaya Indonesia.

Religi dalam masyarakat Indonesia bukan sekadar ekspresi iman, tetapi juga membentuk struktur sosial, sistem hukum tidak tertulis, bahkan cara pandang terhadap kehidupan dan kematian. Ia menjadi instrumen penting dalam proses sosialisasi dan kontrol sosial, serta dalam pembentukan nilai-nilai etika dan moral masyarakat.

Dalam era digital, ragam sistem religi juga mengalami tantangan baru, seperti meningkatnya intoleransi berbasis media sosial. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi sarana edukasi lintas agama dan ruang dialog antar kepercayaan yang lebih inklusif dan terbuka.

Keberagaman sistem religi di Indonesia menegaskan bahwa pluralitas adalah keniscayaan yang dapat dikelola secara positif. Pemahaman terhadap keragaman ini tidak hanya memperkaya wawasan kebudayaan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial bangsa dalam membangun harmoni dan persatuan di tengah perbedaan.

#### **D. Lembaga Keagamaan dan Perannya**

Lembaga keagamaan merupakan bagian penting dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pengawal nilai-nilai spiritual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memainkan peran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural dan multireligius, lembaga keagamaan menjadi mediator penting antara ajaran teologis dan realitas sosial yang dinamis (Koentjaraningrat, 2009).

Secara umum, lembaga keagamaan adalah struktur sosial yang dibentuk untuk memelihara, menyebarkan, dan menegakkan ajaran-ajaran agama tertentu. Fungsi utama dari lembaga ini adalah memberikan bimbingan moral dan spiritual kepada masyarakat serta mengatur tata kehidupan keagamaan, mulai dari pelaksanaan ibadah, perayaan keagamaan, hingga penyelesaian persoalan sosial berdasarkan norma agama (Geertz, 1960). Di Indonesia, keberadaan lembaga-lembaga ini diakui dan bahkan difasilitasi oleh negara, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia

(KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).

Salah satu peran utama lembaga keagamaan adalah sebagai penjaga nilai-nilai luhur dalam masyarakat. Ajaran-ajaran agama yang disosialisasikan melalui lembaga ini menjadi sumber moral kolektif yang menuntun perilaku individu maupun kelompok. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan gotong royong sering kali ditegakkan melalui ceramah keagamaan, pengajian, ataupun pelayanan pastoral (Azra, 2004).

Lembaga keagamaan juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas kultural komunitas. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, agama berfungsi sebagai penanda identitas yang memperkuat rasa solidaritas sosial. Di Bali, misalnya, lembaga keagamaan Hindu menjadi pengikat komunitas melalui ritual-ritual yang menguatkan hubungan antara manusia, alam, dan Tuhan atau yang dikenal sebagai konsep Tri Hita Karana (Eiseman, 1990).

Dalam konteks sosial-politik, lembaga keagamaan di Indonesia sering berperan sebagai agen kontrol sosial. Mereka tidak hanya memberikan legitimasi terhadap norma sosial, tetapi juga menjadi pengkritik terhadap praktik ketidakadilan atau penyimpangan sosial. Ketika terjadi ketimpangan sosial atau konflik horizontal berbasis agama, lembaga keagamaan dapat mengambil peran sebagai penengah dan penyelesaian masalah (Barker, 2008). Peran ini

tampak misalnya dalam respons lembaga keagamaan terhadap isu-isu radikalisme, kekerasan atas nama agama, serta konflik antarumat beragama.

Transformasi sosial juga mendorong lembaga keagamaan untuk melakukan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern. Lembaga keagamaan kini tidak hanya berkutat pada urusan ritual dan ibadah, tetapi juga mulai mengembangkan sayap dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga teknologi informasi. Banyak pesantren yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga keterampilan wirausaha dan teknologi, menunjukkan bahwa lembaga keagamaan ikut menjawab tantangan zaman (Dhofier, 1982).

Lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran multikultural dan toleransi antarumat beragama. Dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia, penting bagi lembaga keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai moderasi, anti-diskriminasi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Program dialog lintas agama, seminar lintas iman, hingga kerja sama sosial lintas agama merupakan contoh konkret peran lembaga keagamaan dalam memelihara kerukunan sosial (Syihab, 2007).

Peran lembaga keagamaan juga semakin menonjol dalam penanganan isu-isu sosial kontemporer seperti kemiskinan, pendidikan, dan lingkungan hidup. Banyak lembaga keagamaan yang mendirikan lembaga amil zakat, yayasan sosial, rumah sakit, dan sekolah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Ini memperlihatkan bahwa agama

tidak hanya berbicara tentang akhirat, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial di dunia (Nasution, 2001).

Hubungan antara negara dan lembaga keagamaan di Indonesia terbilang unik. Negara memberikan pengakuan terhadap enam agama resmi, dan pada saat yang sama menjamin kebebasan beragama. Dalam praktiknya, negara sering kali menggandeng lembaga keagamaan untuk menjalankan program-program sosial, pendidikan, dan pembinaan umat. Namun, relasi ini juga menimbulkan tantangan tersendiri ketika lembaga keagamaan dianggap terlalu dekat atau bahkan menjadi alat legitimasi kekuasaan (Hefner, 2000).

Lembaga keagamaan juga memainkan peran penting dalam proses penyelesaian konflik sosial yang berakar pada sentimen keagamaan. Dalam banyak kasus, keterlibatan tokoh dan lembaga keagamaan dalam mediasi telah membantu menciptakan ruang dialog dan perdamaian. Lembaga seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menjadi contoh bagaimana lembaga keagamaan bisa menjadi alat diplomasi sosial di tingkat lokal.

Di tengah pesatnya arus informasi digital, lembaga keagamaan ditantang untuk tidak ketinggalan dalam menyampaikan dakwah dan ajaran secara relevan dan menarik. Platform digital kini menjadi medium baru penyebaran nilai-nilai keagamaan, dan lembaga keagamaan perlu memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan tidak hanya informatif tetapi juga mencerahkan, damai, dan berimbang (Lim, 2017).

Kritik terhadap lembaga keagamaan juga muncul, terutama jika mereka dianggap eksklusif atau menolak dialog. Dalam masyarakat demokratis, lembaga keagamaan harus mampu menjaga keseimbangan antara dogma dan keterbukaan, serta menjadi tempat belajar bagi umat agar bisa hidup dalam masyarakat yang heterogen secara damai dan produktif (Woodward, 2011).

Peran perempuan dalam lembaga keagamaan juga mulai mengalami perkembangan. Jika dahulu lembaga keagamaan cenderung didominasi laki-laki, kini mulai terlihat keterlibatan perempuan sebagai pengajar, pemimpin komunitas, dan aktivis sosial dalam struktur keagamaan. Ini menjadi indikator penting bahwa lembaga keagamaan tidak lagi tertutup terhadap dinamika gender (Abdullah, 2006).

Di masa depan, lembaga keagamaan akan terus menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Tantangan internal meliputi konsolidasi ajaran, kaderisasi tokoh agama, dan adaptasi terhadap perubahan sosial. Sedangkan tantangan eksternal melibatkan isu global seperti radikalisme, krisis lingkungan, dan perubahan iklim. Lembaga keagamaan harus menjadi bagian dari solusi terhadap berbagai persoalan tersebut, bukan justru memperparahnya.

Dengan demikian, lembaga keagamaan memiliki posisi strategis dan multidimensional dalam masyarakat Indonesia. Tidak hanya sebagai institusi spiritual, tetapi juga sebagai penggerak sosial, pendidik moral, penyalaras konflik, dan penjaga harmoni sosial budaya.

## **E. Daftar Pustaka**

- Abdullah, I. (2006). *Kekuasaan dan Perlawanan dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdillah, M. (2001). *Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: Paramadina.
- Azra, A. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kompas.
- Berger, P. (1990). *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion*. New York: Anchor Books.
- Campbell, H. (2010). *When Religion Meets New Media*. New York: Routledge.
- Durkheim, E. (2001). *The Elementary Forms of Religious Life* (trans. Fields). New York: The Free Press. (Asli 1912).
- Geertz, C. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lindsey, T., & Pausacker, H. (2016). *Religion, Law and Intolerance in Indonesia*. New York: Routledge.
- Mahmud, T. (2013). *Identitas Bugis dan Islam: Perspektif Kultural*. Makassar: Innawa.
- Pals, D. (2015). *Introducing Religion: Readings from the Classic Theorists*. Oxford: Oxford University Press.

## **BAB VI**

### **KESENIAN DAN TRADISI**

#### **A. Pengantar Umum**

Kesenian dan tradisi merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem sosial budaya Indonesia. Keduanya berfungsi sebagai ekspresi kultural yang tidak hanya memperkaya identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga merefleksikan nilai-nilai, norma, dan sejarah yang mereka anut. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, kesenian dan tradisi menjadi instrumen penting dalam membangun jembatan pemahaman antarbudaya serta memperkuat solidaritas sosial (Koentjaraningrat, 2009).

Kesenian dalam konteks kebudayaan bukan hanya berkaitan dengan keindahan atau estetika, tetapi juga sarat dengan makna simbolik yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk seni seperti tari, musik, teater, seni rupa, hingga seni tutur merupakan media komunikasi sosial yang menjembatani pesan-pesan budaya antar generasi (Soedarsono, 1999). Seni tradisional di Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai produk kreatif, melainkan bagian dari ritus sosial dan sistem kepercayaan masyarakat.

Tradisi, di sisi lain, adalah warisan budaya takbenda yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi sering kali berkaitan dengan kebiasaan, kepercayaan, dan tata cara hidup yang telah lama mengakar dalam masyarakat. Menurut Hobsbawm dan Ranger (1983), tradisi bukan sekadar

kebiasaan yang terus dilakukan, melainkan konstruksi sosial yang memiliki legitimasi historis dan moral dalam komunitasnya.

Dalam masyarakat agraris Nusantara, kesenian dan tradisi sering kali menjadi bagian integral dari siklus kehidupan, mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Misalnya, tradisi selamat dalam budaya Jawa, upacara Mapacci dalam budaya Bugis, dan Ngaben dalam budaya Bali adalah contoh bagaimana tradisi dan kesenian berpadu dalam ritual kehidupan masyarakat (Geertz, 1960). Tradisi tersebut tidak hanya memiliki dimensi religius, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antarwarga.

Kesenian di Indonesia juga mencerminkan dinamika historis dan percampuran budaya yang kompleks. Masuknya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen ke wilayah Nusantara membawa pengaruh besar terhadap bentuk dan isi kesenian lokal. Hal ini terlihat dalam bentuk-bentuk seni pertunjukan seperti wayang kulit, tari topeng, hingga musik gamelan yang banyak mengandung unsur spiritual dan filsafat religi (Becker, 1979).

Penting untuk dipahami bahwa kesenian dan tradisi tidak bersifat statis. Keduanya senantiasa mengalami transformasi mengikuti arus zaman. Tradisi yang dulunya bersifat sakral kini banyak dikemas menjadi pertunjukan untuk tujuan pariwisata, pendidikan, dan diplomasi budaya. Meskipun ada kekhawatiran terhadap komersialisasi budaya, dinamika ini juga memperlihatkan kemampuan adaptif

dari tradisi terhadap konteks sosial yang terus berubah (Picard, 1996).

Kesenian dan tradisi juga memainkan peran strategis dalam pembentukan identitas lokal dan nasional. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, keberagaman budaya diakui dan dirayakan sebagai kekayaan bangsa. Festival budaya daerah, pameran kesenian, dan kegiatan pelestarian tradisi lokal menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran identitas nasional yang inklusif (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993).

Tidak kalah pentingnya, kesenian dan tradisi juga berfungsi sebagai alat pendidikan nilai. Melalui cerita rakyat, dongeng, lagu tradisional, dan ritual adat, masyarakat menanamkan nilai-nilai seperti kesetiaan, keberanian, kerja keras, dan kepatuhan kepada norma sosial. Nilai-nilai ini menjadi bagian dari proses sosialisasi budaya sejak usia dini (Spradley, 1997).

Dalam konteks globalisasi, kesenian dan tradisi menghadapi tantangan besar. Arus budaya populer dari luar negeri, terutama melalui media digital, mendorong terjadinya pergeseran nilai dan gaya hidup masyarakat. Di tengah gempuran budaya asing, upaya pelestarian tradisi menjadi semakin mendesak. Perlu adanya sinergi antara lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan tradisi yang menjadi identitas bangsa (UNESCO, 2003).

Peran generasi muda dalam menjaga dan mengembangkan kesenian serta tradisi sangat krusial. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, komunitas seni, dan media sosial, banyak anak muda kini terlibat dalam

proses kreatif yang memadukan unsur tradisi dengan ekspresi kontemporer. Proses ini dapat menjadi strategi efektif untuk merawat tradisi tanpa menghilangkan daya tariknya di era digital (Yampolsky, 2010).

Kesenian dan tradisi juga memiliki kontribusi penting dalam sektor ekonomi kreatif. Berbagai produk seni dan kerajinan tradisional kini menjadi komoditas unggulan yang mendukung ekonomi lokal. Batik, tenun, ukiran kayu, dan pertunjukan seni tradisional menjadi aset budaya sekaligus sumber pendapatan masyarakat (Ministry of Tourism and Creative Economy, 2020).

Namun demikian, tidak semua tradisi dapat diterima tanpa kritik. Beberapa praktik tradisional seperti kekerasan simbolik, diskriminasi gender, atau adat yang bertentangan dengan hak asasi manusia perlu dikaji secara kritis. Pendekatan sosiokultural yang reflektif diperlukan untuk menilai mana tradisi yang masih relevan dan mana yang perlu ditransformasi (Abdullah, 2006).

Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah memberikan payung hukum yang jelas bagi pelestarian dan pengembangan tradisi. Salah satu langkah nyata adalah dengan mendokumentasikan kekayaan budaya takbenda dan mengusulkannya ke UNESCO sebagai warisan dunia. Hal ini menandakan bahwa kesenian dan tradisi tidak hanya penting di tingkat lokal, tetapi juga memiliki makna global.

Dalam perspektif antropologi budaya, kesenian dan tradisi adalah cerminan dari struktur sosial, sistem

nilai, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, mempelajari kesenian dan tradisi bukan sekadar mengenali bentuk-bentuk kebudayaan, tetapi juga memahami cara berpikir, merasakan, dan bertindak dari suatu komunitas (Spradley & McCurdy, 1999).

Dengan demikian, pengantar umum tentang kesenian dan tradisi ini menegaskan bahwa keduanya adalah bagian vital dari sistem sosial budaya Indonesia. Melalui kesenian dan tradisi, kita tidak hanya melihat keragaman ekspresi budaya, tetapi juga menemukan jati diri bangsa yang kaya, adaptif, dan penuh makna.

## **B. Pengertian Kesenian dan Tradisi**

Kesenian dan tradisi adalah dua unsur yang sangat penting dalam sistem sosial budaya Indonesia. Keduanya tidak hanya mencerminkan identitas suatu kelompok masyarakat, tetapi juga merupakan sarana untuk mempertahankan dan meneruskan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Kesenian, dalam hal ini, mencakup berbagai bentuk ekspresi kreatif yang dihasilkan oleh masyarakat, sementara tradisi merujuk pada kebiasaan, kepercayaan, dan praktik sosial yang dilestarikan dalam suatu kelompok masyarakat.

Kesenian, menurut Koentjaraningrat (2009), dapat dipahami sebagai segala bentuk ekspresi budaya yang memiliki unsur estetik yang dihasilkan melalui proses kreatif manusia. Kesenian meliputi berbagai bidang, seperti seni pertunjukan (musik, tari, drama),

seni rupa, seni kerajinan tangan, serta seni sastra. Seni pertunjukan misalnya, tidak hanya mencerminkan nilai-nilai estetika, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan pesan-pesan sosial, politik, atau spiritual. Dengan demikian, kesenian adalah produk budaya yang dihasilkan oleh masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai keindahan, komunikasi, dan pengungkapan jiwa sosial masyarakat.

Tradisi, di sisi lain, lebih merujuk kepada kebiasaan atau adat istiadat yang telah lama berkembang dalam suatu masyarakat. Tradisi, menurut Hobsbawm dan Ranger (1983), bukanlah suatu praktik yang statis, melainkan suatu konstruksi sosial yang terus berkembang, meskipun tetap mempertahankan unsur-unsur dasar yang sudah ada. Tradisi biasanya terkait dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, serta norma-norma sosial yang mengikat masyarakat dalam suatu struktur kehidupan yang harmonis. Seiring waktu, tradisi menjadi pilar yang menjaga keharmonisan antaranggota masyarakat dan memperkuat identitas kelompok.

Tradisi dan kesenian saling terkait erat. Sebagian besar kesenian Indonesia, baik itu tari, musik, maupun bentuk seni lainnya, berasal dari tradisi tertentu yang telah hidup dalam masyarakat selama berabad-abad. Contoh yang jelas adalah seni wayang kulit yang berasal dari budaya Jawa. Wayang kulit bukan hanya sebuah pertunjukan seni, tetapi juga merupakan bagian dari tradisi religi dan sosial yang memuat ajaran-ajaran moral dan filosofi kehidupan. Dengan demikian, kesenian juga berfungsi sebagai alat

untuk mewariskan dan mengajarkan tradisi kepada generasi berikutnya.

Seni tradisional di Indonesia sangat beragam dan terkait erat dengan kepercayaan serta sistem nilai yang ada dalam masyarakat. Sebagai contoh, seni musik di Bali sangat dipengaruhi oleh agama Hindu, dengan berbagai jenis gamelan yang digunakan dalam upacara keagamaan. Di daerah lain, seperti Aceh, seni tari dan musik tradisional banyak berhubungan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai masyarakat Aceh yang sangat menghargai adat dan norma keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesenian di Indonesia tidak hanya berbentuk estetika semata, tetapi juga sangat terikat dengan konteks sosial, budaya, dan religius masyarakat yang menciptakannya.

Menurut Geertz (1960), tradisi bukan hanya melibatkan bentuk fisik dari suatu kebiasaan, tetapi juga menggambarkan makna dan tujuan dari kebiasaan tersebut. Misalnya, dalam upacara adat yang ada di Bali atau Jawa, terdapat nilai-nilai yang lebih mendalam yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Hal ini menjadikan tradisi bukan sekadar perayaan atau acara ritual, tetapi juga sebagai bentuk pertahanan terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Tradisi memberikan stabilitas sosial dan emosional bagi anggota masyarakat dengan memberikan mereka identitas yang kuat dan rasa keterikatan yang mendalam dengan warisan leluhur mereka.

Kesenian dan tradisi juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kohesi sosial di

dalam masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang multikultural, kesenian sering kali menjadi alat pemersatu antar berbagai kelompok etnis dan agama. Kesenian tradisional seperti tari bersama, musik angklung, atau batik dapat digunakan sebagai sarana untuk merayakan keragaman dan memperkuat persatuan. Sebagai contoh, festival budaya yang diadakan di berbagai daerah di Indonesia dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan dan merayakan kesenian tradisional sambil mempromosikan nilai-nilai toleransi dan saling menghormati antar kelompok.

Tradisi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara perubahan dan pelestarian. Dalam masyarakat yang terus berkembang, baik melalui modernisasi maupun globalisasi, tradisi memberikan pijakan bagi masyarakat untuk tetap menjaga jati diri dan identitas budaya mereka. Dalam hal ini, tradisi bertindak sebagai penjaga nilai-nilai luhur yang dapat membantu masyarakat menghadapi tantangan zaman. Namun, seiring dengan kemajuan zaman, ada tantangan dalam menjaga keberlanjutan tradisi. Perubahan-perubahan sosial yang cepat seringkali mempengaruhi kelangsungan tradisi-tradisi lama yang mungkin dianggap ketinggalan zaman atau tidak relevan lagi dengan kehidupan modern.

Namun demikian, kesenian dan tradisi juga dapat berubah dan berkembang mengikuti tuntutan zaman. Sebagai contoh, banyak seniman yang memodernisasi kesenian tradisional untuk menjangkau audiens yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya, pertunjukan wayang kulit yang

awalnya dilakukan dalam konteks religi kini bisa disaksikan sebagai bentuk seni pertunjukan yang lebih komersial dan menghibur, meskipun tetap menjaga elemen-elemen tradisionalnya. Proses ini dikenal dengan istilah "modernisasi budaya", yang memungkinkan kesenian dan tradisi untuk tetap relevan di tengah masyarakat yang semakin global dan terhubung.

Selain itu, tradisi juga memiliki dimensi pedagogis yang sangat penting dalam proses sosialisasi generasi muda. Melalui pelaksanaan tradisi, anak-anak dan generasi muda belajar tentang nilai-nilai moral, etika, dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Upacara adat, seperti pernikahan, khitanan, atau panen, sering kali melibatkan seluruh anggota komunitas yang lebih tua sebagai pengajar, sementara yang muda diajarkan tentang pentingnya menjaga adat istiadat dan menghargai warisan leluhur mereka. Ini menunjukkan bahwa tradisi berfungsi sebagai sistem pendidikan informal yang memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai budaya sejak usia dini.

Tradisi dan kesenian juga penting dalam menciptakan ruang publik yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman dan memperkuat ikatan sosial. Acara-acara kesenian seperti pementasan tari tradisional, pertunjukan musik, atau festival budaya berfungsi sebagai sarana untuk berkumpul dan berinteraksi. Kegiatan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan semata, tetapi juga sebagai ajang untuk mengaktualisasikan identitas

sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam konteks ini, kesenian dan tradisi membentuk bagian dari struktur sosial masyarakat yang mempererat hubungan antar individu dan kelompok.

Dengan demikian, kesenian dan tradisi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan identitas budaya dan sosial Indonesia. Keduanya tidak hanya memberikan wawasan tentang keindahan estetika, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur yang ada dalam masyarakat. Sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia yang kaya, kesenian dan tradisi akan terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman, namun tetap mempertahankan makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya.

### **C. Ragam Bentuk Kesenian Tradisional di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, dan salah satu aspek yang paling menonjol dari kekayaan tersebut adalah kesenian tradisional. Kesenian tradisional Indonesia mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya yang melibatkan unsur-unsur estetika, simbolisme, dan makna filosofis yang mendalam. Kesenian tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai medium untuk menyampaikan nilai-nilai sosial, agama, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu bentuk kesenian tradisional yang sangat terkenal di Indonesia adalah seni tari. Tari tradisional Indonesia memiliki berbagai jenis yang

dapat ditemukan di hampir setiap daerah. Di Bali, misalnya, terdapat tari Barong yang menggambarkan pertarungan antara kekuatan baik dan jahat. Tari ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual yang mendalam, menggambarkan pertempuran kosmik yang melibatkan roh-roh dan kekuatan alam. Menurut Picard (1996), tari Barong ini merupakan salah satu bentuk kesenian yang menggabungkan aspek estetika, religi, dan ritual yang khas dalam budaya Bali.

Selain tari, seni musik tradisional Indonesia juga sangat beragam. Di Jawa, musik gamelan merupakan salah satu warisan budaya yang sangat dihormati. Gamelan, dengan instrumen seperti gong, kendang, dan saron, digunakan dalam berbagai upacara adat dan pertunjukan seni. Gamelan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa, di mana musik ini tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Menurut Koentjaraningrat (2009), gamelan Jawa sangat erat kaitannya dengan pandangan hidup masyarakat, di mana setiap komponen musik memiliki simbolisme tertentu yang menggambarkan keharmonisan alam semesta.

Di luar Jawa, ada pula seni musik tradisional yang sangat unik, seperti musik angklung di Jawa Barat. Angklung adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan. Seni angklung tidak hanya memiliki nilai musikal, tetapi juga berfungsi sebagai alat

komunikasi dan pemersatu dalam komunitas. Kesenian ini sangat terkenal dengan filosofi gotong royong yang terkandung di dalamnya, di mana setiap individu memainkan peranannya untuk menciptakan harmoni dalam kelompok. Musik angklung ini juga telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2010 (UNESCO, 2010).

Seni rupa tradisional Indonesia juga memiliki bentuk yang beragam. Batik, misalnya, merupakan salah satu seni rupa tradisional yang sangat dihargai. Batik tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai simbol status sosial, identitas daerah, dan nilai-nilai budaya. Batik Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan memiliki corak dan filosofi masing-masing yang berbeda. Sebagai contoh, motif batik parang di Yogyakarta memiliki makna tentang kekuatan dan keberanian, sementara motif kawung melambangkan kesucian dan keselarasan (Pigeaud, 1967). Proses pembuatan batik yang memerlukan keterampilan tinggi ini menjadikannya sebagai seni yang sangat dihormati dan diakui di dunia internasional.

Di luar seni rupa dan musik, seni kerajinan tangan juga memiliki tempat yang penting dalam budaya Indonesia. Seni kerajinan tradisional seperti anyaman, ukiran kayu, dan tenun ikat, merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Di Nusa Tenggara Timur, misalnya, tenun ikat adalah seni yang sangat dihargai dan diwariskan turun-temurun. Tenun ikat ini tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga memiliki makna simbolis yang

mendalam, mencerminkan pandangan hidup dan identitas etnis masyarakat setempat (Soedarsono, 1999). Tenun ikat di daerah ini sering digunakan dalam upacara adat dan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di Sumatera, seni ukir kayu sangat berkembang, terutama di Aceh dan Sumatera Barat. Ukiran kayu di Aceh, misalnya, sering digunakan dalam pembangunan rumah adat dan masjid. Ukiran ini tidak hanya memiliki nilai estetika, tetapi juga menggambarkan ajaran-ajaran agama Islam dan nilai-nilai kehidupan yang dihormati oleh masyarakat Aceh. Ukiran kayu ini juga menjadi bagian dari identitas budaya Aceh yang sangat kuat dan dipertahankan hingga saat ini (Zulkarnain, 2003).

Selain seni rupa, seni pertunjukan juga memainkan peran penting dalam kesenian tradisional Indonesia. Salah satu bentuk seni pertunjukan yang sangat terkenal adalah wayang kulit, yang berasal dari Jawa. Wayang kulit adalah seni pertunjukan yang menggunakan boneka kulit yang dipentaskan dengan menggunakan gamelan sebagai pengiring musik. Cerita yang dibawakan dalam wayang kulit sering kali mengandung pesan moral, sosial, dan filosofis yang mendalam. Wayang kulit juga berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat, mengajarkan nilai-nilai kehidupan, seperti kejujuran, keberanian, dan keadilan (Geertz, 1960).

Seni pertunjukan lainnya yang sangat terkenal adalah seni ludruk di Jawa Timur. Ludruk adalah teater tradisional yang menggabungkan unsur humor, drama,

dan musik. Pertunjukan ludruk sering kali menggambarkan kehidupan masyarakat Jawa Timur, dengan cerita-cerita yang mengandung kritik sosial dan politik. Ludruk menjadi media untuk menyampaikan pesan-pesan sosial yang penting bagi masyarakat, terutama dalam konteks kehidupan sehari-hari. Seni ludruk ini sangat populer di kalangan masyarakat, terutama di kalangan rakyat biasa yang sering kali menjadi penonton setia (Satyagraha, 2005).

Selain itu, seni tradisional lainnya yang tak kalah penting adalah seni pertunjukan tari topeng di Bali. Tari topeng ini digunakan dalam berbagai upacara adat dan memiliki peran yang sangat penting dalam ritual keagamaan masyarakat Bali. Dalam tari topeng, penari mengenakan topeng yang menggambarkan karakter-karakter tertentu, seperti dewa, raja, atau tokoh sejarah. Melalui tari topeng, masyarakat Bali dapat mengungkapkan nilai-nilai spiritual dan menghubungkan diri mereka dengan alam roh dan leluhur mereka (Sutresna, 1997).

Dalam konteks masyarakat adat, seni tradisional juga memainkan peran penting dalam upacara adat. Di Papua, misalnya, seni tari tradisional digunakan dalam berbagai upacara adat untuk menghormati leluhur dan memohon keselamatan. Tari tradisional di Papua sering kali melibatkan kostum dan alat musik yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti daun dan kayu. Tari-tarian ini menggambarkan hubungan manusia dengan alam dan roh leluhur yang sangat dihormati oleh masyarakat Papua (Bakker, 2006).

Kesemua bentuk seni tradisional ini tidak hanya menunjukkan keberagaman budaya Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara masa lalu dan masa kini. Seni tradisional Indonesia merupakan cara bagi masyarakat untuk mempertahankan dan merayakan identitas budaya mereka, meskipun tantangan modernisasi dan globalisasi terus mengancam keberlangsungannya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga dan melestarikan kesenian tradisional sebagai bagian integral dari warisan budaya bangsa.

#### **D. Peran Kesenian dan Tradisi dalam Sistem Sosial**

Kesenian dan tradisi di Indonesia tidak hanya sekadar bagian dari ekspresi budaya yang menonjol, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu komponen penting dalam membentuk struktur sosial masyarakat. Dalam konteks sistem sosial budaya Indonesia, keduanya memainkan peran yang sangat vital dalam pembentukan identitas sosial, menjaga kohesi sosial, dan menguatkan nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Kesenian dan tradisi sering kali menjadi sarana untuk memperteguh hubungan antaranggota masyarakat, baik dalam ruang lingkup keluarga, komunitas, maupun dalam masyarakat yang lebih luas.

Salah satu peran utama kesenian dan tradisi adalah sebagai alat untuk mempertahankan identitas budaya. Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, identitas budaya sering kali terancam hilang atau tergeser. Oleh karena itu, kesenian dan tradisi menjadi

sarana penting untuk memperkenalkan, memelihara, dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi penerus. Misalnya, upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian, sering kali diiringi dengan ritual yang penuh dengan seni, baik dalam bentuk musik, tari, maupun drama. Melalui upacara-upacara tersebut, masyarakat tidak hanya merayakan momen penting dalam hidup, tetapi juga memperteguh ikatan sosial dalam komunitas mereka.

Kesenian dan tradisi juga memiliki fungsi sosial yang sangat penting dalam mengatur interaksi antarindividu dan kelompok. Dalam banyak masyarakat adat, tradisi dan seni memainkan peran dalam menciptakan norma sosial yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat. Sebagai contoh, dalam kehidupan masyarakat Bali, tari-tarian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan etika yang penting bagi kehidupan sosial. Menurut Picard (1996), seni pertunjukan di Bali, seperti tari Kecak, memiliki nilai ritual yang sangat penting, dan dalam praktiknya, seni ini menjadi sarana untuk membangun kesatuan dan kerukunan sosial.

Selain itu, seni dan tradisi juga berfungsi sebagai alat untuk mempererat hubungan antar kelompok atau individu dalam suatu komunitas. Dalam masyarakat Jawa, misalnya, seni gamelan digunakan tidak hanya dalam acara-acara hiburan, tetapi juga dalam upacara penting seperti pernikahan atau

pembukaan acara resmi. Gamelan, dengan suara harmonisnya, mampu menciptakan ikatan emosional antaranggota masyarakat yang terlibat dalam pertunjukan atau upacara tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seni, dalam bentuk apapun, berfungsi sebagai perekat sosial yang memfasilitasi komunikasi antara anggota masyarakat.

Kesenian dan tradisi dalam masyarakat Indonesia juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam banyak hal, tradisi dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sosial yang membantu mencegah terjadinya konflik atau kekacauan dalam masyarakat. Sebagai contoh, dalam banyak komunitas adat di Indonesia, sistem adat yang dijalankan bersama dengan seni dan tradisi menjadi sarana untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat yang sering diiringi dengan ritual atau pertunjukan seni menjadi media untuk menegakkan aturan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam sistem hukum adat yang berlaku di banyak daerah, yang menggabungkan norma sosial, hukum, dan nilai-nilai agama melalui praktik seni dan tradisi.

Dalam banyak kasus, seni dan tradisi juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan kritik sosial. Seni pertunjukan, seperti teater tradisional, sering kali mengandung pesan yang bersifat satir atau mengkritik ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya, seni ludruk di Jawa Timur, yang dikenal dengan unsur humor dan kritik sosialnya, sering kali digunakan untuk mengungkapkan masalah

sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan kekuasaan. Melalui cara yang menghibur, seni ludruk dapat menyampaikan kritik kepada masyarakat dan penguasa tanpa menimbulkan ketegangan atau perpecahan (Satyagraha, 2005). Dalam hal ini, seni bukan hanya menjadi alat hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial melalui kritik konstruktif.

Selain itu, kesenian dan tradisi juga memainkan peran penting dalam proses transmisi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam masyarakat. Di Bali, misalnya, seni tari dan musik sangat terkait dengan ajaran Hindu yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Bali. Setiap tari dan musik yang dipentaskan memiliki makna simbolis yang mendalam yang mengacu pada ajaran agama. Tari Barong, misalnya, menggambarkan pertarungan antara kekuatan baik dan jahat, yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat Bali yang sangat religius dan spiritual. Dalam konteks ini, kesenian tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai media penyebaran ajaran agama dan nilai-nilai moral yang diterima dalam masyarakat (Geertz, 1960).

Pentingnya peran kesenian dan tradisi dalam sistem sosial budaya Indonesia juga terlihat dalam cara masyarakat mengorganisasi kehidupan sosial mereka. Di banyak daerah di Indonesia, tradisi dan seni digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari acara adat hingga kegiatan sosial sehari-hari. Seni tari, misalnya, sering kali menjadi bagian integral dalam perayaan hari besar atau acara komunitas, yang

membantu memperkuat ikatan antaranggota masyarakat dan menjaga kerukunan sosial. Dalam hal ini, kesenian dan tradisi berfungsi sebagai sarana untuk memperkokoh solidaritas sosial, membangun kebersamaan, dan mempererat hubungan antaranggota masyarakat.

Selain itu, kesenian dan tradisi juga memainkan peran penting dalam memperkuat rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap budaya Indonesia. Seni dan tradisi tradisional, meskipun sering kali dipengaruhi oleh perkembangan zaman, tetap menjadi simbol identitas budaya bangsa yang tak tergantikan. Melalui kesenian tradisional, masyarakat dapat mengenali kembali akar budaya mereka dan menumbuhkan rasa cinta tanah air yang lebih dalam. Seni dan tradisi menjadi alat untuk menyatukan keberagaman budaya yang ada di Indonesia, dengan semua suku dan etnis yang memiliki bentuk seni dan tradisi mereka sendiri.

Kesenian dan tradisi juga memiliki nilai ekonomis dalam sistem sosial budaya Indonesia. Banyak seni tradisional yang, selain berfungsi sebagai alat komunikasi sosial dan budaya, juga berperan dalam perekonomian lokal. Misalnya, seni batik yang tidak hanya dihargai sebagai karya seni, tetapi juga sebagai produk yang memiliki nilai jual tinggi di pasar domestik dan internasional. Pembuatan dan penjualan batik menjadi sumber pendapatan bagi banyak pengrajin di daerah-daerah penghasil batik seperti Yogyakarta, Solo, dan Pekalongan. Dalam hal ini, kesenian tradisional berfungsi sebagai bentuk ekonomi

kreatif yang memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat lokal.

Seni dan tradisi juga memberikan kontribusi dalam bidang pariwisata, di mana banyak wisatawan datang ke Indonesia untuk mengapresiasi kesenian dan tradisi yang ada. Tari kecak di Bali, batik di Yogyakarta, atau seni ukir kayu di Bali adalah contoh dari seni tradisional yang menjadi daya tarik wisatawan. Melalui pariwisata, kesenian dan tradisi dapat terus dilestarikan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam sektor pariwisata.

Akhirnya, kesenian dan tradisi dalam sistem sosial budaya Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memelihara dan memperkuat sistem sosial masyarakat. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga identitas budaya, mempererat hubungan sosial, menyampaikan kritik sosial, dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Oleh karena itu, melestarikan dan merawat kesenian serta tradisi adalah langkah penting dalam menjaga keberlanjutan budaya Indonesia, agar dapat terus berkembang dan dinikmati oleh generasi yang akan datang.

## E. Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. (2006). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Becker, Judith. (1979). *Traditional Music in Modern Java*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1993). *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Geertz, Clifford. (1960). *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence (eds.). (1983). *The Invention of Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ministry of Tourism and Creative Economy. (2020). *Indonesian Creative Economy Outlook*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Picard, Michel. (1996). *Bali: Cultural Tourism and Touristic Culture*. Singapore: Archipelago Press.
- Soedarsono. (1999). *Seni Pertunjukan Indonesia dalam Perspektif Sejarah, Budaya dan Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Spradley, James P. (1997). *The Ethnographic Interview*. New York: Harcourt Brace Jovanovich College.
- Spradley, J. P. & McCurdy, D. W. (1999). *Conformity and Conflict: Readings in Cultural Anthropology*. New York: HarperCollins.
- UNESCO. (2003). *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*. Paris: UNESCO.
- Yampolsky, Philip. (2010). *Music and Media in Local Life: Music and Culture in Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

## **BAB VII**

### **BAHASA DAN KOMUNIKASI**

#### **A. Pengantar Umum**

Bahasa dan komunikasi merupakan dua elemen dasar yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sosial manusia. Bahasa berfungsi sebagai alat utama dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan kehendak, sedangkan komunikasi mencakup proses penyampaian dan pertukaran pesan antara individu atau kelompok. Dalam sistem sosial budaya, bahasa dan komunikasi menjadi fondasi bagi terbentuknya interaksi sosial yang bermakna (Chaika, 1982).

Secara antropologis, bahasa tidak hanya dianggap sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya. Setiap masyarakat memiliki ragam bahasa atau dialek yang mencerminkan struktur sosial, nilai, dan norma yang dianut oleh komunitas tersebut. Sapir (1921) menekankan bahwa bahasa adalah medium utama di mana budaya diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Komunikasi tidak selalu bersifat verbal. Dalam praktik sosial budaya, komunikasi nonverbal seperti gerak tubuh, ekspresi wajah, simbol-simbol, hingga pakaian memiliki makna sosial yang mendalam. Hall (1976) menyebutkan bahwa komunikasi nonverbal sering kali lebih kuat dalam membentuk persepsi dan respons sosial dibandingkan komunikasi verbal.

Bahasa dalam masyarakat Indonesia sangat beragam. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang hidup dan digunakan oleh masyarakat dari berbagai etnis. Keberagaman ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia, sekaligus tantangan dalam membangun komunikasi nasional yang efektif (Kridalaksana, 1982).

Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai kelompok etnis. Sejak dikukuhkan dalam Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia menjadi simbol integrasi dan alat komunikasi antarwilayah yang mampu menghubungkan perbedaan budaya di seluruh nusantara (Moeliono, 1988).

Komunikasi dalam masyarakat tidak lepas dari konteks sosial dan budaya. Setiap komunikasi memiliki makna yang tergantung pada situasi, hubungan antar pelaku, serta tujuan komunikasi itu sendiri. Gumperz (1982) menekankan pentingnya kompetensi komunikatif, yaitu kemampuan memahami konteks sosial dalam proses komunikasi.

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, kemampuan berkomunikasi antarbudaya sangat diperlukan. Kesalahpahaman sering terjadi bukan karena perbedaan bahasa secara literal, melainkan karena perbedaan nilai dan interpretasi simbol dalam budaya. Tingkat keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh sensitivitas budaya para komunikatornya (Samovar et al., 2010).

Bahasa juga berperan dalam proses sosial seperti pendidikan, hukum, politik, dan keagamaan.

Dalam konteks pendidikan, bahasa adalah media utama dalam mentransfer pengetahuan dan nilai-nilai sosial. Dalam hukum, bahasa digunakan untuk merumuskan norma dan peraturan yang mengikat (Sudaryanto, 1993).

Media massa sebagai agen sosial juga sangat berpengaruh dalam membentuk pola komunikasi masyarakat. Bahasa yang digunakan dalam media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk opini publik dan memengaruhi wacana sosial. Oleh karena itu, pemilihan bahasa dalam media perlu mempertimbangkan aspek etika dan budaya (Eriyanto, 2005).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem komunikasi sosial. Bahasa digital seperti emoji, akronim, dan bahasa singkatan menjadi bagian dari komunikasi kontemporer yang sering digunakan oleh generasi muda. Fenomena ini menandai pergeseran bentuk komunikasi dari konvensional ke digital (Crystal, 2006).

Bahasa juga memainkan peran ideologis. Melalui bahasa, kekuasaan dapat dipertahankan atau dilawan. Wacana yang dominan dalam masyarakat sering kali merefleksikan kepentingan kelompok tertentu. Fairclough (1995) dalam kajian analisis wacana kritis menekankan pentingnya memahami bahasa sebagai instrumen kekuasaan dan dominasi.

Dalam masyarakat adat, bahasa lokal tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian pengetahuan lokal (local

wisdom). Cerita rakyat, mantra, pantun, dan peribahasa merupakan bentuk ekspresi budaya yang diwariskan melalui bahasa (Koentjaraningrat, 1994).

Namun demikian, globalisasi telah membawa tantangan besar terhadap kelestarian bahasa daerah. Banyak bahasa lokal yang terancam punah karena tidak lagi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. UNESCO (2010) mencatat bahwa Indonesia termasuk negara dengan jumlah bahasa terancam punah tertinggi di dunia.

Upaya pelestarian bahasa dan komunikasi lokal harus menjadi bagian dari kebijakan kebudayaan nasional. Penguatan pendidikan bahasa daerah, dokumentasi bahasa, serta revitalisasi budaya tutur harus menjadi agenda prioritas agar tidak terjadi pemutusan warisan budaya antar generasi (Abdullah, 2006).

Secara keseluruhan, bahasa dan komunikasi merupakan jantung dari sistem sosial budaya. Tanpa bahasa, tidak akan ada pemaknaan sosial. Tanpa komunikasi, nilai dan norma tidak akan tersampaikan. Oleh karena itu, memahami bahasa dan komunikasi bukan sekadar memahami alat, tetapi juga memahami struktur kehidupan sosial manusia secara menyeluruh.

## **B. Pengertian Bahasa dan Komunikasi**

Bahasa adalah sistem simbolik yang digunakan manusia untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Bahasa mencerminkan pola pikir dan cara pandang suatu masyarakat terhadap dunia di sekitarnya. Edward Sapir (1921) menyebutkan bahwa

bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi, tetapi juga produk budaya dan penentu cara berpikir manusia.

Setiap bahasa mengandung sistem tanda yang kompleks, mencakup bunyi (fonem), struktur kata (morfem), dan aturan tata bahasa (sintaksis). Bahasa beroperasi sebagai sistem yang terstruktur dan bermakna, di mana simbol-simbol linguistik digunakan untuk merepresentasikan objek, konsep, atau tindakan. Ferdinand de Saussure (1916) membedakan antara *langue* (sistem bahasa) dan *parole* (pemakaian bahasa), yang menunjukkan bahwa bahasa memiliki struktur dan konteks penggunaannya.

Bahasa juga berfungsi sebagai pengikat identitas sosial dan budaya. Melalui bahasa, seseorang dikenali sebagai bagian dari suatu komunitas atau kelompok sosial tertentu. Ini berarti bahasa memiliki dimensi ideologis, karena dapat mencerminkan status sosial, kekuasaan, bahkan resistensi terhadap dominasi budaya lain (Fairclough, 1995).

Di sisi lain, komunikasi mencakup keseluruhan proses penyampaian pesan, baik verbal maupun nonverbal, antara pengirim dan penerima dalam suatu konteks sosial. Komunikasi adalah aktivitas yang menyertai hampir seluruh tindakan manusia dan menjadi dasar dari semua bentuk interaksi sosial (Littlejohn & Foss, 2009). Dengan demikian, bahasa merupakan bagian dari komunikasi, namun komunikasi tidak terbatas pada bahasa saja.

Komunikasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk: lisan, tulisan, visual, dan simbolik. Dalam

komunikasi nonverbal, misalnya, ekspresi wajah, gerakan tubuh, nada suara, dan simbol budaya seperti pakaian atau warna juga menyampaikan pesan tertentu yang dapat dimaknai oleh penerima pesan (Burgoon et al., 2016).

Dalam pandangan antropologi linguistik, bahasa dan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial budaya. Gumperz dan Hymes (1972) memperkenalkan konsep *komunikasi lintas budaya*, yang menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa sangat dipengaruhi oleh aturan budaya yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, cara berbicara orang Bugis yang halus dan penuh basa-basi mencerminkan nilai *siri* dan *peśé* dalam budaya mereka.

Bahasa tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan selalu berubah seiring dengan perkembangan masyarakat. Perubahan bahasa ini bisa terjadi karena kontak budaya, teknologi, dan globalisasi. Munculnya bahasa gaul atau slang, penggunaan singkatan dalam media sosial, serta munculnya kata serapan dari bahasa asing merupakan contoh konkret dari dinamika bahasa dalam masyarakat modern (Crystal, 2003).

Komunikasi dalam masyarakat juga mencerminkan struktur sosial yang ada. Dalam masyarakat hierarkis, pola komunikasi sering kali bersifat vertikal, di mana atasan lebih dominan dalam menyampaikan pesan dibandingkan bawahan. Hal ini berbeda dengan masyarakat egaliter yang cenderung menggunakan komunikasi horizontal, di mana pertukaran pesan berlangsung lebih terbuka dan setara (Rogers, 2003).

Bahasa juga digunakan untuk melestarikan dan mewariskan nilai-nilai budaya. Melalui cerita rakyat, mitos, legenda, dan peribahasa, suatu masyarakat menanamkan norma, etika, dan identitas budaya kepada generasi muda. Koentjaraningrat (2009) menyebutkan bahwa bahasa adalah wadah bagi ekspresi budaya lokal dan tradisi lisan yang menjadi fondasi kehidupan sosial.

Dalam konteks pendidikan, bahasa berfungsi sebagai medium utama untuk mentransfer pengetahuan. Penguasaan bahasa yang baik menjadi prasyarat untuk memahami ilmu pengetahuan, berpikir kritis, dan berargumentasi secara logis. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi bahasa sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang literat dan berdaya saing (Halliday, 1985).

Bahasa juga memiliki dimensi politik. Pilihan bahasa dalam kebijakan publik, pendidikan, atau media massa sering kali menunjukkan preferensi ideologis dan arah politik tertentu. Penggunaan bahasa nasional, misalnya, menjadi instrumen integrasi nasional, tetapi juga bisa menimbulkan konflik linguistik jika tidak disertai penghormatan terhadap bahasa daerah (Anderson, 2006).

Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang efektif sangat penting untuk membangun relasi interpersonal yang harmonis. Hambatan komunikasi seperti perbedaan persepsi, ketidaksesuaian bahasa, dan noise dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik sosial. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi menjadi bagian penting dari kecerdasan

sosial yang harus dimiliki setiap individu (Gudykunst, 2004).

Teknologi komunikasi digital saat ini telah mengubah cara manusia berinteraksi. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya mempercepat proses pertukaran pesan dan memperluas jangkauan komunikasi lintas ruang dan waktu. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti misinformasi, hilangnya konteks budaya, dan degradasi tata bahasa (Liu, 2016).

Dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia, kemampuan menguasai lebih dari satu bahasa (bilingualisme atau multilingualisme) menjadi modal penting untuk mobilitas sosial dan ekonomi. Penguasaan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing memungkinkan individu menjembatani berbagai komunitas sosial dan budaya secara lebih fleksibel (Nababan, 1984).

Kesimpulannya, bahasa dan komunikasi merupakan pilar utama dalam sistem sosial budaya. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar informasi, tetapi juga sebagai medium pembentuk realitas sosial, pengembangan nilai budaya, dan penentu arah perubahan masyarakat. Memahami bahasa dan komunikasi berarti memahami esensi kehidupan manusia itu sendiri.

### **C. Bahasa dan Identitas Budaya**

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga merupakan simbol utama dari identitas budaya suatu kelompok masyarakat.

Bahasa mengandung nilai-nilai, cara pandang, dan pengalaman kolektif yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Sapir (1921), bahasa bukan hanya cerminan dari realitas sosial, tetapi juga sarana yang membentuk struktur pemikiran masyarakat.

Setiap bahasa mencerminkan sistem makna dan norma budaya yang unik. Ketika seseorang berbicara dalam bahasanya sendiri, ia tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengungkapkan siapa dirinya, dari mana ia berasal, dan nilai-nilai apa yang ia anut. Seperti dikemukakan oleh Kramsch (1998), bahasa dan budaya memiliki hubungan simbiotik—keduanya saling membentuk dan memelihara satu sama lain dalam praktik sosial.

Bahasa menjadi penanda utama identitas etnik dan nasional. Dalam banyak masyarakat multikultural, bahasa digunakan sebagai alat untuk menegaskan eksistensi kelompok minoritas atau sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi budaya mayoritas. Fishman (1999) menyebut bahasa sebagai "jantung" dari etnisitas karena di sanalah terletak memori kolektif dan solidaritas kelompok.

Dalam konteks Indonesia, keberagaman bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Bugis, dan lainnya menunjukkan kekayaan identitas kultural yang luar biasa. Bahasa daerah bukan hanya media komunikasi, tetapi juga ekspresi nilai-nilai lokal seperti unggah-ungguh dalam budaya Jawa atau siri' na pacce dalam budaya Bugis-Makassar. Bahasa menjadi media

pelestarian nilai-nilai budaya yang khas dan luhur (Koentjaraningrat, 2009).

Bahasa juga dapat menjadi simbol perbedaan sosial dalam masyarakat. Pemilihan ragam bahasa dalam interaksi—seperti penggunaan bahasa baku, dialek, atau gaya tutur tertentu—dapat menunjukkan posisi sosial, tingkat pendidikan, atau latar belakang budaya seseorang. Bourdieu (1991) menekankan bahwa bahasa bukan sekadar alat netral, melainkan memiliki "kapital simbolik" yang menentukan siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan.

Identitas budaya melalui bahasa sering kali diperkuat dalam praktik-praktik sosial seperti upacara adat, cerita rakyat, dan sastra lisan. Dalam konteks ini, bahasa menjadi jembatan antara masa lalu dan masa kini, yang menjaga kesinambungan sejarah dan warisan budaya. Hal ini terlihat dalam tradisi tutur di masyarakat Sasak, Batak, dan Dayak yang terus dilestarikan sebagai bentuk identitas komunitas.

Namun, globalisasi dan dominasi bahasa-bahasa besar seperti Inggris telah menggeser posisi bahasa lokal. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya bahasa sebagai bagian dari identitas budaya lokal. UNESCO (2003) menyebutkan bahwa setiap dua minggu, satu bahasa di dunia punah, dan bersama dengan itu, hilang pula pengetahuan lokal yang tersimpan dalam bahasa tersebut.

Bahasa juga memainkan peran penting dalam konstruksi identitas generasi muda. Dalam praktiknya, banyak anak muda mencampur bahasa lokal, nasional,

dan global sebagai bentuk identitas hibrid yang mencerminkan realitas multikultural saat ini. Fenomena seperti penggunaan bahasa campuran dalam media sosial atau musik menunjukkan dinamika identitas budaya yang terus berubah (Blommaert, 2010).

Di ruang publik, penggunaan bahasa menjadi indikator kehadiran budaya. Nama jalan, papan informasi, dan media massa lokal yang menggunakan bahasa daerah memperkuat pengakuan identitas budaya masyarakat setempat. Hal ini menjadi penting dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, di mana penguatan budaya lokal menjadi bagian dari pembangunan daerah.

Penggunaan bahasa ibu dalam pendidikan dasar juga telah terbukti meningkatkan pemahaman siswa dan memperkuat rasa identitas. Studi oleh Cummins (2000) menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar dalam bahasa ibu mereka memiliki landasan kognitif dan afektif yang lebih kuat, serta lebih mudah memahami konsep-konsep baru dalam bahasa kedua.

Dalam tataran simbolik, bahasa digunakan dalam semboyan, lagu, dan slogan yang mencerminkan semangat kolektif suatu kelompok. Slogan-slogan daerah seperti “Toraja Maelo” atau “Majulah Kotaku Makassar” menunjukkan bagaimana bahasa menjadi simbol semangat, persatuan, dan kebanggaan identitas lokal.

Bahasa juga dapat menjadi alat resistensi budaya terhadap dominasi identitas nasional atau global. Dalam konteks ini, gerakan revitalisasi bahasa

daerah atau pengajaran bahasa ibu di sekolah-sekolah merupakan bentuk perjuangan identitas budaya yang bertujuan menjaga keunikan dan keberlangsungan budaya lokal (Heller, 2011).

Bahasa dan identitas budaya juga berkaitan erat dengan memori kolektif. Cerita rakyat, mitologi, dan lagu daerah merupakan media transmisi nilai dan sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa. Dengan mempelajari dan menggunakan bahasa lokal, masyarakat turut menjaga narasi sejarah mereka sendiri dari arus homogenisasi budaya global.

Dalam migrasi dan diaspora, bahasa menjadi salah satu sarana terkuat untuk menjaga keterikatan dengan budaya asal. Komunitas diaspora sering kali mempertahankan bahasa leluhur mereka dalam keluarga dan komunitas untuk mempertahankan identitas budaya meskipun hidup dalam lingkungan asing (Pavlenko & Blackledge, 2004).

Bahasa, pada akhirnya, bukan hanya alat teknis, melainkan jati diri kolektif yang menyatukan individu dalam kebersamaan budaya. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk, pengakuan dan pelestarian bahasa daerah merupakan bagian dari penguatan identitas kebangsaan yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai lokal.

#### **D. Bahasa dalam Proses Sosialisasi dan Pendidikan**

Bahasa merupakan komponen utama dalam proses sosialisasi, karena melalui bahasa individu belajar mengenali nilai, norma, dan peran sosial dalam masyarakatnya. Sejak masa kanak-kanak, seseorang

diperkenalkan pada dunia sosial melalui ujaran-ujaran simbolik yang disampaikan oleh keluarga dan lingkungan. Menurut Berger dan Luckmann (1966), sosialisasi primer, yakni proses awal pembentukan identitas sosial, hanya mungkin terjadi jika terdapat bahasa sebagai sarana penyampai makna-makna sosial.

Dalam proses sosialisasi, bahasa berfungsi sebagai medium untuk internalisasi budaya. Anak-anak tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga memahami bagaimana berbicara secara "tepat" sesuai dengan konteks sosial dan budaya mereka. Halliday (1978) menjelaskan bahwa bahasa memiliki fungsi sosial-semantik yang membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak dalam interaksi sosial.

Bahasa dalam pendidikan memiliki peran yang sangat sentral karena hampir seluruh proses belajar mengajar disampaikan melalui media bahasa, baik lisan maupun tulisan. Bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi pedagogis, tetapi juga sebagai wahana pembentukan kognisi, afeksi, dan moral peserta didik. Vygotsky (1978) menyatakan bahwa perkembangan kognitif anak sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi melalui bahasa.

Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan nasional menjadi instrumen penting dalam menyatukan keragaman etnik dan bahasa daerah. Kebijakan ini mencerminkan fungsi bahasa sebagai alat integrasi nasional yang memperkuat identitas kebangsaan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Namun demikian, penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam pendidikan dasar juga memiliki urgensi tersendiri. Penelitian UNESCO (2003) menunjukkan bahwa anak-anak yang belajar menggunakan bahasa pertama mereka memiliki tingkat keberhasilan belajar yang lebih tinggi karena mereka memahami instruksi dengan lebih baik dan merasa lebih nyaman secara emosional.

Bahasa ibu juga memainkan peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya lokal. Saat digunakan dalam cerita rakyat, peribahasa, dan lagu tradisional di lingkungan sekolah, bahasa ibu tidak hanya memperkuat identitas budaya tetapi juga memperkaya pengalaman belajar anak-anak secara kontekstual (Cummins, 2000). Ini menunjukkan bahwa bahasa adalah medium pendidikan yang juga membawa nilai-nilai moral dan sosial.

Dalam konteks masyarakat multibahasa, pendidikan menjadi arena penting dalam negosiasi identitas linguistik. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga berbahasa daerah sering kali menghadapi tantangan ketika masuk ke sekolah yang menggunakan bahasa nasional. Hal ini dapat menyebabkan kehilangan identitas linguistik jika tidak diimbangi dengan pelestarian bahasa ibu di rumah dan lingkungan sosial (Pavlenko & Blackledge, 2004).

Di sisi lain, guru sebagai agen sosialisasi dalam institusi pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa sekaligus membentuk identitas siswa. Melalui interaksi di kelas, guru bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga norma-

norma sosial, seperti sopan santun berbicara, keberanian bertanya, dan cara menyampaikan pendapat yang baik (Gee, 2000). Semua ini dimediasi melalui praktik kebahasaan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar.

Bahasa juga memfasilitasi internalisasi ideologi pendidikan. Pilihan kata, narasi dalam buku ajar, dan struktur komunikasi di kelas mencerminkan ideologi sosial dan politik tertentu. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa wacana pendidikan membawa serta nilai-nilai hegemonik yang sering kali tidak disadari oleh peserta didik, dan bahasa menjadi sarana reproduksi ideologi tersebut.

Keterampilan bahasa juga menentukan tingkat akses siswa terhadap sumber pengetahuan dan peluang pendidikan lanjutan. Siswa yang memiliki kompetensi bahasa tinggi lebih mudah memahami materi pelajaran, berpartisipasi aktif di kelas, dan lulus ujian dengan baik. Ini menunjukkan bagaimana bahasa bukan hanya alat ekspresi, tetapi juga modal akademik (Bourdieu, 1991).

Kebijakan pendidikan multibahasa yang mempertimbangkan konteks lokal dan nasional dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya lokal dan pencapaian kompetensi nasional. Pendekatan seperti *mother tongue-based multilingual education* (MTB-MLE) telah diterapkan di berbagai negara berkembang untuk menjembatani kebutuhan lokal dan nasional secara harmonis (UNESCO, 2016).

Penggunaan bahasa dalam kurikulum sekolah juga perlu mempertimbangkan aspek inklusivitas dan keberagaman. Misalnya, dalam konteks siswa dari latar belakang etnis minoritas atau masyarakat adat, pendekatan kebahasaan yang responsif terhadap latar budaya mereka dapat mendorong rasa dihargai dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses belajar (Skutnabb-Kangas, 2000).

Bahasa juga menjadi instrumen untuk mempromosikan pendidikan karakter. Melalui pembelajaran bahasa yang baik, siswa dapat dibimbing untuk memahami pentingnya empati, tanggung jawab, dan kejujuran yang tercermin dalam penggunaan bahasa yang santun dan penuh makna. Bahasa membentuk watak karena ia membentuk cara berpikir dan berperilaku.

Dalam ranah pendidikan tinggi, bahasa menjadi medium untuk pengembangan wacana ilmiah dan kritis. Mahasiswa tidak hanya belajar menyampaikan pendapat, tetapi juga menulis karya ilmiah, berdiskusi akademik, dan membangun pemahaman multidisipliner melalui bahasa. Di sinilah peran bahasa sebagai alat berpikir kritis sangat penting untuk membentuk generasi pembelajar yang reflektif.

Akhirnya, bahasa dalam sosialisasi dan pendidikan tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial yang lebih luas. Ia menjadi jembatan antara individu dan masyarakat, antara pribadi dan budaya, antara generasi tua dan muda. Melalui bahasa, pendidikan menjadi lebih dari sekadar instruksi kognitif, tetapi

menjadi proses pemanusiaan yang penuh makna dan kebudayaan.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik. (2006). *Agama dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Chaika, Elaine. (1982). *Language: The Social Mirror*. Boston: Newbury House.
- Crystal, David. (2006). *Language and the Internet*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Eriyanto. (2005). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, Norman. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- Gumperz, John J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, Edward T. (1976). *Beyond Culture*. New York: Anchor Books.
- Koentjaraningrat. (1994). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. (1982). *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia.
- Moeliono, Anton M. (1988). *Bahasa Indonesia dan Pembakuannya*. Jakarta: Gramedia.
- Samovar, Larry A., Porter, Richard E., & McDaniel, Edwin R. (2010). *Communication Between Cultures*. Boston: Wadsworth.
- Sapir, Edward. (1921). *Language: An Introduction to the Study of Speech*. New York: Harcourt Brace.
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- UNESCO. (2010). *Atlas of the World's Languages in Danger*. Paris: UNESCO.

## **BAB VIII**

### **PENDIDIKAN DAN EKONOMI**

#### **A. Pengantar Umum**

Pendidikan dan ekonomi merupakan dua pilar utama dalam sistem sosial budaya yang saling berinteraksi secara dinamis. Pendidikan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas bagi pembangunan ekonomi, sementara ekonomi memberikan dukungan material dan kelembagaan bagi berkembangnya sistem pendidikan. Hubungan timbal balik ini menjadikan keduanya sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial secara keseluruhan (Tilak, 2002).

Secara sosiologis, pendidikan bukan hanya wadah transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai alat mobilitas sosial. Melalui pendidikan, individu dari latar belakang ekonomi lemah dapat meningkatkan taraf hidupnya, membuka peluang kerja yang lebih baik, serta meraih status sosial yang lebih tinggi (Bourdieu, 1991). Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai penggerak utama dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Dalam sejarahnya, pendidikan sering dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi pembangunan ekonomi nasional. Teori Human Capital yang dikembangkan oleh Becker (1993) menyebutkan bahwa pendidikan adalah bentuk investasi yang memberikan hasil berupa peningkatan produktivitas tenaga kerja, yang selanjutnya berdampak pada

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan kemampuan inovatif individu dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Di era globalisasi, transformasi ekonomi yang sangat cepat menuntut sistem pendidikan untuk lebih adaptif dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dunia kerja kini tidak hanya membutuhkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, tetapi juga keterampilan praktis, soft skills, dan kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, reformasi kurikulum dan pendekatan pembelajaran menjadi keharusan untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini (Schultz, 1971).

Dalam konteks Indonesia, pembangunan ekonomi yang merata tidak dapat dilepaskan dari pemerataan akses pendidikan. Ketimpangan dalam akses pendidikan antara wilayah urban dan rural, antara kelompok ekonomi atas dan bawah, berbanding lurus dengan kesenjangan ekonomi. Pemerintah melalui berbagai program seperti BOS dan KIP mencoba menjembatani disparitas ini agar kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Kemendikbud, 2021).

Pendidikan juga berperan dalam menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru. Melalui pendidikan kewirausahaan, peserta didik tidak hanya dilatih untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Konsep ini penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan

budaya yang besar namun kurang tergarap (Hisrich et al., 2013).

Sementara itu, ekonomi juga memiliki pengaruh besar terhadap kualitas pendidikan. Kondisi ekonomi keluarga menentukan kemampuan dalam membiayai pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dari keluarga miskin cenderung mengalami putus sekolah atau hanya memperoleh pendidikan rendah, yang pada akhirnya memperkuat lingkaran kemiskinan antar-generasi (UNESCO, 2015). Maka, kebijakan pendidikan harus pula mempertimbangkan faktor ekonomi mikro masyarakat.

Di sisi lain, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sumber daya manusia menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis. Negara-negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) yang tinggi umumnya menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama dalam anggaran nasional mereka. Investasi ini tidak hanya dalam bentuk anggaran, tetapi juga dalam perbaikan mutu tenaga pendidik, infrastruktur sekolah, serta sistem evaluasi pendidikan yang terintegrasi (UNDP, 2021).

Interkoneksi antara pendidikan dan ekonomi juga dapat dilihat dalam sistem ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Dalam sistem ini, pengetahuan menjadi sumber daya utama produksi dan inovasi. Pendidikan tinggi, lembaga riset, dan pusat inovasi menjadi ujung tombak dalam menciptakan nilai ekonomi baru. Negara yang berhasil memadukan pendidikan dengan ekonomi berbasis

pengetahuan terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis global (Powell & Snellman, 2004).

Pendidikan juga mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Pendidikan literasi keuangan memungkinkan individu memahami cara mengelola keuangan pribadi, merencanakan investasi, dan menghindari utang yang merugikan. Ini penting untuk memperkuat stabilitas ekonomi rumah tangga dan mendorong budaya menabung serta berinvestasi secara bijak (Lusardi & Mitchell, 2014).

Pentingnya sinergi antara pendidikan dan ekonomi juga terlihat dalam program link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri. Program ini bertujuan untuk menyelaraskan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri, sehingga lulusan siap pakai dan mampu bersaing dalam pasar kerja nasional maupun internasional. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mengurangi angka pengangguran terdidik (Kemendikbudristek, 2022).

Secara budaya, pendidikan dan ekonomi juga turut mempengaruhi pola konsumsi, gaya hidup, serta nilai-nilai sosial masyarakat. Pendidikan yang berkualitas mendorong masyarakat untuk hidup produktif dan etis dalam dunia kerja, sementara ekonomi yang mapan menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak-anak mereka. Di sinilah terlihat bagaimana pendidikan dan ekonomi membentuk sirkulasi nilai dalam sistem sosial budaya (Inglehart & Baker, 2000).

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pendidikan dan ekonomi memainkan peran yang sangat strategis. Pendidikan memberikan kesadaran lingkungan, sosial, dan ekonomi kepada masyarakat, sedangkan ekonomi menyediakan sarana untuk menerapkan kesadaran tersebut dalam praktik hidup sehari-hari. Kombinasi keduanya membentuk masyarakat yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga bijak dalam mengelola sumber daya dan masa depan (OECD, 2019).

Pendidikan dan ekonomi juga saling menopang dalam konteks pembangunan wilayah. Daerah dengan tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki aktivitas ekonomi yang lebih dinamis, karena SDM yang terdidik mampu mengelola dan mengembangkan potensi lokal secara inovatif. Sebaliknya, wilayah yang tertinggal secara ekonomi sering kali memiliki indeks pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, strategi pembangunan daerah seharusnya selalu menempatkan pendidikan dan ekonomi sebagai prioritas yang tidak terpisahkan (World Bank, 2020).

Akhirnya, pendidikan dan ekonomi adalah dua sisi dari koin yang sama dalam pembangunan sosial budaya. Keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri, tetapi harus dirancang secara terpadu agar menghasilkan masyarakat yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Monograf ini mengajak pembaca untuk melihat keterkaitan ini tidak hanya sebagai data statistik, tetapi sebagai kenyataan sosial yang perlu dipahami secara reflektif dan strategis.

## **B. Pendidikan sebagai Sistem Sosial Budaya**

Pendidikan merupakan salah satu institusi sosial paling fundamental dalam kehidupan manusia. Ia tidak sekadar berfungsi sebagai sarana pengajaran formal, tetapi juga sebagai mekanisme utama dalam mentransmisikan budaya, nilai-nilai sosial, dan norma dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam kerangka sosiologi, pendidikan dapat dipahami sebagai bagian integral dari sistem sosial budaya karena ia menyatu dalam struktur masyarakat dan dipengaruhi oleh dinamika kebudayaan yang melingkupinya (Durkheim, 1956).

Pendidikan sebagai sistem sosial budaya berarti bahwa ia merupakan produk dan sekaligus produsen budaya. Dalam proses pendidikan, budaya suatu masyarakat diajarkan, diserap, dan dikembangkan oleh peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan Herskovits (1955) bahwa pendidikan adalah media enkulturasi, yakni proses di mana individu belajar menjadi bagian dari kebudayaannya. Sekolah dan institusi pendidikan lainnya bertindak sebagai agen penting dalam membentuk kepribadian individu sesuai harapan masyarakat.

Proses pendidikan mencerminkan struktur nilai dan norma dominan dalam masyarakat. Di negara-negara dengan sistem sosial yang kolektif, pendidikan lebih menekankan nilai-nilai kebersamaan, ketaatan, dan solidaritas. Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih individualistik, pendidikan diarahkan untuk membangun kemandirian, kebebasan berpikir, dan inovasi. Oleh karena itu, isi dan metode pendidikan

selalu kontekstual dan mencerminkan karakter sosial budaya tempat ia berlangsung (Goodenough, 1964).

Tidak hanya sebagai medium pemindahan budaya, pendidikan juga merupakan wahana perubahan budaya. Melalui pendidikan, masyarakat bisa melakukan reformasi nilai dan cara pandang terhadap isu-isu baru seperti kesetaraan gender, keberagaman, dan teknologi digital. Pendidikan dalam hal ini berperan sebagai agen perubahan sosial (*social change agent*) yang memungkinkan budaya berkembang lebih adaptif terhadap tantangan zaman (Inkeles & Smith, 1974).

Dalam sistem sosial, pendidikan berkaitan erat dengan struktur sosial seperti kelas sosial, status, dan mobilitas sosial. Pendidikan sering kali menjadi faktor penentu dalam stratifikasi sosial karena akses terhadap pendidikan berkualitas tidak selalu merata. Hal ini membuat pendidikan menjadi institusi yang mereproduksi struktur sosial, namun pada saat yang sama juga bisa berfungsi sebagai alat mobilitas sosial (Collins, 1979).

Sebagai subsistem dari sistem budaya, pendidikan tidak terlepas dari pengaruh bahasa, nilai religius, adat istiadat, serta teknologi lokal. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, pendidikan harus berfungsi sebagai jembatan antarbudaya dan tidak boleh menegasikan kekayaan budaya lokal. Kurikulum pendidikan sebaiknya memasukkan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pelestarian budaya bangsa (Tilaar, 2004).

Lebih lanjut, pendidikan bukan entitas netral. Ia seringkali menjadi arena tarik-menarik kepentingan ideologi. Negara, agama, dan kelompok-kelompok sosial tertentu dapat memanfaatkan sistem pendidikan untuk mereproduksi nilai-nilai ideologis mereka. Dalam pandangan Gramsci (1971), hegemoni budaya dipertahankan melalui lembaga pendidikan yang menanamkan nilai-nilai dominan secara halus dan sistematis.

Konstruksi sosial atas pendidikan juga dapat dilihat dari peran gender dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Pendidikan yang tidak sensitif gender dapat memperkuat stereotip dan ketimpangan peran sosial. Oleh karena itu, dalam sistem sosial budaya yang terus berkembang, pendidikan perlu merespons isu kesetaraan sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat inklusif dan berkeadilan (Connell, 1993).

Fungsi laten pendidikan dalam sistem sosial budaya juga mencakup pembentukan identitas nasional dan kohesi sosial. Melalui pendidikan, negara membentuk narasi kebangsaan, sejarah, dan simbol-simbol nasional yang menyatukan warga negara dalam kerangka budaya kolektif. Dalam hal ini, pendidikan tidak hanya berperan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kebangsaan (Anderson, 2006).

Dalam masyarakat tradisional, pendidikan berlangsung dalam bentuk informal, melalui keluarga, lingkungan, dan pengalaman langsung. Pendidikan formal muncul sebagai respons terhadap kompleksitas masyarakat modern. Namun demikian, ketiganya—

pendidikan informal, nonformal, dan formal—tetap menjadi bagian dari sistem sosial budaya yang menyeluruh dan saling mendukung dalam membentuk individu yang utuh (Soekanto, 2003).

Ketika pendidikan diadopsi sebagai kebijakan negara, maka ia menjadi instrumen pembangunan yang terstruktur. Negara melalui kebijakan pendidikan tidak hanya mentransmisikan budaya nasional, tetapi juga menetapkan standar nilai-nilai yang diharapkan dapat menjadi karakter kolektif bangsa. Pendidikan menjadi alat rekayasa sosial (*social engineering*) dalam membentuk masyarakat yang produktif dan bermoral (Djojonegoro, 1998).

Pendidikan juga memiliki relasi erat dengan dimensi simbolik budaya. Upacara kelulusan, penggunaan seragam, struktur hierarki di sekolah, serta interaksi guru dan murid adalah simbol-simbol yang mencerminkan struktur sosial dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan bukan sekadar proses instruksional, tetapi juga sebuah sistem simbolik yang merefleksikan nilai-nilai sosial (Geertz, 1973).

Dalam praktiknya, sistem pendidikan sering kali mencerminkan nilai-nilai modernitas. Rasionalitas, efisiensi, meritokrasi, dan birokrasi adalah nilai-nilai budaya modern yang diadopsi oleh institusi pendidikan. Namun di saat yang sama, pendidikan juga menjadi tempat perjumpaan antara budaya lokal dan global, yang kadang menimbulkan ketegangan atau transformasi budaya (Appadurai, 1996).

Pendidikan dalam konteks sistem sosial budaya juga harus inklusif dan berkeadilan. Dalam masyarakat majemuk, sistem pendidikan tidak boleh mengabaikan kelompok marginal seperti masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan komunitas minoritas. Keadilan dalam pendidikan mencerminkan nilai keadilan sosial dalam masyarakat dan menjadi indikator dari kemajuan budaya suatu bangsa (Nussbaum, 2011).

Akhirnya, memahami pendidikan sebagai sistem sosial budaya memungkinkan kita melihat bahwa pendidikan bukan sekadar soal sekolah, guru, dan murid. Ia adalah institusi kultural yang kompleks, yang mencerminkan, mereproduksi, dan mengubah nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan interdisipliner sangat diperlukan dalam merancang sistem pendidikan yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga membudayakan masyarakat Indonesia.

### **C. Ekonomi sebagai Sistem Sosial Budaya**

Ekonomi bukan hanya soal produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, tetapi juga sebuah sistem yang berakar pada struktur sosial dan nilai budaya suatu masyarakat. Sistem ekonomi tidak berjalan dalam ruang hampa; ia terbentuk, tumbuh, dan beroperasi dalam kerangka norma sosial, struktur kekuasaan, dan pola relasi budaya tertentu. Dalam pandangan sosiologi ekonomi, ekonomi adalah institusi sosial yang tidak bisa dipisahkan dari jalinan sosial budaya tempat ia berada (Granovetter, 1985).

Pada masyarakat tradisional, kegiatan ekonomi cenderung berbasis pada nilai kekeluargaan, gotong royong, dan keberlanjutan alam. Sumber daya dieksploitasi secara bijak, dan hubungan ekonomi lebih didasarkan pada relasi sosial daripada kontrak formal. Dalam banyak masyarakat adat di Indonesia, misalnya, praktik pertukaran tidak selalu ditentukan oleh hukum pasar, tetapi oleh nilai sosial seperti timbal balik (*reciprocity*) dan penghormatan terhadap senioritas (Geertz, 1963).

Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang industrial dan kapitalistik, aktivitas ekonomi menjadi semakin terdiferensiasi dan rasional. Pasar mengambil peran sentral, dan nilai tukar menggantikan nilai sosial. Namun demikian, bahkan dalam sistem ekonomi modern, budaya tetap memainkan peran penting—terutama dalam membentuk etos kerja, motivasi, dan persepsi terhadap kekayaan dan keberhasilan (Weber, 1958).

Ekonomi juga membentuk budaya masyarakat. Kegiatan ekonomi memengaruhi gaya hidup, pola konsumsi, bahkan aspirasi kolektif. Misalnya, dalam masyarakat konsumtif, identitas diri seringkali didefinisikan berdasarkan barang yang dimiliki, bukan pada nilai-nilai spiritual atau hubungan sosial. Dalam konteks ini, budaya material menjadi bagian integral dari sistem ekonomi (Baudrillard, 1998).

Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan uang dan modal, tetapi juga dengan jaringan sosial. Konsep *embeddedness* yang diperkenalkan oleh Granovetter (1985) menjelaskan bahwa tindakan ekonomi selalu

terikat dalam jaringan relasi sosial. Di Indonesia, hubungan kekerabatan, kepercayaan, dan patronase menjadi faktor penting dalam bisnis, bahkan lebih dari aturan legal formal.

Sistem ekonomi formal dan informal berjalan berdampingan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Pasar tradisional, warung, dan usaha kecil adalah contoh ekonomi informal yang mengandalkan relasi sosial dan nilai budaya setempat. Kehidupan ekonomi informal ini mencerminkan dinamika budaya lokal yang tidak selalu tunduk pada logika kapitalisme global (Scott, 1985).

Budaya kerja juga merupakan bagian dari sistem sosial budaya dalam ekonomi. Etos kerja masyarakat Jepang, misalnya, dipengaruhi oleh nilai-nilai Konfusianisme yang menekankan disiplin, kehormatan, dan kolektivisme. Sementara di Barat, Protestanisme dikaitkan dengan munculnya kapitalisme modern karena mendorong kerja keras dan akumulasi kekayaan sebagai tanda keberkahan (Weber, 1958).

Perbedaan budaya memengaruhi strategi bisnis lintas negara. Perusahaan multinasional harus memahami budaya lokal agar produk mereka diterima oleh pasar. Sebagai contoh, iklan, desain produk, dan pelayanan harus disesuaikan dengan norma budaya masyarakat setempat. Tanpa sensitivitas budaya, ekspansi ekonomi bisa gagal (Hofstede, 2001).

Kearifan lokal dalam ekonomi tradisional Indonesia menunjukkan bagaimana ekonomi dan budaya saling berkaitan. Sistem subak di Bali adalah

contoh harmonisasi antara budaya, agama, dan ekonomi dalam sistem irigasi pertanian. Sistem ini tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan keseimbangan ekologi (Lansing, 1991).

Transformasi ekonomi seperti urbanisasi dan industrialisasi membawa tantangan terhadap sistem budaya lokal. Masyarakat desa yang sebelumnya hidup dalam struktur sosial kolektif kini harus beradaptasi dengan sistem upah, individualisme, dan mobilitas tinggi. Perubahan ini dapat menimbulkan disorientasi nilai dan krisis identitas budaya jika tidak dikelola secara bijak (Sztompka, 2000).

Ketimpangan ekonomi juga merupakan hasil dari struktur sosial budaya. Akses terhadap sumber daya ekonomi seringkali ditentukan oleh status sosial, jenis kelamin, etnisitas, atau jaringan kekuasaan. Oleh karena itu, untuk memahami kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi, kita tidak cukup menggunakan pendekatan ekonomi murni, tetapi juga perlu memahami akar-akar sosial budayanya (Bourdieu, 1986).

Ekonomi sebagai sistem sosial budaya berarti bahwa pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari konteks lokal. Pendekatan pembangunan partisipatif, yang melibatkan komunitas dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, lebih efektif karena memperhatikan norma dan nilai budaya setempat. Model ini lebih berkelanjutan daripada pembangunan top-down yang seragam (Chambers, 1997).

Globalisasi ekonomi telah memperluas jangkauan pasar, namun juga menimbulkan tantangan baru bagi budaya lokal. Penetrasi budaya konsumtif global melalui iklan, media, dan produk luar dapat mengikis nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, ekonomi lokal perlu diberdayakan dengan pendekatan yang sensitif terhadap identitas budaya agar tidak tergerus oleh arus global (Tomlinson, 1999).

Teknologi juga turut membentuk pola ekonomi dan budaya kerja. Ekonomi digital mendorong munculnya budaya kerja baru seperti kerja fleksibel, ekonomi gig, dan kewirausahaan daring. Ini mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan pekerjaan dan waktu luang, serta menimbulkan tantangan baru dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kehidupan sosial (Castells, 2010).

Dengan demikian, ekonomi sebagai sistem sosial budaya adalah pemahaman yang mengakui bahwa di balik setiap transaksi ekonomi terdapat nilai, norma, dan simbol sosial. Mengabaikan dimensi budaya dalam ekonomi hanya akan menghasilkan kebijakan yang timpang dan tidak manusiawi. Untuk itu, pendekatan interdisipliner menjadi penting dalam merancang sistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berakar pada budaya bangsa.

#### **D. Ketimpangan Sosial dalam Pendidikan dan Ekonomi**

Ketimpangan sosial merupakan masalah mendasar dalam sistem pendidikan dan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan ini

terjadi ketika akses terhadap pendidikan bermutu dan peluang ekonomi tidak tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menyebabkan sebagian besar sumber daya, kekayaan, dan kesempatan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sedangkan kelompok lainnya terus berada dalam posisi marginal. Dalam konteks pendidikan dan ekonomi, ketimpangan ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain (Tilak, 2002).

Dalam dunia pendidikan, ketimpangan sering terlihat dari perbedaan kualitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan, antara lembaga pendidikan negeri dan swasta, serta antara anak-anak dari keluarga kaya dan miskin. Anak-anak dari keluarga menengah ke atas memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan berkualitas, les privat, teknologi informasi, dan bimbingan akademik. Sebaliknya, anak-anak dari keluarga miskin seringkali harus menghadapi keterbatasan fasilitas, guru yang kurang kompeten, serta tekanan ekonomi untuk segera bekerja (UNESCO, 2020).

Faktor sosial budaya turut memperkuat ketimpangan ini. Dalam beberapa komunitas, terutama di daerah terpencil, nilai-nilai budaya tertentu masih menempatkan pendidikan sebagai hal yang tidak terlalu penting, terutama bagi anak perempuan. Akibatnya, angka putus sekolah tinggi di kalangan perempuan, dan ini berdampak jangka panjang terhadap akses mereka terhadap pekerjaan formal dan kesempatan berpenghasilan layak (Bourdieu, 1977).

Kapital budaya menjadi konsep penting dalam menjelaskan ketimpangan pendidikan. Bourdieu (1986) menyatakan bahwa keluarga dengan tingkat pendidikan tinggi memiliki kemampuan mentransfer nilai-nilai, kebiasaan belajar, dan jaringan sosial kepada anak-anak mereka. Ini memberikan keunggulan dibandingkan anak-anak dari keluarga kurang berpendidikan. Dengan demikian, sistem pendidikan secara tidak langsung melegitimasi dan mereproduksi ketimpangan sosial.

Dari sisi ekonomi, ketimpangan tampak dalam distribusi pendapatan, kepemilikan aset, dan peluang kerja. Sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar kekayaan nasional, sedangkan sebagian besar lainnya harus bertahan dalam sektor informal dengan pendapatan minim dan tanpa jaminan sosial. Fenomena ini menunjukkan struktur ekonomi yang tidak inklusif dan cenderung memperkuat stratifikasi sosial (Piketty, 2014).

Ketimpangan ekonomi juga tercermin dalam ketimpangan geografis. Wilayah-wilayah tertentu seperti Jawa dan kota-kota besar mendapatkan lebih banyak investasi, pembangunan infrastruktur, dan akses ke pasar. Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur, mengalami keterbelakangan ekonomi yang berkelanjutan. Ketimpangan ini berdampak langsung terhadap peluang pendidikan dan mobilitas sosial masyarakatnya (Hill & Weingast, 2020).

Hubungan antara pendidikan dan ekonomi bersifat sirkular. Pendidikan yang berkualitas

membuka jalan bagi pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang lebih tinggi. Namun, hanya mereka yang sudah memiliki modal ekonomi dan sosial yang cukup yang dapat menikmati pendidikan seperti itu. Akibatnya, ketimpangan sosial direproduksi secara sistematis dari generasi ke generasi (Bowles & Gintis, 2002).

Selain faktor struktural, kebijakan publik juga sering kali memperkuat ketimpangan. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan yang tidak merata atau program bantuan yang tidak tepat sasaran. Ketika pemerintah tidak memiliki sistem redistribusi yang adil, maka pendidikan dan ekonomi hanya menguntungkan segelintir orang, sementara mayoritas tetap terpinggirkan (Sen, 1999).

Pendidikan tinggi di Indonesia juga menjadi simbol ketimpangan. Perguruan tinggi negeri favorit cenderung diakses oleh siswa dari sekolah elit atau dari keluarga menengah atas yang mampu membiayai bimbingan intensif. Sementara itu, siswa dari sekolah daerah atau keluarga kurang mampu hanya memiliki sedikit kesempatan bersaing secara adil, meskipun mereka cerdas dan berprestasi (Suryadarma et al., 2006).

Ketimpangan dalam dunia kerja juga memperparah situasi. Lulusan dari perguruan tinggi ternama lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang layak, sedangkan lulusan dari institusi yang kurang dikenal sering kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Ini menunjukkan bagaimana institusi pendidikan

berperan dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang di masa depan (Collins, 1979).

Sektor informal di Indonesia, yang menampung lebih dari 50% angkatan kerja, menjadi cermin nyata dari ketimpangan ekonomi. Mayoritas pekerja di sektor ini berasal dari kelompok miskin yang tidak memiliki latar belakang pendidikan memadai. Mereka tidak mendapatkan perlindungan tenaga kerja, gaji layak, atau peluang mobilitas vertikal (World Bank, 2016).

Untuk mengatasi ketimpangan ini, dibutuhkan pendekatan intersektoral yang mengintegrasikan pendidikan, ekonomi, dan kebijakan sosial. Program afirmatif seperti beasiswa, sekolah gratis, atau pelatihan kerja perlu ditargetkan dengan tepat agar mencapai mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, revitalisasi pendidikan vokasional dan penguatan ekonomi lokal dapat membantu menciptakan ekosistem sosial ekonomi yang lebih adil (OECD, 2021).

Ketimpangan sosial dalam pendidikan dan ekonomi juga berkaitan erat dengan persoalan identitas, seperti etnisitas, gender, dan disabilitas. Kelompok minoritas seringkali menjadi korban diskriminasi ganda yang membuat mereka tertinggal dalam akses pendidikan dan pekerjaan. Oleh karena itu, pendekatan interseksionalitas perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan (Crenshaw, 1991).

Globalisasi memperumit dinamika ketimpangan ini. Di satu sisi, globalisasi membuka akses ke pasar dan informasi, namun di sisi lain memperlebar kesenjangan

antara mereka yang mampu memanfaatkan peluang global dan mereka yang tertinggal karena keterbatasan sumber daya. Ketimpangan digital menjadi fenomena baru dalam konteks ini, terutama di dunia pendidikan daring (Castells, 2010).

Mengatasi ketimpangan sosial dalam pendidikan dan ekonomi bukan hanya soal kebijakan teknis, tetapi juga menyangkut keberpihakan moral dan politik. Pendidikan harus dipandang sebagai hak dan alat emansipasi, bukan sebagai privilese. Demikian pula ekonomi harus diarahkan untuk kesejahteraan kolektif, bukan hanya pertumbuhan tanpa pemerataan. Hanya dengan komitmen terhadap keadilan sosial, kita dapat membangun masyarakat yang beradab dan berkelanjutan.

## **E. Daftar Pustaka**

- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and Symbolic Power*. Cambridge: Polity Press.
- Hisrich, R. D., Peters, M. P., & Shepherd, D. A. (2013). *Entrepreneurship* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51.
- Kemendikbud. (2021). *Laporan Capaian Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Kemendikbudristek. (2022). *Program Link and Match SMK*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44.
- OECD. (2019). *OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World*. Paris: OECD Publishing.
- Powell, W. W., & Snellman, K. (2004). The Knowledge Economy. *Annual Review of Sociology*, 30, 199–220.
- Schultz, T. W. (1971). *Investment in Human Capital*. New York: Free Press.
- Tilak, J. B. G. (2002). Education and Poverty. *Journal of Human Development*, 3(2), 191–207.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021/2022*. New York: United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2015). *Education for All Global Monitoring Report*. Paris: UNESCO.
- World Bank. (2020). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*. Jakarta: World Bank

## **BAB IX**

### **POLITIK, HUKUM, DAN GLOBALISASI**

#### **A. Pengantar Umum**

Politik, hukum, dan globalisasi merupakan tiga pilar penting yang membentuk dinamika sistem sosial budaya suatu bangsa. Ketiganya saling terhubung dan membentuk struktur sosial yang kompleks, baik dalam skala lokal, nasional, maupun global. Politik sebagai mekanisme pengambilan keputusan, hukum sebagai sistem pengatur perilaku masyarakat, dan globalisasi sebagai kekuatan lintas batas yang mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan, semuanya memainkan peran krusial dalam pembangunan peradaban modern (Giddens, 1990).

Dalam perspektif sosiologi, politik tidak hanya dipahami sebagai praktik kekuasaan oleh lembaga formal seperti negara dan pemerintah, tetapi juga mencakup relasi kekuasaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Politik menyentuh soal siapa yang mendapat apa, kapan, dan bagaimana, sebagaimana dikemukakan oleh Harold Lasswell (1958). Dengan kata lain, politik beroperasi dalam struktur sosial yang mengatur distribusi sumber daya dan pengambilan keputusan publik.

Sementara itu, hukum hadir sebagai perangkat normatif yang dilembagakan untuk menciptakan keteraturan sosial. Dalam kerangka sosial budaya, hukum bukan hanya sekadar peraturan tertulis, tetapi mencerminkan nilai, moral, dan konsensus sosial

dalam masyarakat. Durkheim (1893) menekankan bahwa hukum adalah ekspresi dari solidaritas sosial yang menjadi fondasi kohesi masyarakat. Ketika hukum mencerminkan nilai budaya dominan, maka legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum pun akan menguat.

Globalisasi memperluas cakupan interaksi antarbangsa dan memengaruhi hampir seluruh sistem sosial budaya, termasuk politik dan hukum. Menurut Appadurai (1996), globalisasi memunculkan medan budaya baru melalui arus ide, teknologi, manusia, dan media yang melintasi batas-batas nasional. Di sinilah kita menyaksikan bagaimana hukum dan politik nasional ditantang oleh norma-norma transnasional dan pengaruh global yang semakin kuat.

Perkembangan politik global saat ini menunjukkan adanya pergeseran dari dominasi negara-bangsa menuju kompleksitas kekuasaan yang melibatkan aktor non-negara seperti korporasi multinasional, organisasi internasional, dan gerakan masyarakat sipil global. Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi telah mendistribusikan kekuasaan secara horizontal, bukan lagi semata-mata bersifat vertikal dari negara ke rakyat (Held & McGrew, 2007).

Dalam konteks hukum, globalisasi melahirkan harmonisasi hukum internasional yang menantang prinsip-prinsip kedaulatan hukum nasional. Contohnya dapat dilihat dalam implementasi hukum hak asasi manusia internasional yang kadang berbenturan dengan sistem hukum adat atau hukum negara tertentu.

Hal ini memunculkan diskusi panjang tentang pluralisme hukum dan rekonsiliasi nilai-nilai lokal dengan norma-norma global (Merry, 2006).

Indonesia sebagai negara multikultural turut menghadapi tantangan besar dalam menyelaraskan politik, hukum, dan globalisasi. Dinamika politik lokal seringkali beririsan dengan tekanan internasional, terutama dalam isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, dan perdagangan bebas. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia harus mampu merespons kompleksitas masyarakat majemuk sambil beradaptasi terhadap perkembangan hukum global (Butt & Lindsey, 2012).

Dalam kehidupan masyarakat, interaksi antara politik, hukum, dan globalisasi memunculkan dinamika baru dalam pembentukan identitas, pengakuan hak, dan representasi kekuasaan. Globalisasi tidak hanya membawa peluang, tetapi juga memperbesar ketimpangan jika tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas lokal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ketiganya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial budaya yang melatarbelakanginya (Robertson, 1992).

Pentingnya pendidikan politik dan hukum dalam menghadapi arus globalisasi menjadi semakin relevan. Pendidikan berfungsi untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap hak dan kewajiban mereka, serta memperkuat partisipasi dalam sistem demokrasi. Selain itu, pendidikan hukum yang berbasis kearifan lokal juga diperlukan untuk

memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat (Friedman, 2001).

Politik dalam era global bukan lagi sekadar urusan elite pemerintahan, tetapi juga menyangkut kemampuan warga untuk memengaruhi kebijakan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Media sosial menjadi medan politik baru yang memungkinkan partisipasi langsung, namun juga rawan disinformasi dan polarisasi sosial. Oleh karena itu, literasi digital menjadi kebutuhan penting dalam era globalisasi politik (Castells, 2009).

Di ranah hukum, munculnya cyber law atau hukum siber merupakan respons terhadap perkembangan teknologi digital yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Hukum kini harus mampu mengatur ruang-ruang virtual yang sebelumnya belum terbayangkan oleh sistem hukum konvensional. Perubahan ini menuntut reformasi hukum yang dinamis dan partisipatif (Lessig, 2006).

Dari sudut pandang budaya, globalisasi membawa nilai-nilai baru yang kadang berseberangan dengan nilai-nilai tradisional. Di sinilah hukum dan politik menjadi arena negosiasi antara lokal dan global. Misalnya, dalam isu kesetaraan gender atau kebebasan berpendapat, kita sering menyaksikan tarik menarik antara norma lokal yang konservatif dan tekanan internasional yang progresif (Santos, 2002).

Negara-negara berkembang seperti Indonesia perlu memiliki posisi yang jelas dalam merespons globalisasi. Hal ini melibatkan politik kebudayaan, di mana pemerintah dan masyarakat mempertahankan

nilai-nilai luhur bangsa tanpa menutup diri terhadap arus perubahan global. Globalisasi perlu dipahami secara kritis sebagai peluang sekaligus tantangan untuk memperkuat identitas nasional melalui instrumen politik dan hukum (Anholt, 2007).

Kedaulatan hukum dan politik harus diperkuat untuk menghadapi tekanan global. Ini tidak berarti menolak globalisasi, tetapi membangun sistem sosial budaya yang tangguh dan adaptif. Penataan kelembagaan, pembaruan regulasi, dan peningkatan partisipasi warga negara menjadi prasyarat utama agar bangsa ini tidak sekadar menjadi objek globalisasi, tetapi juga subjek yang aktif dalam membentuknya (Stiglitz, 2002).

Dengan demikian, pengantar ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana politik, hukum, dan globalisasi bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling berkelindan dalam membentuk tatanan sosial budaya Indonesia. Memahami hubungan ini secara kritis adalah langkah awal untuk membangun masyarakat yang demokratis, adil, dan inklusif di era global.

## **B. Sistem Politik sebagai Cermin Budaya**

Sistem politik suatu bangsa tidak pernah hadir dalam ruang hampa budaya. Ia merupakan refleksi dari nilai, norma, dan struktur sosial yang berkembang dalam masyarakatnya. Sistem politik, dalam konteks ini, tidak hanya dimaknai sebagai serangkaian institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga sebagai manifestasi dari budaya politik yang hidup

dalam kesadaran kolektif masyarakat (Almond & Verba, 1963). Oleh karena itu, setiap sistem politik mengandung jejak-jejak budaya masyarakat yang melahirkannya.

Budaya politik yang berkembang dalam suatu masyarakat menjadi kerangka interpretatif dalam memahami bagaimana kekuasaan dikelola, dipertahankan, dan ditransformasikan. Misalnya, dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kolektivitas dan musyawarah, sistem politik cenderung menekankan pada konsensus dan harmoni sosial. Sebaliknya, dalam budaya yang individualistik, praktik politik lebih menonjolkan kompetisi dan debat publik (Geertz, 1973). Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana sistem politik dapat menjadi cermin kebudayaan.

Dalam konteks Indonesia, sistem politik mengalami transformasi yang signifikan dari era kerajaan, kolonialisme, orde lama, orde baru, hingga era reformasi. Namun, dalam setiap fase tersebut, jejak-jejak budaya lokal tetap memengaruhi cara kerja sistem politik. Misalnya, tradisi patron-klien yang kuat dalam budaya lokal tercermin dalam pola hubungan antara elite politik dan konstituennya, yang lebih didasarkan pada hubungan personal ketimbang institusional (Ufen, 2008).

Konsep kekuasaan dalam budaya Jawa, misalnya, mengajarkan bahwa pemimpin ideal adalah sosok yang "mengayomi" dan menjunjung tinggi ketenangan serta harmoni. Konsep ini memberi pengaruh pada gaya kepemimpinan politik di

Indonesia, terutama di masa Orde Baru, di mana stabilitas dan ketertiban menjadi orientasi utama pemerintahan (Magnis-Suseno, 1997). Konsep budaya ini berperan dalam membentuk legitimasi kekuasaan yang lebih bersifat simbolik ketimbang legal-formal.

Sistem politik Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Keterikatan antara agama dan politik menjadi bagian dari struktur sosial budaya yang unik, di mana agama tidak hanya menjadi ekspresi spiritual tetapi juga dasar moral dalam berpolitik. Fenomena politik identitas yang berkembang akhir-akhir ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya, termasuk keagamaan, bertransformasi menjadi kekuatan politik (Hefner, 2000).

Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam menjalin hubungan kekuasaan secara informal juga menjadi ciri khas sistem politik yang berakar dari budaya. Politik warung kopi, lobi-lobi personal, hingga negosiasi berbasis kedekatan emosional merupakan bagian dari praktik politik yang sulit dipisahkan dari budaya lokal. Sistem formal mungkin mengatur prosedur, tetapi budaya menentukan cara prosedur itu dijalankan (Antlöv, 2005).

Sistem politik sebagai cermin budaya juga dapat dilihat dari respons masyarakat terhadap otoritas. Di beberapa wilayah Indonesia, penghormatan kepada tokoh adat, ulama, atau bangsawan lokal masih sangat kuat, bahkan dalam praktik politik elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi politik tidak hanya berasal dari sistem demokrasi formal, tetapi juga dari

struktur budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Davidson & Henley, 2007).

Sementara itu, demokrasi sebagai sistem politik modern yang diadopsi Indonesia sejak Reformasi 1998, telah mengalami proses akulturasi dengan nilai-nilai lokal. Demokrasi Indonesia tidak identik dengan demokrasi liberal Barat, tetapi sering disebut sebagai demokrasi Pancasila—sebuah konsep yang menekankan pada musyawarah, keadilan sosial, dan nilai-nilai gotong royong. Ini adalah contoh nyata bagaimana sistem politik dipengaruhi oleh kebudayaan (Dwipayana & Ramlan, 1993).

Namun, penting disadari bahwa sistem politik tidak hanya mencerminkan budaya yang ada, tetapi juga membentuk budaya baru. Ketika praktik politik transaksional menjadi hal yang lumrah, budaya politik masyarakat pun mulai bergeser menjadi pragmatis dan materialistik. Dalam konteks ini, politik menjadi arena pertarungan nilai, antara idealisme yang lahir dari tradisi luhur dan realitas kekuasaan yang terkadang manipulatif (Hadiz & Robison, 2005).

Fenomena politik dinasti di berbagai daerah di Indonesia juga menunjukkan pertemuan antara nilai budaya dan struktur politik modern. Dalam beberapa konteks, masyarakat menerima dominasi politik oleh keluarga tertentu karena dianggap sebagai bentuk kelanjutan kekuasaan tradisional. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana nilai budaya dapat digunakan untuk membenarkan praktik politik kontemporer (Buehler, 2013).

Dalam ranah kebijakan publik, sistem politik juga mencerminkan prioritas nilai budaya masyarakat. Misalnya, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, keluarga, atau peran perempuan sering kali dipengaruhi oleh pandangan budaya yang dominan. Di sinilah terlihat bahwa keputusan politik tidak pernah netral, tetapi selalu dibentuk oleh struktur nilai masyarakat (Putnam, 2000).

Di era globalisasi, sistem politik nasional juga menghadapi tantangan dari nilai-nilai global yang masuk melalui media, teknologi, dan kerjasama internasional. Hal ini memicu proses hybridisasi budaya politik, di mana nilai-nilai lokal dan global saling berinteraksi, kadang bersinergi, kadang berkonflik. Negara harus mampu menavigasi perubahan ini tanpa kehilangan akar budaya politiknya (Inglehart & Welzel, 2005).

Politik identitas yang berkembang dalam beberapa dekade terakhir merupakan respons terhadap tekanan globalisasi dan modernisasi. Masyarakat mencari kembali identitas kolektif yang berakar dari budaya untuk mengukuhkan posisi mereka dalam arena politik. Hal ini memperlihatkan bahwa budaya tetap menjadi sumber daya penting dalam pembentukan identitas politik (Castells, 1997).

Sebagai cermin budaya, sistem politik juga memainkan peran dalam pelestarian atau marginalisasi budaya tertentu. Ketika negara mendukung keberagaman budaya melalui kebijakan afirmatif, maka sistem politik berfungsi sebagai pelindung budaya. Sebaliknya, jika negara mengabaikan hak-hak

budaya minoritas, maka sistem politik dapat menjadi alat dominasi budaya mayoritas (Kymlicka, 1995).

Dengan demikian, memahami sistem politik tidak cukup hanya dari aspek institusional dan prosedural, tetapi juga dari kaca mata kebudayaan. Politik adalah arena tempat nilai, norma, dan tradisi bernegosiasi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, sistem politik adalah refleksi dari budaya masyarakatnya—ia mencerminkan bukan hanya bagaimana masyarakat mengatur kekuasaan, tetapi juga bagaimana mereka memaknai hidup bersama.

### **C. Sistem Hukum dalam Perspektif Sosial Budaya**

Sistem hukum tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan budaya tempat ia tumbuh dan beroperasi. Hukum bukanlah entitas netral dan universal semata, melainkan suatu produk sosial yang tercipta dari interaksi antara nilai, norma, dan institusi dalam suatu masyarakat (Cotterrell, 2006). Dengan kata lain, hukum merupakan bagian integral dari sistem sosial budaya, yang mencerminkan cara suatu masyarakat memahami keadilan, otoritas, dan ketertiban sosial.

Dalam perspektif antropologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai peraturan tertulis yang dikeluarkan oleh negara, tetapi juga sebagai pranata sosial yang tumbuh dari kebiasaan, tradisi, dan praktik kolektif masyarakat. Konsep ini dikenal dengan istilah *living law*, yakni hukum yang hidup dan dijalankan dalam praktik sehari-hari (Ehrlich, 1936). Di Indonesia, hukum adat menjadi contoh nyata dari

sistem hukum yang berakar dalam nilai-nilai budaya lokal dan tetap relevan meskipun dihadapkan pada sistem hukum nasional yang formal.

Sistem hukum di Indonesia sendiri merupakan sistem hukum plural yang terdiri dari tiga subsistem utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional (Lev, 1972). Ketiganya berinteraksi dalam dinamika yang kompleks, kadang bersinergi dan kadang pula saling berkonflik. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya mencerminkan struktur kekuasaan formal, tetapi juga budaya dan identitas sosial masyarakat yang menjalankannya.

Dalam hukum adat, misalnya, keadilan tidak diukur semata dari ketegasan hukuman, tetapi dari kemampuan sistem tersebut menjaga harmoni sosial. Penyelesaian konflik melalui musyawarah, mediasi, dan konsensus menunjukkan nilai-nilai kolektif dan kekeluargaan yang dominan dalam struktur budaya Indonesia (Soepomo, 1986). Hukum dalam konteks ini lebih mengutamakan pemulihan relasi sosial daripada penghukuman.

Sistem hukum yang mengakar dalam budaya juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat memandang pelanggaran hukum. Dalam beberapa komunitas tradisional, pelanggaran bukan hanya merusak hubungan antarindividu, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap kosmos atau tatanan spiritual. Oleh karena itu, penyelesaian hukum mencakup ritual-ritual adat sebagai bentuk pemulihan tatanan (Benda-Beckmann & Benda-Beckmann, 2006).

Penting untuk dipahami bahwa keberadaan hukum formal yang diatur dalam undang-undang negara seringkali belum sepenuhnya menggantikan peran hukum adat. Di banyak daerah, terutama di pedesaan dan komunitas adat, sistem hukum lokal tetap menjadi rujukan utama dalam menyelesaikan persoalan sosial. Hal ini menandakan adanya keterkaitan erat antara sistem hukum dan budaya lokal, yang tidak bisa begitu saja digantikan oleh sistem hukum yang seragam (Hooker, 1975).

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa modernisasi dan globalisasi membawa tantangan besar terhadap keberlangsungan sistem hukum berbasis budaya. Penyeragaman hukum melalui regulasi negara sering kali mengabaikan kompleksitas lokal yang melekat dalam masyarakat. Akibatnya, banyak hukum adat yang terpinggirkan dan kehilangan legitimasi sosial, meskipun secara fungsional masih dibutuhkan oleh komunitas (Bedner & Van Huis, 2008).

Dinamika antara hukum formal dan hukum adat juga terlihat dalam sektor agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Banyak konflik agraria di Indonesia terjadi karena adanya tumpang tindih antara hak-hak adat dan kebijakan negara. Dalam hal ini, pendekatan hukum yang tidak sensitif terhadap nilai budaya lokal justru memperparah konflik sosial (Lindsey, 2008). Oleh karena itu, perspektif sosial budaya menjadi penting dalam merancang sistem hukum yang adil dan kontekstual.

Sistem hukum juga menjadi arena tempat nilai-nilai dominan beroperasi. Misalnya, dalam proses

legislasi, nilai-nilai patriarki sering kali terinternalisasi dalam berbagai regulasi yang kurang berpihak pada kelompok rentan seperti perempuan atau minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mencerminkan nilai budaya yang positif, tetapi juga bisa memperkuat ketimpangan sosial budaya jika tidak dikaji secara kritis (Merry, 2006).

Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, keberagaman budaya menuntut adanya pendekatan hukum yang pluralistik dan inklusif. Pengakuan terhadap masyarakat adat dalam konstitusi merupakan langkah penting dalam mengakomodasi keberagaman ini. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala, termasuk dominasi aparat negara dan kurangnya pemahaman terhadap struktur sosial budaya lokal (Davidson & Henley, 2007).

Sistem hukum dalam perspektif sosial budaya juga menyoroti pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Di banyak kasus, ketidakpercayaan terhadap institusi hukum formal disebabkan oleh ketidaksesuaian antara nilai hukum dengan nilai sosial yang diyakini masyarakat. Hukum yang tidak berakar dalam budaya lokal sering dianggap asing, tidak adil, dan hanya melayani kepentingan elite (Tyler, 2006).

Untuk memperkuat legitimasi hukum, diperlukan pendekatan hukum yang partisipatif dan dialogis. Proses pembuatan hukum seharusnya melibatkan masyarakat sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek yang dikenai peraturan. Dalam hal ini, budaya berperan sebagai sumber inspirasi sekaligus

kontrol terhadap pembentukan sistem hukum yang kontekstual dan berkeadilan sosial (Friedman, 1975).

Hukum sebagai pranata sosial juga memainkan peran dalam reproduksi dan transformasi budaya. Melalui regulasi dan keputusan hukum, nilai-nilai tertentu diperkuat dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun, hukum juga bisa menjadi alat perubahan budaya, misalnya melalui hukum yang mendorong kesetaraan gender, perlindungan lingkungan, atau hak-hak masyarakat adat (Santos, 2002).

Pada akhirnya, memahami sistem hukum dari perspektif sosial budaya membuka ruang bagi interpretasi hukum yang lebih manusiawi dan kontekstual. Hukum tidak lagi dipandang semata sebagai teks formal yang kaku, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dinamis dan berakar pada pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian, pengembangan hukum yang berkelanjutan harus memperhitungkan keanekaragaman budaya dan aspirasi sosial masyarakat Indonesia.

#### **D. Hukum dan Tantangan Globalisasi**

Globalisasi telah menjadi fenomena dominan abad ke-21 yang tidak hanya mempengaruhi bidang ekonomi dan budaya, tetapi juga menimbulkan tantangan signifikan terhadap sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dapat dipahami semata sebagai produk internal suatu negara bangsa, melainkan sebagai bagian dari interaksi hukum transnasional yang kompleks (Santos, 2002).

Kedaulatan hukum nasional diuji oleh derasnya arus informasi, perdagangan, migrasi, dan perkembangan teknologi yang melintasi batas-batas negara.

Salah satu dampak paling nyata dari globalisasi terhadap hukum adalah tekanan untuk menyelaraskan sistem hukum nasional dengan norma-norma dan standar internasional. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, perjanjian perdagangan internasional dan organisasi global seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia memainkan peran besar dalam membentuk arah kebijakan hukum nasional, terutama dalam bidang ekonomi dan lingkungan hidup (Stiglitz, 2002). Akibatnya, hukum menjadi medan tarik-menarik antara kepentingan domestik dan kepentingan global.

Dalam bidang hukum bisnis, globalisasi telah menciptakan kerangka hukum baru seperti *lex mercatoria*, yaitu hukum perdagangan internasional yang bersifat non-negara dan dibentuk oleh pelaku ekonomi global. Keberadaan lembaga arbitrase internasional seperti ICC dan UNCITRAL menjadi simbol dari bentuk hukum yang tidak lagi bergantung pada sistem hukum nasional, melainkan bertumpu pada kesepakatan antar pelaku transnasional (Teubner, 1997). Fenomena ini memperlihatkan bahwa globalisasi mendorong hukum keluar dari batas yurisdiksi negara.

Di sisi lain, tantangan globalisasi terhadap hukum juga tampak dalam isu perlindungan hak asasi manusia. Banyak negara dihadapkan pada tuntutan untuk mematuhi standar HAM internasional yang

dikodifikasi dalam perjanjian seperti ICCPR atau CEDAW. Meskipun bertujuan untuk menjamin perlindungan universal, penerapan norma-norma ini sering kali berbenturan dengan sistem nilai lokal dan interpretasi kultural yang berbeda (Merry, 2006). Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah bagaimana menyeimbangkan antara norma global dan kearifan lokal.

Isu lingkungan global juga menjadi ujian besar bagi sistem hukum. Globalisasi menciptakan tekanan ekologis yang menuntut respons hukum lintas negara. Perjanjian internasional seperti Paris Agreement atau Protokol Kyoto mewajibkan negara-negara untuk mengadopsi kebijakan hukum yang ramah lingkungan. Namun, di banyak kasus, implementasi hukum lingkungan internasional terganjal oleh kepentingan ekonomi domestik serta lemahnya kapasitas institusional negara berkembang (Oosterveer & Mol, 2003).

Dalam konteks Indonesia, globalisasi hukum dapat diamati dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan standar internasional. Misalnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan ketentuan WTO dan TRIPS. Meski demikian, implementasi substansial dari regulasi tersebut masih menghadapi kendala karena perbedaan dalam kapasitas penegakan hukum dan persepsi sosial terhadap hukum (Lindsey, 2008).

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah munculnya kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, pencucian uang, terorisme, dan kejahatan siber. Kejahatan ini menuntut koordinasi hukum lintas negara yang efektif. Namun, sistem hukum nasional kerap tidak mampu mengejar pelaku kejahatan yang beroperasi secara global, baik karena keterbatasan hukum positif maupun karena hambatan diplomatik dan politik (Naim, 2005). Oleh karena itu, hukum harus bertransformasi agar bisa menjangkau ranah global.

Sistem hukum nasional sering kali berada dalam posisi defensif terhadap ekspansi hukum global. Di satu sisi, negara ingin menjaga kedaulatan hukum nasionalnya, namun di sisi lain, tekanan dari lembaga internasional dan kekuatan pasar global menuntut keterbukaan dan fleksibilitas. Situasi ini menciptakan ruang negosiasi di mana hukum harus beradaptasi tanpa kehilangan akar budayanya (Cotterrell, 2006).

Globalisasi juga memicu proliferasi aktor-aktor non-negara dalam pembentukan norma hukum. LSM internasional, korporasi multinasional, dan organisasi masyarakat sipil global berperan dalam mengembangkan dan memaksakan norma-norma baru. Proses ini disebut *governance without government*, yaitu tata kelola global yang tidak selalu melibatkan negara sebagai aktor utama (Rosenau, 1997). Hal ini menantang konsep tradisional tentang kedaulatan hukum dan menuntut redefinisi peran negara.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, hukum perlu memposisikan dirinya sebagai sarana

adaptasi sosial yang dinamis. Hukum harus mampu mengakomodasi perubahan global sambil tetap menjaga nilai-nilai lokal dan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang reflektif, partisipatif, dan interkultural, bukan hanya legalistik dan positivistik semata (Friedman, 2009).

Transformasi hukum akibat globalisasi juga membuka peluang bagi terjadinya hibridisasi hukum. Hukum nasional tidak lagi murni bersifat lokal atau universal, tetapi merupakan hasil dari proses pencampuran elemen-elemen lokal dan global. Proses ini mencerminkan bahwa hukum bukanlah sistem tertutup, melainkan bagian dari jaringan budaya global yang saling berinteraksi (Twining, 2000).

Namun demikian, tidak semua dampak globalisasi terhadap hukum bersifat positif. Ketimpangan akses terhadap teknologi dan informasi, serta dominasi hukum negara-negara maju, dapat menciptakan bentuk baru imperialisme hukum. Hal ini memperlemah posisi negara-negara berkembang dalam perundingan internasional dan mengancam eksistensi hukum lokal yang lebih berakar (Rajagopal, 2003). Oleh karena itu, resistensi terhadap globalisasi hukum menjadi bagian dari perjuangan mempertahankan keadilan sosial dan identitas budaya.

Untuk menjawab tantangan ini, pendidikan hukum juga harus berubah. Mahasiswa hukum perlu dibekali perspektif global dan kultural agar dapat memahami dinamika hukum dalam konteks global. Kurikulum hukum harus mencakup kajian tentang hukum internasional, hukum transnasional, dan

pluralisme hukum untuk membekali lulusan dengan kemampuan berpikir lintas batas (Dezalay & Garth, 2002).

Hukum di era globalisasi bukan lagi sekadar perangkat aturan, tetapi juga medan perjuangan nilai-nilai. Apakah hukum akan menjadi alat dominasi atau emansipasi, sangat tergantung pada bagaimana masyarakat dan negara memposisikan dirinya dalam arus perubahan global. Oleh karena itu, hukum harus senantiasa ditinjau dari perspektif sosial budaya agar tetap relevan dan berdaya guna di tengah dinamika global.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Anholt, S. (2007). *Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions*. Palgrave Macmillan.
- Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. University of Minnesota Press.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Greenwood Press.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Bloomsbury Publishing.
- Castells, M. (2009). *Communication Power*. Oxford University Press.
- Durkheim, E. (1893). *The Division of Labour in Society*. Free Press.
- Friedman, L. M. (2001). *Law in America: A Short History*. Modern Library.

- Giddens, A. (1990). *The Consequences of Modernity*. Stanford University Press.
- Held, D., & McGrew, A. (2007). *Globalization Theory: Approaches and Controversies*. Polity Press.
- Lasswell, H. D. (1958). *Politics: Who Gets What, When, How*. Meridian Books.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Merry, S. E. (2006). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. Sage Publications.
- Santos, B. de Sousa (2002). *Toward a New Legal Common Sense*. Butterworths.
- Stiglitz, J. E. (2002). *Globalization and Its Discontents*. W. W. Norton & Company.